



**QANUN KOTA LHOKEUMAWE
NOMOR 5 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KOTA LHOKEUMAWE TAHUN 2012-2017**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA LHOKEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilantiknnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lhokseumawe periode 2012-2017, maka untuk menjabarkan Visi dan Misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang Demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2017 ditetapkan dengan Qanun;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perencanaan pembangunan Aceh/Kabupaten/Kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan



The following information is provided for your reference:
 1. The total number of items is 100.
 2. The items are divided into two categories: A and B.
 3. Category A contains 60 items, and Category B contains 40 items.
 4. The items are distributed across five different locations.
 5. The distribution is as follows:
 - Location 1: 20 items (10 from A, 10 from B)
 - Location 2: 15 items (8 from A, 7 from B)
 - Location 3: 10 items (5 from A, 5 from B)
 - Location 4: 25 items (15 from A, 10 from B)
 - Location 5: 30 items (15 from A, 15 from B)

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2017;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010- 2014;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

dan

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2012-2017.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Lhokseumawe yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kota selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
7. Perangkat Daerah Kota adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Kota atau disebut juga dengan Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat dengan SKPK.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kota untuk mencapai tujuan.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2017 yang selanjutnya disebut dengan RPJM Kota adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah untuk periode 5 (lima) Tahun yang mengacu kepada RPJP Kota.
13. Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah SKPK Tahun 2012-2017 yang selanjutnya disebut Renstra SKPK Tahun 2012-2017 adalah Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah untuk priode 5 (lima) Tahun, terhitung sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017 yang mengacu kepada RPJM Kota.
14. Rencana Kerja Pembangunan Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan daerah Kota untuk periode 1 (satu) Tahun.
15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Bappeda Kota Lhokseumawe adalah Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pengendalian pembangunan di Kota Lhokseumawe yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Lhokseumawe melalui Sekretaris Daerah.
16. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe adalah Kepala SKPK Lhokseumawe yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kota.

BAB II RPJM KOTA

Pasal 2

RPJM Kota berisi penjabaran visi, misi dan program Walikota hasil pemilihan Walikota/Wakil Walikota yang dilaksanakan secara langsung pada 9 April 2012 serta merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) Tahun dimulai sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017.

Pasal 3

(1) Sistematika RPJM Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

- | | |
|---------|--|
| BAB I | : Pendahuluan; |
| BAB II | : Gambaran Umum Kondisi Kota; |
| BAB III | : Gambaran Pengelolaan Keuangan Kota serta Kerangka Pendanaan; |
| BAB IV | : Analisis Isu-Isu Strategis; |
| BAB V | : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; |
| BAB VI | : Strategi dan Arah Kebijakan; |

- BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota;
BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan;
BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Kota;
BAB X : Pedoman Transisi dan Kaedah Pelaksanaan;
BAB XI : Penutup.

- (2) Sistematika RPJM Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini;

Pasal 4

RPJM Kota sebagaimana tercantum dalam lampirann dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 5

- RPJM Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi:
- SKPK dalam menyusun Renstra SKPK dan seluruh pemangku kepentingan di Kota Lhokseumawe dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama periode 2012-2017;
 - Pemerintah Kota dalam menyusun RKP Kota.

Pasal 6

RPJM Kota dilaksanakan oleh Walikota dan seluruh SKPK dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kota.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA LHOKSEUMAWE

Pasal 7

- Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Kota.
- Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - kebijakan perencanaan pembangunan Kota; dan
 - pelaksanaan rencana pembangunan Kota.
- Tata cara dan mekanisme pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- RPJM Kota dalam perjalanannya bila diperlukan dapat dilakukan peninjauan kembali dan/atau perubahan.
- Peninjauan kembali dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat setelah 2 (dua) tahun sejak Qanun ini ditetapkan.

- (3) Peninjauan kembali dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditetapkan dengan Qanun.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan Kota yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Qanun ini ditetapkan, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (5) Pada saat Qanun ini mulai berlaku maka RPJM Kota menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai Tahun 2017 dan dapat dijadikan sebagai RPJM Kota Lhokseumawe transisi untuk dipedomani dalam penyusunan RKPK Tahun 2018 sebelum ditetapkannya RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2023 yang memuat visi dan misi Walikota terpilih periode selanjutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lhokseumawe 2007-2012 dan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 8 September 2014

 **WALIKOTA LHOKEUMAWE,** 


SUAIDI YAHYA

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2012 -2017

I. PENJELASAN UMUM

1. Dasar Pemikiran.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang berasaskan desentralisasi, dimana Pemerintah menyerahkan sebagian wewenang kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan guna mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Sedemikian besarnya wewenang dan tugas Pemerintah Daerah sehingga memerlukan koordinasi, intergasi, sinkronisasi dan sinergi mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian pembangunan, dengan demikian diperlukan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang efektif dan efisien.

Salah satu unsur dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah wajib adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah sebagaimana pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014 serta UUPA secara khusus.

Penyusunan dokumen perencanaan juga merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan utama pembangunan Kota Lhokseumawe berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Lhokseumawe yang bermartabad, peningkatan kesejahteraan dan berkeadilan serta peningkatan kemandirian yang dilaksanakan dengan menuangkannya dalam dokumen rencana pembangunan Kota Lhokseumawe.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2017 merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota Lhokseumawe hasil pemilihan Walikota/Wakil Walikota yang dilaksanakan secara langsung pada 9 April 2012 serta merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun dimulai sejak tahun 2012 sampai tahun 2017.

RPJM Kota Lhokseumawe dalam penyusunannya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032, serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Penyusunan RPJM Kota Lhokseumawe juga dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)

Dokumen RPJM Kota Lhokseumawe ini dapat digunakan sebagai dokumen RPJM Kota Lhokseumawe Transisi untuk pedoman dalam penyusunan RKPK Tahun 2018 sebelum RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2023 disusun dan ditetapkan dengan Qanun Kota Lhokseumawe.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

RP

**LAMPIRAN
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2012-2017**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2012-2017**



**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2014**

DAFTAR ISI

<i>Daftar Isi</i>	<i>i</i>
<i>Daftar Tabel</i>	<i>iv</i>
<i>Daftar Gambar</i>	<i>xiv</i>
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang.....	I - 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I - 2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I - 4
1.4 Sistematika Penulisan.....	I - 5
1.5 Maksud Dan Tujuan	I - 7
1.5.1. Maksud	I - 7
1.5.2. Tujuan	I - 7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA	II - 1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II - 1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	II - 1
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II - 8
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana.....	II - 8
2.1.4 Demografi	II - 10
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II - 11
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II - 11
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II - 18
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga	II - 28
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II - 29
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib	II - 29
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan	II - 110
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	II - 128
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II - 128
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II - 130
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi.....	II - 136
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia	II - 140
2.4.5 Telaahan Dokumen Draf RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2011-2031	II - 142
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SERTA KERANGKA PENDANAAN	III - 1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III - 1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBK Lhokseumawe	III - 1
3.1.2 Neraca Keuangan Kota Lhokseumawe	III - 19
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III - 24
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran	III - 24
3.2.2 Analisis Pembiayaan	III - 25
3.3 Kerangka Pendanaan	III - 28
3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama	III - 28
3.3.2 Proyeksi Data Masa Lalu dan Perhitungan Kerangka Pendanaan	III - 31

BAB IV	ANALISIS ISU-ISU SRATEGIS	IV - 1
4.1	Permasalahan Pembangunan Kota Lhokseumawe...	IV - 1
4.1.1	Permasalahan Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah.....	IV - 1
4.1.2	Permasalahan Pelaksanaan Nilai-nilai Dinul Islam.....	IV - 2
4.1.3	Permasalahan Ekonomi.....	IV - 2
4.1.4	Permasalahan Pendidikan	IV -12
4.1.5	Permasalahan Kesehatan	IV -13
4.1.6	Permasalahan Infrastruktur dan Tata Ruang.	IV -15
4.1.7	Permasalahan Lingkungan	IV -19
4.2	Isu- Isu Strategis Kota Lhokseumawe Tahun 2012- 2017.....	IV -19
4.2.1	Isu Strategis Tata Kelola Pemerintahan	IV -20
4.2.2	Isu Strategis Pelaksanaan Nilai-nilai Dinul Islam	IV -21
4.2.3	Isu Strategis Bidang Ekonomi	IV -21
4.2.4	Isu Strategis Pendidikan.....	IV -26
4.2.5	Isu Strategis Kesehatan	IV -27
4.2.6	Isu Strategis Infrastruktur dan Tata Ruang ..	IV -28
4.2.7	Isu Strategis Lingkungan Hidup	IV -34
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	V - 1
5.1	Visi Pembangunan.....	V - 1
5.2	Misi.....	V - 2
5.3	Tujuan dan Sasaran	V - 4
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI - 1
6.1	Strategi Pembangunan Kota Lhokseumawe.....	VI - 1
6.1.1	Menjalankan Tata Kelola Pemerintahan Kota Lhokseumawe Yang Amanah Dengan Mengimplementasikan UUPA.....	VI - 1
6.1.2	Menerapkan Nilai-nilai Budaya Aceh dan Nilai-nilai Dinul Islam Disemua Sektor Kehidupan Masyarakat	VI - 2
6.1.3	Memperkuat Struktur Sosial Ekonomi, Peningkatan Nilai Tambah Produksi Masyarakat Serta Optimalisasi Pemanfaatan SDA	VI - 2
6.1.4	Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Pendidikan dan Kesehatan	VI - 3
6.1.5	Melaksanakan Pembangunan Infrastruktur dan Energi Kota Lhokseumawe Yang Proporsional, Terintegrasi dan Berkelanjutan	VI - 3
6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kota Lhokseumawe.	VI - 3
6.2.1	Kebijakan dari Misi Pertama.....	VI - 4
6.2.2	Kebijakan dari Misi Kedua.....	VI - 5
6.2.3	Kebijakan dari Misi Ketiga	VI - 5
6.2.4	Kebijakan dari Misi Keempat	VI - 6
6.2.5	Kebijakan dari Misi Kelima.....	VI - 7

BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN ..	VII - 1
7.1	Kebijakan Umum.....	VII - 1
7.1.1	Menjalankan Tata Kelola Pemerintahan Kota Lhokseumawe Yang Amanah Dengan Mengimplementasikan UUPA.....	VII - 2
7.1.2	Menerapkan Nilai-nilai Budaya Aceh dan Nilai-nilai Dinul Islam Disemua Sektor Kehidupan Masyarakat	VII - 5
7.1.3	Memperkuat Struktur Sosial Ekonomi, Peningkatan Nilai Tambah Produksi Masyarakat Serta Optimalisasi Pemanfaatan SDA	VII - 6
7.1.4	Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Pendidikan dan Kesehatan	VII - 11
7.1.5	Melaksanakan Pembangunan Infrastruktur dan Energi Kota Lhokseumawe Yang Proporsional, Terintegrasi dan Berkelanjutan	VII - 13
7.2	Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe.....	VII - 34
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN	VIII - 1
8.1	Perencanaan Strategik.....	VIII - 1
8.2	Perencanaan Operasional	VIII - 33
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KOTA LHOKSEUMAWE	IX - 1
BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN	X - 1
10.1	Pedoman Transisi	X - 1
10.2	Kaidah Pelaksanaan	X - 1
BAB XI	PENUTUP	XI - 1

KOTA

17

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Curah Hujan, Hari Hujan, dan Penyinaran Kota Lhokseumawe Tahun 2007	II -5
Tabel 2.2	Curah Hujan, Hari Hujan, dan Penyinaran Kota Lhokseumawe Tahun 2008	II -6
Tabel 2.3	Curah Hujan, Hari Hujan, dan Penyinaran Kota Lhokseumawe Tahun 2009	II -6
Tabel 2.4	Curah Hujan, Hari Hujan, dan Penyinaran Kota Lhokseumawe Tahun 2010	II - 6
Tabel 2.5	Curah Hujan, Hari Hujan, dan Penyinaran Kota Lhokseumawe Tahun 2011	II -7
Tabel 2.6	Penggunaan Lahan Kota Lhokseumawe Tahun 2011 ..	II - 7
Tabel 2.7	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2012	II-10
Tabel 2.8	Pertumbuhan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2007-2011	II-11
Tabel 2.9	Produk Domestik Regional Bruto Kota Lhokseumawe Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha dengan Migas & tanpa Migas (Juta Rupiah).....	II-12
Tabel 2.10	Produk Domestik Regional Bruto Kota Lhokseumawe Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha dengan Migas & tanpa Migas (Juta Rupiah).....	II-13
Tabel 2.11	Nilai & Laju Pertumbuhan PDRB Kota Lhokseumawe dengan Migas & tanpa Migas Tahun 2009 – 2011 Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah).....	II-14
Tabel 2.12	Perkembangan Inflasi Kota Lhokseumawe dibandingkan dengan Kota Banda Aceh dan Nasional Tahun 2008 – 2011	II-15
Tabel 2.13	Perbandingan Kenaikan Pendapatan Perkapita Terhadap Inflasi Tahun 2008 – 2011	II-16
Tabel 2.14	Jumlah Penduduk Miskin Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2006 s.d 2010	II-17
Tabel 2.15	Angka Kriminalitas yang Tertangani Di Kota Lhokseumawe Tahun 2010 – 2012	II-18
Tabel 2.16	Perbandingan Angka Melek Huruf Kota Lhokseumawe dan Provinsi Aceh Tahun 2006 s.d 2010	II-19
Tabel 2.17	Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Lhokseumawe dengan Provinsi Aceh Tahun 2006 s.d 2010	II-20
Tabel 2.18	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2006 s.d 2011 Kota Lhokseumawe	II-20

Tabel 2.19	Persentase Penduduk menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kota Lhokseumawe Tahun 2008 – 2010	II-22
Tabel 2.20	Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Lhokseumawe Tahun 2006 s.d 2011	II-23
Tabel 2.21	AKB dan AKHB Kota Lhokseumawe	II-24
Tabel 2.22	Jumlah Kematian Balita Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2011	II-25
Tabel 2.23	Angka Harapan Hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2011	II-26
Tabel 2.24	Persentase Balita Gizi Buruk Kota Lhokseumawe Tahun 2006-2011	II-27
Tabel 2.25	Rasio Penduduk yang Bekerja Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011	II-28
Tabel 2.26	Group Kesenian dan Gedung Kesenian Kota Lhokseumawe	II-29
Tabel 2.27	Perkembangan Angka Partisipasi (APS) Sekolah Tahun 2006 s/d 2011 Kota Lhokseumawe	II-30
Tabel 2.28	Jumlah Sekolah dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2006 – 2011 Kota Lhokseumawe	II-31
Tabel 2.29	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2006 – 2011 Kota Lhokseumawe	II-32
Tabel 2.30	Rasio Guru/ Murid per Kelas Rata – rata Tahun 2006 – 2011 Kota Lhokseumawe	II-32
Tabel 2.31	Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah Pada Jenjang Pendidikan Menengah Kota Lhokseumawe dan Provinsi Aceh Tahun 2006-2011	II-33
Tabel 2.32	Rasio Ketersediaan Sekolah – Penduduk Usia Sekolah Tahun 2006 – 2011 Kota Lhokseumawe	II-33
Tabel 2.33	Rasio Guru Terhadap Murid Tahun 2006 – 2011 Kota Lhokseumawe	II-34
Tabel 2.34	Rasio Guru Terhadap murid per Kelas Rata-rata Tahun 2006 – 2011 Kota Lhokseumawe	II-34
Tabel 2.35	Melek Huruf Usia > 15 Tahun, Tahun 2006 – 2010 Kota Lhokseumawe	II-35
Tabel 2.36	Kondisi Ruang Kelas SD/MI Tahun 2009 – 2011 Kota Lhokseumawe	II-35
Tabel 2.37	Kondisi Ruang Kelas SMP/Mts dan SMA/MA/SMK Tahun 2009 – 2011 Kota Lhokseumawe	II-36
Tabel 2.38	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Lhokseumawe Tahun	II-36
Tabel 2.39	Angka Putus Sekolah (APS) Tahun 2006 – 2011 Kota Lhokseumawe	II-37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I - 5
Gambar 2.1 Kota Lhokseumawe	II - 1
Gambar 2.2 Peta Kemiringan Lereng Kota Lhokseumawe.....	II - 3
Gambar 2.3 Peta Geologi Kota Lhokseumawe	II - 4
Gambar 2.4 Peta Hidrologi Kota Lhokseumawe.....	II - 5
Gambar 2.5 Peta Rawan Bencana Kota Lhokseumawe	II - 9
Gambar 2.6 Grafik Produksi Pangan Kota Lhokseumawe	II-111
Gambar 2.7 Grafik Kontribusi Subsektor Pertanian dalam Kuintal Tahun 2010-2011	II-115
Gambar 2.8 Grafik Jumlah Produksi Daging Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011	II-118
Gambar 3.1 Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2012	III - 2
Gambar 3.2 Kontribusi Jenis PAD Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2012	III - 7
Gambar 3.3 Kontribusi Jenis Dana Perimbangan Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2012	III- 10
Gambar 3.4 Kontribusi Jenis Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2012	III- 13

14

Tabel 8.4	Indikasi Rencana Program dan Rencana Pendanaan berdasarkan Prioritas Pembangunan 4.....	VIII-19
Tabel 8.5	Indikasi Rencana Program dan Rencana Pendanaan berdasarkan Prioritas Pembangunan 5.....	VIII-24
Tabel 8.6	Indikasi Rencana Program dan Rencana Pendanaan berdasarkan Prioritas Pembangunan 6.....	VIII-30
Tabel 8.7	Indikasi Rencana Program dan Rencana Pendanaan berdasarkan Prioritas Pembangunan 7.....	VIII-32
Tabel 8.8	Indikasi Rencana dan Rencana Pendanaan yang dilaksanakan seluruh SKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2017	VIII-34
Tabel 9.1	Penetapan Indikator Kinerja Kota Lhokseumawe	IX-2

14

Tabel 3.13	Defisit dan Surplus Riil APBK Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2012	III-26
Tabel 3.14	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2012	III-26
Tabel 3.15	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2012	III-27
Tabel 3.16	Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2012	III-29
Tabel 3.17	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe untuk Pendanaan Pembangunan Daerah pada kurun Waktu Tahun 2013-2017.....	III- 32
Tabel 3.18	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2013-2017	III-35
Tabel 4.1	Sarana Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 ...	IV-18
Tabel 5.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran	V-7
Tabel 6.1	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Misi 1	VI-8
Tabel 6.2	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Misi 2	VI-11
Tabel 6.3	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Misi 3	VI-12
Tabel 6.4	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Misi 4	VI-16
Tabel 6.5	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Misi 5	VI-18
Tabel 7.1	Sasaran, Strategi dan Program Pembangunan Misi 1 ..	VII-16
Tabel 7.2	Sasaran, Strategi dan Program Pembangunan Misi 2 ..	VII-21
Tabel 7.3	Sasaran, Strategi dan Program Pembangunan Misi 3 ..	VII-23
Tabel 7.4	Sasaran, Strategi dan Program Pembangunan Misi 4 ..	VII-28
Tabel 7.5	Sasaran, Strategi dan Program Pembangunan Misi 5 ..	VII-31
Tabel 8.1	Indikasi Rencana Program dan Rencana Pendanaan berdasarkan Prioritas Pembangunan 1.....	VIII-4
Tabel 8.2	Indikasi Rencana Program dan Rencana Pendanaan berdasarkan Prioritas Pembangunan 2.....	VIII-13
Tabel 8.3	Indikasi Rencana Program dan Rencana Pendanaan berdasarkan Prioritas Pembangunan 3.....	VIII-15

Tabel 2.151	Jumlah Kriminalitas Di Kota Lhokseumawe Tahun 2009 – 2010	II-136
Tabel 2.152	Jumlah Demonstrasi Kota Lhokseumawe Tahun 2007-2011	II-137
Tabel 2.153	Lama Proses Perijinan di Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe	II-137
Tabel 2.154	Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha Kota Lhokseumawe	II-138
Tabel 2.155	Jumlah Desa Swasembada Di Kota Lhokseumawe	II-140
Tabel 2.156	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011	II-141
Tabel 2.157	Rasio Ketergantungan Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011	II-142
Tabel 2.158	Pusat-pusat Pelayanan Kegiatan Di Kota Lhokseumawe	II-143
Tabel 2.159	Hasil Telaahan Struktur Ruang Kota Lhokseumawe	II-144
Tabel 2.160	Hasil Telaahan Pola Ruang Kota Lhokseumawe	II-148
Tabel 3.1	Realisasi Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2012	III-3
Tabel 3.2	Kontribusi Masing-masing Pos Pendapatan Dalam Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2012	III-4
Tabel 3.3	Capaian PAD Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2012	III-6
Tabel 3.4	Capaian Dana Perimbangan Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2012	III-9
Tabel 3.5	Kontribusi Dana Perimbangan Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2012	III-10
Tabel 3.6	Realisasi dan Capaian Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2012	III-12
Tabel 3.7	Struktur dan Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2012	III-15
Tabel 3.8	Capaian Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2012	III-16
Tabel 3.9	Neraca Keuangan Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2012	III-21
Tabel 3.10	Rasio Likuiditas Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2012	III-23
Tabel 3.11	Rasio Solvabilitas Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2012	III-24
Tabel 3.12	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2012	III-25

Tabel 2.129	Produksi Telur Unggas Kota Lhokseumawe Tahun 2010 -2011	II-119
Tabel 2.130	Perkembangan Populasi Ternak Menurut Jenis Tahun 2009 – 2011	II-119
Tabel 2.131	Jumlah Kunjungan Wisata Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2012	II-120
Tabel 2.132	Objek Wisata Kota Lhokseumawe Tahun 2011	II-120
Tabel 2.133	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2011	II-122
Tabel 2.134	Jumlah Pembudidaya Kota Lhokseumawe Tahun 2012	II-122
Tabel 2.135	Luas Usaha Budidaya Perikanan Kota Lhokseumawe Tahun 2009 – 2012	II-123
Tabel 2.136	Jumlah Prasarana Perikanan Kota Lhokseumawe Tahun 2009-2011	II-123
Tabel 2.137	Produksi Perikanan Kota Lhokseumawe Tahun 2009 – 2011	II-124
Tabel 2.138	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011	II-125
Tabel 2.139	Cakupan Bina Kelompok Nelayan Tahun 2009 -2011...	II-126
Tabel 2.140	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011	II-126
Tabel 2.141	Kontribusi Sektor Industri Kota Lhokseumawe Tahun 2010 – 2011	II-127
Tabel 2.142	Kontribusi Sektor Industri Rumah Tangga terhadap PDRB Sektor Industri Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011	II-128
Tabel 2.143	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Lhokseumawe Tahun 2009 – 2010	II-128
Tabel 2.144	Pendapatan Per Kapita Kota Lhokseumawe Tahun 2007 – 2010	II-129
Tabel 2.145	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kota Lhokseumawe Tahun 2012	II-130
Tabel 2.146	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011	II-133
Tabel 2.147	Jenis, kelas dan Jumlah Restoran Kota Lhokseumawe 2012	II-134
Tabel 2.148	Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/ Hotel Kota Lhokseumawe Tahun 2012	II-134
Tabel 2.149	Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih Kota Lhokseumawe Tahun 2009-2010	II-135
Tabel 2.150	Rasio Ketersediaan Listrik Kota Lhokseumawe	II-136

Tabel 2.107 Jumlah Kegiatan Kepemudaan Kota Lhokseumawe Tahun 2012	II-96
Tabel 2.108 Jumlah Kegiatan Olahraga Kota Lhokseumawe Tahun 2012	II-96
Tabel 2.109 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011	II-98
Tabel 2.110 Jumlah Limnas Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011	II-99
Tabel 2.111 Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011	II-99
Tabel 2.112 Jumlah Penyuluh PNS, THL-TB, BPP, Gapoktan Kec, Desa, Kel. Tani Serta Penyuluh PNS Provinsi Tahun 2012	II-100
Tabel 2.113 Kelompok Binaan PKK Tahun 2006 s.d 2011 Kota Lhokseumawe	II-103
Tabel 2.114 PKK Aktif Tahun 2006 s.d 2011 Kota Lhokseumawe	II-103
Tabel 2.115 Pos yandu Aktif Tahun 2006 s.d 2011 Kota Lhokseumawe	II-104
Tabel 2.116 Data Jumlah Surat Kabar Nasional Di Kota Lhokseumawe Tahun 2011	II-107
Tabel 2.117 Data Jumlah Penyiar Radio/TV Lokal dan Nasional Kota Lhokseumawe Tahun 2012	II-108
Tabel 2.118 Data Jumlah Gedung Perpustakaan Kota Lhokseumawe Tahun 2006 s.d 2011	II-109
Tabel 2.119 Produksi Komoditas Pangan Kota Lhokseumawe Tahun 2007 - 2011	II-111
Tabel 2.120 Produktivitas Komoditas Pangan Kota Lhokseumawe Tahun 2007 - 2011	II-112
Tabel 2.121 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011	II-113
Tabel 2.122 Produksi Komoditas Pangan Kota Lhokseumawe Tahun 2006 - 2010	II-114
Tabel 2.123 Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011	II-114
Tabel 2.124 Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011	II-115
Tabel 2.125 Kontribusi Kelompok Tani terhadap PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011	II-116
Tabel 2.126 Perkembangan Populasi Ternak Menurut Jenis Kota Lhokseumawe Tahun 2009 - 2011	II-117
Tabel 2.127 Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011	II-117
Tabel 2.128 Jumlah Produksi Daging Kota Lhokseumawe Tahun 2010 - 2011	II-118

Tabel 2.83	Persentase Luas Permukiman yang Tertata Kota Lhokseumawe	II-73
Tabel 2.84	Jumlah Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2006 s/d 2011.....	II-75
Tabel 2.85	Persentase Luas Tanah Bersertifikat Tahun 2007 s.d 2011 Kota Lhokseumawe	II-76
Tabel 2.86	Rasio Penduduk berKTP per Satuan Penduduk Tahun 2006 s.d 2011 Kota Lhokseumawe	II-77
Tabel 2.87	Rasio Bayi Berakta Kelahiran Tahun 2006 s.d 2011 Kota Lhokseumawe	II-77
Tabel 2.88	Kepemilikan KTP Tahun 2006 s.d 2011 Kota Lhokseumawe	II-78
Tabel 2.89	Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk Tahun 2006 s.d 2011 Kota Lhokseumawe	II-78
Tabel 2.90	Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2006-2011	II-79
Tabel 2.91	Rasio KDRT Tahun 2006 s.d 2011 Kota Lhokseumawe.	II-80
Tabel 2.92	Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Tahun 2006 s.d 2011 Kota Lhokseumawe	II-81
Tabel 2.93	Rasio Akseptor KB Tahun 2006 s.d 2011 Kota Lhokseumawe	II-82
Tabel 2.94	Cakupan Peserta KB Aktif Tahun 2011 Kota Lhokseumawe	II-82
Tabel 2.95	Jumlah Penduduk Peserta KB Tahun 2011 Kota Lhokseumawe	II-83
Tabel 2.96	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Termasuk Dalam Kelompok Angkatan Kerja Tahun 2007-2011	II-83
Tabel 2.97	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Lhokseumawe dan Provinsi Aceh Tahun 2007-2011	II-84
Tabel 2.98	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Lhokseumawe dan Provinsi Aceh Tahun 2007-2011	II-85
Tabel 2.99	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2006 s/d 2011	II-87
Tabel 2.100	Jumlah UKM Non BPR/LKM Tahun 2006 s/d 2011	II-88
Tabel 2.101	Jumlah BPR/LKM Tahun 2006 s/d 2011	II-89
Tabel 2.102	Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2007 - 2011	II-89
Tabel 2.103	Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2006 s/d 2011	II-93
Tabel 2.104	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2006 s/d 2011 .	II-91
Tabel 2.105	Penyelenggara Festival Seni Budaya Kota Lhokseumawe	II-92
Tabel 2.106	Situs / Bangunan Cagar Budaya Kota Lhokseumawe..	II-94

Tabel 2.61	Sarana dan Prasarana Sampah Kota Lhokseumawe Tahun 2010	II-52
Tabel 2.62	Sarana Lainnya Dalam Persampahan Kota Lhokseumawe Tahun 2010	II-53
Tabel 2.63	Luas Wilayah dan Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Lhokseumawe.....	II-56
Tabel 2.64	Hasil Rekapitulasi Pendataan Sumber Air Bersih (SAB) Di Wilayah Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2008.....	II-57
Tabel 2.65	Jumlah Pelanggan Berdasarkan Golongan PDAM Tahun 2008 – 2010.....	II-57
Tabel 2.66	Tingkat Pelayanan PDAM Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2010	II-58
Tabel 2.67	Rumah Tangga Pengguna Listrik Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011	II-59
Tabel 2.68	Rekapitulasi Pendataan Jamban Di Kota Lhokseumawe Tahun 2008	II-59
Tabel 2.69	Kawasan Kumuh Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2010	II-60
Tabel 2.70	Rasio Bangunan ber- IMB per Satuan Bangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011	II-61
Tabel 2.71	RKPD Yang Telah Ditetapkan dengan PERDA Tahun 2010 – 2013.....	II-63
Tabel 2.72	Jumlah Kendaraan Dan Arus Penumpang Angkutan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2008- 2011	II-65
Tabel 2.73	Rasio Ijin Trayek Di Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011	II-65
Tabel 2.74	Uji KIR Angkutan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2009-2011	II-66
Tabel 2.75	Jumlah Pelabuhan Udara, Laut dan Terminal Bis Kota Lhokseumawe Tahun 2009-2011	II-67
Tabel 2.76	Rasio Angkutan Darat Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011	II-67
Tabel 2.77	Kepemilikan KIR Angkutan Umum Tahun 2010-2011 ..	II-68
Tabel 2.78	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011	II-68
Tabel 2.79	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Tahun 2010-2011	II-69
Tabel 2.80	Pemasangan Rambu-rambu Tahun 2010-2011	II-69
Tabel 2.81	Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2006 s/d 2011	II-71
Tabel 2.82	Hasil Rekapitulasi Pendataan Sumber Air Bersih (SAB) Di Wilayah Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2008.....	II-72

Tabel 2.40	Angka Kelulusan Kota Lhokseumawe Tahun 2006 – 2011	II-38
Tabel 2.41	Rekapitulasi Tipe Dayah Kota Lhokseumawe Hasil Akreditasi Tahun 2011.....	II-38
Tabel 2.42	Rekapitulasi Jumlah Dayah Hasil Pemuktahiran Kota Lhokseumawe Tahun 2011	II-39
Tabel 2.43	Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kota Lhokseumawe Tahun 2006-2011	II-39
Tabel 2.44	Rasio Posyandu Per Satuan Balita Per Kecamatan di Kota Lhokseumawe Tahun 2011	II-40
Tabel 2.45	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe	II-41
Tabel 2.46	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2006-2011	II-41
Tabel 2.47	Jumlah Dokter dan Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe	II-42
Tabel 2.48	Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011	II-42
Tabel 2.49	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011	II-43
Tabel 2.50	Angka Kematian Ibu Menurut Kecamatan Di Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2011	II-43
Tabel 2.51	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2009-2011	II-44
Tabel 2.52	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil, Persalinan Yang Ditolong Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan Kabupaten/Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2011.....	II-44
Tabel 2.53	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011	II-45
Tabel 2.54	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011	II-46
Tabel 2.55	Sebelas Jenis Penyakit Yang Terjadi Kota Lhokseumawe Untuk Tahun 2008-2011.....	II-46
Tabel 2.56	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011	II-47
Tabel 2.57	Cakupan Kunjungan Bayi menurut Kecamatan dan Puskesmas Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011	II-47
Tabel 2.58	Data Panjang Jalan Kota Lhokseumawe Tahun 2012 ...	II-48
Tabel 2.59	Jenis, Kondisi, dan Panjang Jalan (Km) Di Kota Lhokseumawe Tahun 2007-2011	II-49
Tabel 2.60	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe	II-50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode lima tahun sesuai dengan periode Kepemimpinan Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Nasional. Ini berarti bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Selanjutnya pasal 141 ayat (2), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Sinkronisasi dan sigernitas terhadap rencana pembangunan Kota Lhokseumawe perlu dilakukan agar lebih sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan-perubahan. Penyusunan RPJMD sendiri dilakukan secara integratif dengan dokumen-dokumen perencanaan yang lain, mulai dari tingkat Pusat dan Provinsi. Rencana semacam ini ditempuh untuk menciptakan kordinasi dan sinkronisasi berbagai program yang telah dirancang oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi. Berbagai program itu diupayakan bisa saling mendukung, dan terhindar tumpang tindih. Pada akhirnya, berbagai program pembangunan yang dilakukan bisa memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat Kota Lhokseumawe.

Proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2017, harus memperhatikan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025.

Selanjutnya RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2017 merupakan tahap kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Lhokseumawe Tahun 2002-2025. RPJMD tahap kedua melanjutkan visi pembangunan jangka panjang daerah yaitu mewujudkan Lhokseumawe sebagai kota yang bersyariat, sehat, cerdas dan sejahtera.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dari pembangunan nasional. Hal ini ditegaskan di dalam pasal 3 (tiga) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Hal ini perlu dilakukan agar pembangunan di daerah dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan nasional.

Berdasarkan hal tersebut, RPJMD Kota Lhokseumawe 2012-2017 ini didasarkan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat Nasional maupun Provinsi. Secara lebih rinci, yang dijadikan sebagai landasan penyusunan RPJMD Kota Lhokseumawe 2012-2017 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4725);
9. Undang-Undang No 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2015;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2012-2032;
 15. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017;
 16. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2012-2032;
 17. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032;

1.3 Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJMD merupakan penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah kedalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan. Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu, kerangka pendanaan dan pagu indikatif, urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD.

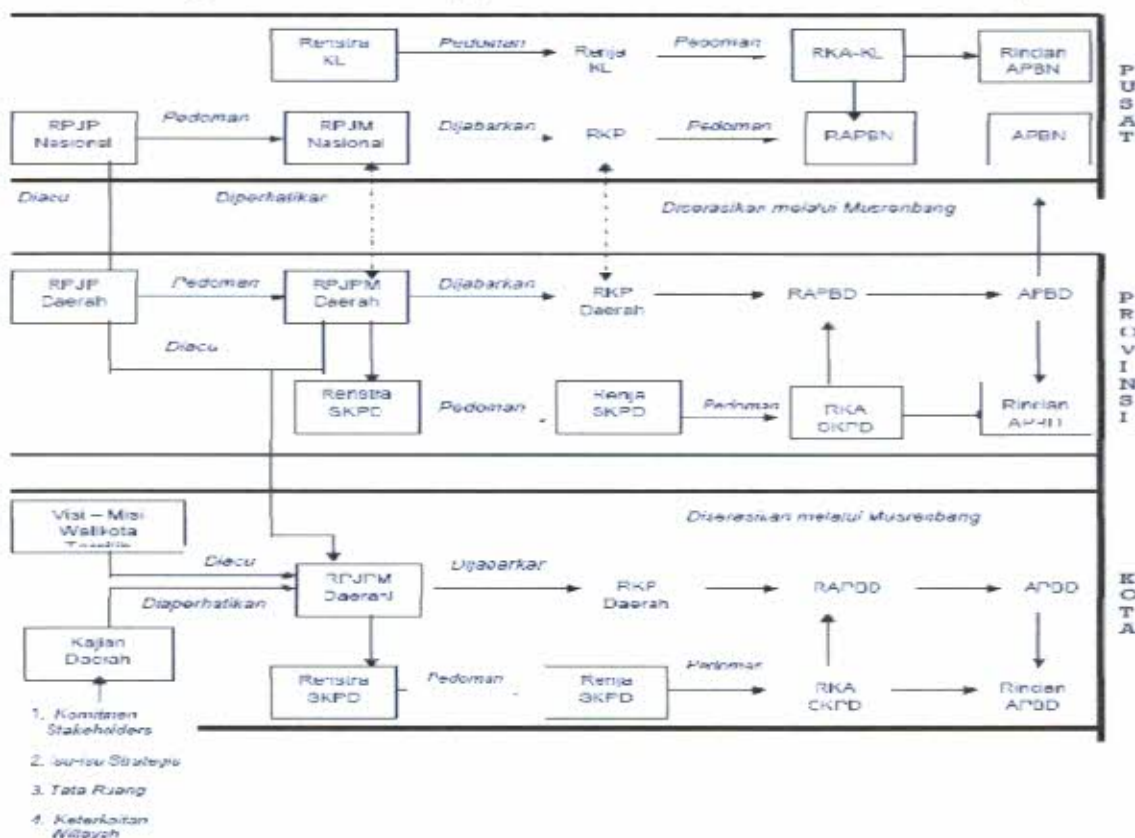
Rancangan RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW, memperhatikan RPJMN, RPJMA, RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya. Rancangan RPJMD menjadi pedoman SKPD dalam menyusun rancangan Renstra SKPD. Selanjutnya rancangan

Renstra SKPD menjadi bahan penyusunan rancangan RPJMD. RPJMD yang telah ditetapkan dengan Qanun Kota Lhokseumawe menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Keterkaitan RPJMD Kota Lhokseumawe dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan dengan Flow Chart, sebagai berikut :

Gambar 1.1

Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2017 disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, sistematika penulisan; serta maksud dan tujuan;

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, berisi kondisi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah;

- BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan,** berisi kinerja keuangan masa lalu dari sisi pendapatan; kinerja keuangan masa lalu dari sisi belanja daerah; kinerja pembiayaan daerah masa lalu; analisis neraca daerah; dan rekapitulasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis,** berisi uraian tentang permasalahan pembangunan; dan isu-isu strategis seperti pendidikan dan kesehatan, kemiskinan dan pengangguran, revitalisasi sektor pertanian dan pariwisata, infrastruktur, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang baik;
- BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran,** berisi tentang visi, penjelasan visi, misi, program prioritas, tujuan dan sasaran;
- BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan,** berisi analisis SWOT dan arah kebijakan pembangunan Kota Lhokseumawe;
- BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah,** berisi kebijakan umum pembangunan daerah sebagai acuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berisi program pembangunan daerah, dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan baik dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran;
- BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan,** pada bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD, pada bagian ini juga diuraikan pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan;
- BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah,** berisikan aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; dan aspek daya saing daerah;
- BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan,** berisikan program transisi; dan kaidah pelaksanaan.

1.5 Maksud dan Tujuan

1.5.1. Maksud

Maksud penyusunan RPJMD Kota Lhokseumawe tahun 2012-2017 adalah memberikan pedoman bagi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kota Lhokseumawe secara sinergis.

RPJMD Kota Lhokseumawe tahun 2012-2017 pada dasarnya dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan. Didalamnya juga terdapat rencana-rencana kerja dan kerangka anggaran yang bersifat proyektif dan indikatif selama lima tahun ke depan. Dengan demikian, semua dokumen perencanaan periode 2012-2017 di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe harus mengacu pada RPJM ini.

1.5.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan RPJMD Kota Lhokseumawe tahun 2012-2017 adalah :

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan Pembangunan daerah tahun 2012-2017;
2. Sebagai pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) didalam menyusun rencana kerja antara tahun 2012 sampai tahun 2017, termasuk di dalam menentukan program-program prioritas;
3. Sebagai pedoman di dalam penyusunan RKPK, KUA dan PPAS, serta RAPBK antara tahun 2012 sampai tahun 2017;
4. Sebagai tolok ukur di dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap SKPK di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe antara tahun 2012 sampai tahun 2017;

5. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh SKPK Lhokseumawe dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
6. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh SKPK Lhokseumawe dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan menuju masyarakat sejahtera dan berakhlak.

14

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA

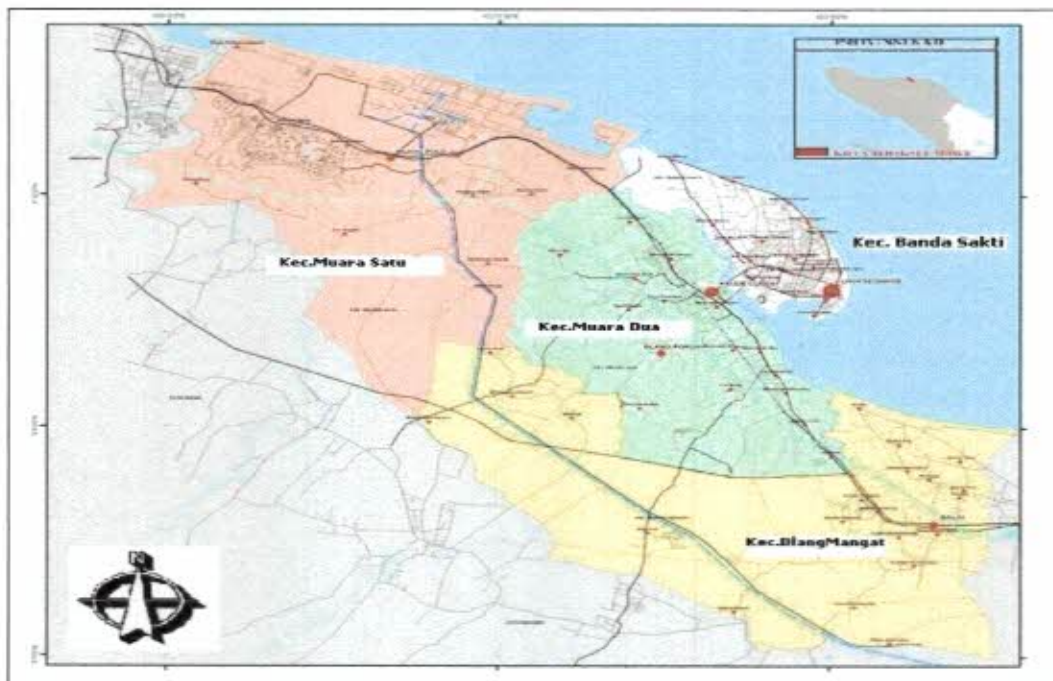
Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah Kota Lhokseumawe yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing dan pemerintahan umum.

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Gambar 2.1. Peta Kota Lhokseumawe



Sumber : Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2011-2031

Kota Lhokseumawe di ketinggian 2-24 meter diatas permukaan laut memiliki luas wilayah 181,06 Km² atau 18.106,00 Ha yang dibagi dalam 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Blang Mangat dengan luas wilayah 56,12 Km², Kecamatan Muara Dua luas wilayah 57,80 Km², Kecamatan Muara Satu luas wilayah 55,90 Km² dan Kecamatan Banda Sakti luas wilayah 11,24 Km². Keempat Kecamatan ini terdiri dari 9 Kemukiman dan 68 Desa/ Gampong. Adapun batas-batas daerah yaitu:

- Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka;

- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara (Kecamatan Kuta Makmur);
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara (Kecamatan Dewantara);
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara (Kecamatan Syamtalira Bayu).

Banyaknya Desa : 68 Gampong/ Desa

Banyaknya Kecamatan : 4 Kecamatan.

Luas Wilayah :

- Kecamatan Banda Sakti : 11,24 Km²
- Kecamatan Muara Dua : 57,80 Km²
- Kecamatan Blang Mangat : 56,12 Km²
- Kecamatan Muara Satu : 55,90 Km²

Kota Lhoksumawe merupakan salah satu Kota dari 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh yang berada pada jalur yang sangat strategis yang merupakan titik tengah antara Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh dengan Medan sebagai Ibukota Sumatera Utara, sehingga Kota ini merupakan jalur distribusi dan perdagangan yang sangat penting bagi Aceh. Secara Geografis Kota Lhokseumawe berada pada posisi 04° 54' – 05° 18' Lintang Utara dan 96° 20' – 97° 21' Bujur Timur.

Kecamatan Muara Dua merupakan salah satu Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas yaitu seluas 57,80 (km²) dari 4 Kecamatan dalam Kota Lhokseumawe yang terdiri dari 2 Kemukiman dan 17 Gampong, dimana kegiatan dalam Kecamatan Muara Dua ini bergerak dalam sektor perdagangan, sedangkan Kecamatan Banda Sakti merupakan Kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil diantara 4 Kecamatan yaitu seluas 11,24 (km²) yang terdiri dari 2 Kemukiman dan 18 Gampong, namun kegiatan perdagangan paling menonjol pada Kecamatan ini.

Kecamatan Blang Mangat memiliki luas wilayah yaitu seluas 56,12 (km²) yang terdiri dari 3 Kemukiman dan 22 Gampong, namun Kecamatan Blang Mangat menyimpan potensi pertanian dan sumber daya alam. Tak heran jika penduduknya paling banyak bekerja di lapangan usaha ini. Kecamatan ini juga menjadi wilayah yang memiliki luas tanaman padi terluas di Kota Lhokseumawe. Selain padi, produk

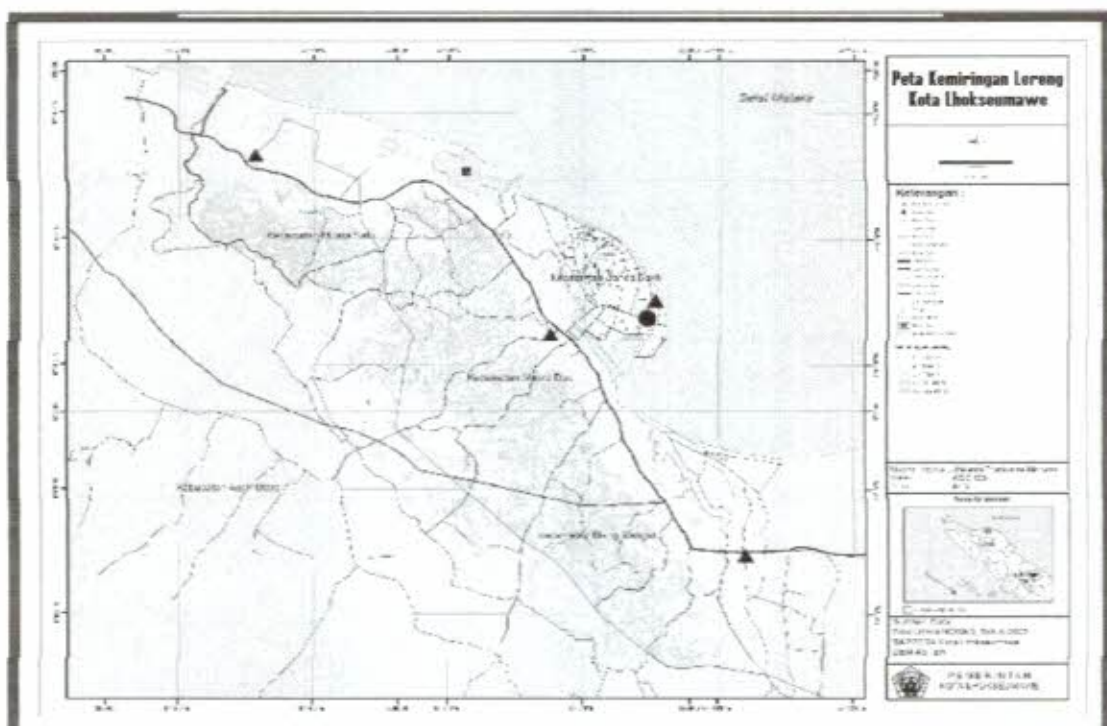
tanaman pangan lain yang banyak dihasilkan dari Kecamatan ini adalah kacang tanah, kacang hijau, dan ubi jalar. Sedangkan untuk Kecamatan Muara Satu terdiri dari 2 Kemukiman dan terdapat 11 Gampong, dimana kegiatan industri paling menonjol pada Kecamatan ini.

2.1.1.2. Topografi

Wilayah Kota Lhokseumawe yang berada di daerah pesisir dan daerah sebelah timur merupakan daerah dataran dengan kemiringan antara 0 – 8 %. Sedangkan pada daerah yang menjauhi pesisir merupakan daerah yang berbukit-bukit dengan kemiringan antara 8 – 15 %. Dengan kondisi kemiringan lahan seperti ini masih memungkinkan untuk pengembangan kegiatan perkotaan.

Kondisi ketinggian lahan menunjukkan bahwa Kota Lhokseumawe berada di antara ketinggian 0 – 100 m dpl. Daerah pesisir di sebelah utara dan daerah di sebelah timur berada pada ketinggian antara 0 – 5 m dpl. Sedangkan pada daerah di sebelah selatan memiliki kondisi yang relatif berbukit-bukit dengan ketinggian antara 5 – 100 m dpl.

Gambar 2.2
Peta Kemiringan Lereng
Kota Lhokseumawe

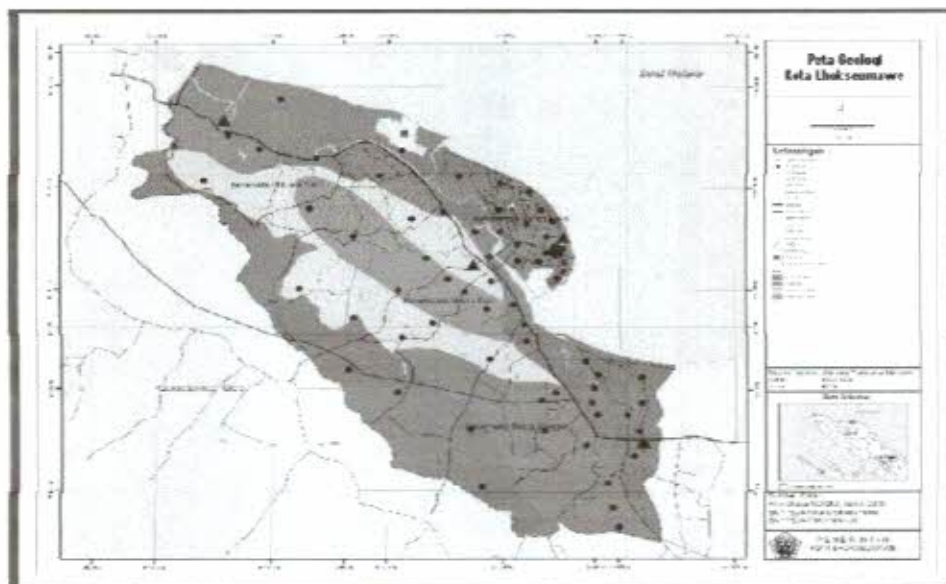


Sumber : Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2011-2031

2.1.1.3. Geologi

Gambaran mengenai kondisi geologi menunjukkan bahwa di Kota Lhokseumawe terbentuk oleh batuan Alluvium Muda, Formasi Idi, Formasi Julurayeu dan Formasi Seureula. Sebaran batuan Aluvium Muda berupa endapan pesisir dan fluviatill berada pada daerah di sebelah utara dan selatan Kota Lhokseumawe. Sebaran Formasi Idi berupa kerikil, pasir, gamping dan lempung berada pada daerah sebelah barat yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua dan sebelah timur yaitu sebagian Kecamatan Muara Dua dan Blang Mangat. Sebaran Formasi Julurayeu berupa endapan sungai batu pasir tufaan, lempung berlignit, dan batu lumpur berada pada daerah sebelah barat hingga tengah Kota Lhokseumawe yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua. Sedangkan sebaran Formasi Seureula berupa batu pasir gunung api, dan batu lumpur gampingan berada pada daerah tengah Kota Lhokseumawe yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua.

Gambar 2.3
Peta Geologi Kota Lhokseumawe



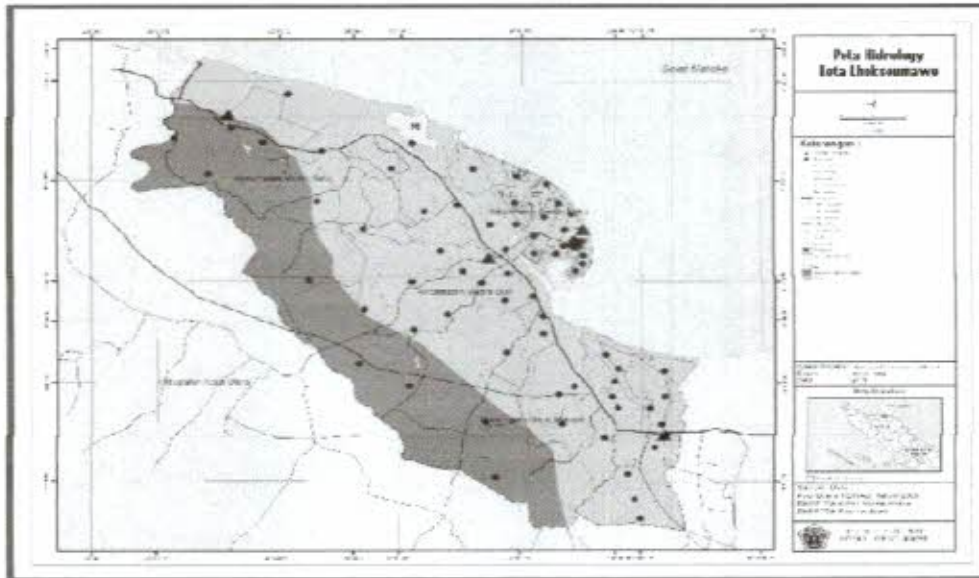
Sumber : Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2011-2031

2.1.1.4. Hidrologi

Kondisi air tanah dalam dicirikan dengan adanya akuifer cukup produktif meliputi sebagian besar wilayah Kota Lhokseumawe. Sedangkan akuifer tinggi berada pada daerah barat hingga selatan Kota Lhokseumawe.

Kondisi air permukaan dicirikan dengan keberadaan Sungai Cunda (Krueng Cunda) yang terletak di bagian Barat. Namun keadaan air sungai tersebut merupakan air payau sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh penduduk sebagai air bersih. Untuk keperluan air bersih, pada umumnya penduduk memanfaatkan air sumur dan air PDAM.

Gambar 2.4
Peta Hidrologi Kota Lhokseumawe



Sumber : Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2011-2031

2.1.1.5. Klimatologi

Rata-rata Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari setiap bulan pada tahun 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011 di Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Curah Hujan, Hari Hujan, dan Penyinaran Matahari
Kota Lhokseumawe

No	Uraian	Tahun 2007											
		Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Curah Hujan	140.8	56.4	35.6	42.5	99.2	64.1	187.2	94.7	53.8	206.3	138.9	285.6
2	Jumlah Hari Hujan	17	7	11	13	19	17	12	17	14	23	24	21
3	Penyinaran Matahari (%)	62.3	79.6	75.8	65.9	74.0	65.0	52.7	58.2	57.9	48.2	46.2	42.8

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2008

Tabel 2.2
Curah Hujan, Hari Hujan, dan Penyinaran Matahari
Kota Lhokseumawe

No	Uraian	Tahun 2008											
		Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Curah Hujan	40.0	5.0	122.7	61.0	18.7	3.1	150.4	113.8	16.0	73.6	402.1	222.1
2	Jumlah Hari Hujan	10	5	18	13	12	6	16	13	10	17	22	24
3	Penyinaran Matahari (%)	75	64	51	50	63	64	54	62	63	59	33	37

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2009

Tabel 2.3
Curah Hujan, Hari Hujan, dan Penyinaran Matahari
Kota Lhokseumawe

No	Uraian	Tahun 2009											
		Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Curah Hujan	175.9	6.7	88.5	95.7	146.0	86.7	41.9	196.2	50.8	74.6	428.1	110.7
2	Jumlah Hari Hujan	3	19	15	12	19	5	8	20	12	14	22	16
3	Penyinaran Matahari (%)	4.00	44.10	68.00	66.11	72.60	68.00	79.5	64.20	19.00	68.2	69.90	47.10

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2010

Tabel 2.4
Curah Hujan, Hari Hujan, dan Penyinaran Matahari
Kota Lhokseumawe

No	Uraian	Tahun 2010											
		Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Curah Hujan	188.6	50.0	108.9	14.6	80.9	20.4	65.4	103.2	12.4	83.6	294.5	229.9
2	Jumlah Hari Hujan	13	9	12	13	11	16	23	14	20	17	25	23
3	Penyinaran Matahari (%)	61	78	70	65	76	49	53	56	46	57	28	41

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2011

Tabel 2.5
Curah Hujan, Hari Hujan, dan Penyinaran Matahari
Kota Lhokseumawe

No	Uraian	Tahun 2011											
		Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Curah Hujan	82	27	252	20	102	51	85	176	71	245	237	283
2	Jumlah Hari Hujan	18	5	18	10	20	13	23	20	20	22	25	19
3	Penyinaran Matahari (%)	81	73	51	69	72	76	65	60	56	58	50	43

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2012

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Lhokseumawe untuk pemukiman 15,81%, perdagangan dan jasa 0,27% yang berpusat di Kecamatan Banda Sakti, kegiatan industri 5,10% yang terpusat di Kecamatan Muara Satu. Penggunaan lahan lainnya untuk budi daya perikanan darat (tambak) 8,81%, sedangkan daerah pedalamannya di dominasi oleh alang-alang dan belukar, ladang, sawah serta perkebunan kelapa sawit yang terletak di Kecamatan Blang Mangat. Lebih jelas mengenai kondisi penggunaan lahan saat ini di Kota Lhokseumawe dapat dilihat di tabel dibawah ini.

Tabel 2.6
Penggunaan Lahan Kota Lhokseumawe Tahun 2011

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Pemukiman	2.861,79	15,81
2	Perdagangan dan Jasa	49,36	0,27
3	Industri Besar	923,76	5,10
4	Sawah	987,13	5,45
5	Tambak	1.595,30	8,81
6	PPI	2,77	0,02
7	Mangrove	12,86	0,07
8	Sungai	80,48	0,44
9	Pendidikan	0,60	0,003
10	Perkantoran	14,35	0,08
11	Kebun	11.452,10	63,25
12	Waduk	57,75	0,32
13	Danau	16,60	0,09
14	Lapangan Golf	51,14	0,28
	Jumlah	18.106,00	100,00

Sumber : Foto Udara Tahun 2007 dan Survey Lapangan Tahun 2011

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Arahan pengembangan Kawasan Kota Lhokseumawe didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan Lingkungan. Rencana Tata Ruang Kota Lhokseumawe Tahun 2011-2031 yang sedang dalam proses Qanun telah memberikan arahan pengembangan wilayah Kota Lhokseumawe, arahan pengembangan itu terbagi menjadi 3 (tiga) zona pengembangan diantaranya :

1. Zona pesisir, merupakan daerah pinggiran pantai dan memiliki kondisi wilayah relatif datar, zona pesisir mencakup:
 - 1) Zona Pesisir di Kecamatan Muara Satu dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi sektor industri besar, industri menengah dan pariwisata;
 - 2) Zona Pesisir di Kecamatan Banda sakti dengan kegiatan utamanya untuk pelayanan kota seperti: pendidikan, pemerintahan, kesehatan, permukiman dan pariwisata, perdagangan dan Jasa;
 - 3) Zona pesisir di Kecamatan Blang Mangat dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi sektor perikanan laut, dan sektor perikanan darat.
2. Zona Tengah merupakan daerah sekitat Jalan Banda Aceh – Medan, memiliki kondisi wilayah relatif datar dan berbukit, wilayah ini mencakup Kecamatan Muara Satu, Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Blang Mangat dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi perdagangan dan permukiman.
3. Zona Dalam merupakan daerah dataran tinggi disekitar Jalan Elak memiliki kondisi wilayah berbukit, dengan kegiatan utama pada kawasan ini diperuntukkan bagi kegiatan pertanian (lahan basah dan lahan kering), peternakan, pariwisata dan sebagian permukiman.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

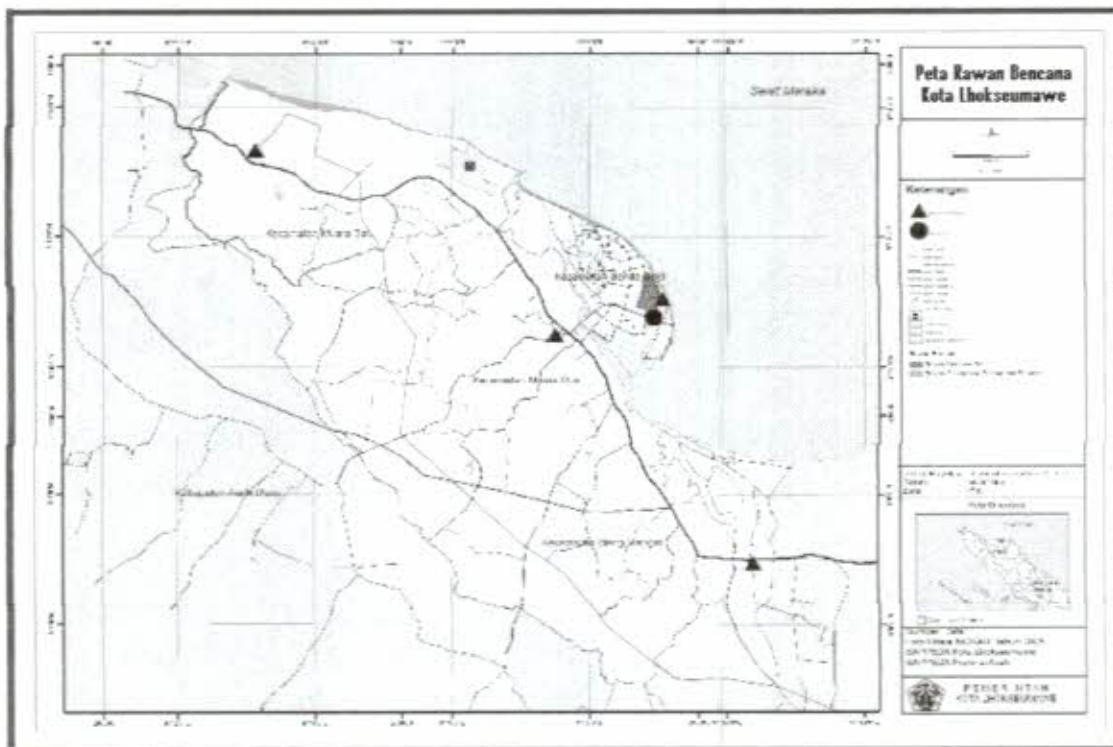
Kawasan rawan bencana di Kota Lhokseumawe meliputi kawasan rawan bencana gempa bumi, kawasan rawan bencana tsunami, kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan abrasi dan gelombang pasang. Kawasan rawan bencana ini berada pada kawasan lindung dan sebagian kawasan budidaya, sehingga diperlukan pengelolaan intensif terutama yang berada pada kawasan budidaya. Dengan adanya resiko

kerawanan terhadap bencana pada kawasan budidaya ini tidak berarti bahwa pada kawasan tersebut tidak dapat dibangun, akan tetapi pemanfaatannya harus disertai dengan upaya untuk mengantisipasi/mengurangi kemungkinan terjadinya dampak bencana alam (mitigasi).

Kawasan rawan bencana gempa bumi tersebar di seluruh wilayah di Kota Lhokseumawe. Pemanfaatan kawasan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana ini harus memperhatikan tingkat kekuatan gempa, terutama terhadap ketangguhan struktur bangunan. Sebagai acuan dalam ketangguhan struktur bangunan adalah dengan memperhatikan tingkat kekuatan gempa yang terjadi pada tahun 2004.

Selain itu kawasan yang rawan akan bencana abrasi, gelombang pasang, adalah Pantai Ujong Blang, Rancung, Meuraksa. Sedangkan kawasan yang rawan akan bencana banjir terdapat di Kecamatan Banda Sakti, meliputi Gampong Jawa, Gampong Jawa Lama, Lancang Garam, dan Tumpok Teungoh. Pemanfaatan kawasan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana ini juga harus memperhatikan potensi abrasi dan gelombang pasang, serta potensi dan besaran banjir yang terjadi.

Gambar 2.5
Peta Rawan Bencana Kota Lhokseumawe



Sumber : Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2011-2031

RP

2.1.4. Demografi

Tahun 2011 jumlah penduduk Kota Lhokseumawe adalah 175.082 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terdiri dari 87.392 jiwa laki-laki dan 87.690 jiwa perempuan. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Banda Sakti berjumlah 75.226 jiwa atau 42,97 % dari jumlah penduduk Kota Lhokseumawe, sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Blang Mangat berjumlah 22.186 jiwa atau 12,67 % dari jumlah penduduk di Kota Lhokseumawe.

Konsentrasi jumlah penduduk di Kecamatan Banda Sakti ini dikarenakan Kecamatan ini merupakan pusat Kota Lhokseumawe dengan berbagai kegiatan utama yaitu pemerintahan, perdagangan, pendidikan dan kesehatan.

Kepadatan penduduk Kota Lhokseumawe tersebar tidak merata. Kepadatan penduduk terbesar berada di Kecamatan Banda Sakti dengan jumlah 6.693 jiwa/km², sedangkan kepadatan penduduk terkecil berada di Kecamatan Blang Mangat dengan jumlah 395 jiwa/km². Kondisi ini dikarenakan wilayah di Kecamatan ini dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan masih banyak lahan yang belum dimanfaatkan untuk permukiman. Lebih jelas mengenai jumlah dan kepadatan penduduk Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada **Tabel 2.7** berikut ini,

Tabel 2.7
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Lhokseumawe
Tahun 2012

No.	Nama Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk				Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	
			(Jiwa)			Total		(%)
			Laki-laki	Perempuan	Total			
1.	Blang Mangat	56,12	11.084	11.102	22.186	12,67	395	
2.	Muara Dua	57,80	22.431	22.790	45.221	25,83	782	
3.	Muara Satu	55,90	16.177	16.272	32.449	18,53	580	
4.	Banda Sakti	11,24	37.700	37.526	75.226	42,97	6.693	
Jumlah		181,06	87.392	87.690	175.082	100,00		

Sumber: Lhokseumawe Dalam Angka Thn 2012, BPS.

Pertumbuhan penduduk Kota Lhokseumawe dari tahun 2006 hingga tahun 2011 mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan rata-rata penduduk Kota Lhokseumawe tersebut adalah sebesar 2,2896%. Demikian pula pada beberapa wilayah Kecamatan secara umum

mengalami peningkatan setiap tahun begitu juga angka rata-rata laju pertumbuhan penduduk pada tiap Kecamatan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Rata-rata laju pertumbuhan disetiap Kecamatan dengan jumlah persentase sebesar 2%. Lebih jelas mengenai laju pertumbuhan penduduk Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada **Tabel 2.8** berikut ini,

Tabel 2.8
Pertumbuhan Penduduk Kota Lhokseumawe
Tahun 2007-2011

No.	Nama Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)						Rata-rata Laju Pertumbuhan (%)
		Tahun						
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
1.	Kec. Blang Mangat	18.387	18.552	18.744	18.869	21.689	22.186	2,2915
2.	Kec. Muara Dua	35.990	36.505	36.881	37.132	44.209	45.221	2,2891
3.	Kec. Muara Satu	30.494	30.930	31.249	31.489	31.723	32.449	2,2886
4.	Kec. Banda Sakti	67.763	70.569	71.295	71.749	73.542	75.226	2,2898
5.	Kota Lhokseumawe	154.634	158.169	158.760	159.239	171.163	175.082	2,2896

Sumber: Lhokseumawe Dalam Angka Thn 2007-2012, BPS dan Analisis.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

2.2.1.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Lhokseumawe atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha dengan Migas pada tahun 2007 sebesar Rp. 4.920.902,06 turun sebesar 0.06 persen menjadi Rp. 4.641.103,52 pada tahun 2008. Sedangkan tahun 2009 turun sebesar 0.06 persen menjadi Rp. 4.335.995,27 sedangkan pada tahun 2010 turun sebesar 0.06 persen menjadi Rp. 4.056.203,97, kemudian pada tahun 2011 terjadi kenaikan sebesar 0.02 persen menjadi sebesar Rp. 4.145.150,31.

Selanjutnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa migas atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha pada tahun 2007 sebesar Rp. 1.851.531,57 naik sebesar 0.06 persen menjadi Rp. 1.969.623,94 pada tahun 2008, sedangkan tahun 2009 naik sebesar 0.05 persen menjadi Rp. 2.081.024,00 sedangkan pada tahun 2010 naik sebesar 0.05 persen menjadi Rp. 2.204.381,53, kemudian pada tahun

2011 terjadi kenaikan juga sebesar 0.05 persen menjadi sebesar Rp. 2.322.161,45. Nilai PDRB Kota Lhokseumawe dengan Migas dan tanpa Migas berdasarkan lapangan usaha atas dasar harga konstan sejak tahun 2007-2011 adalah sebagai berikut **Tabel 2.9** berikut ini,

Tabel 2.9
Produk Domestik Regional Bruto Kota Lhokseumawe Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha dengan Migas & tanpa Migas (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2007	2008	2009	2010	2011
1. Pertanian	264.487,48	267.743,28	271.864,58	277.898,30	288.030,90
2. Pertambangan & Penggalian	7.982,32	8.206,40	8.476,08	8.922,10	9.322,03
3. a. Industri Pengolahan (dengan Migas)	3.069.371,07	2.671.479,58	2.254.971,28	1.851.822,45	1.822.988,86
3. b. Industri Pengolahan (tanpa Migas)	74.678,26	77.702,64	79.531,24	81.351,24	84.910,88
4. Listrik & Air Bersih	2.643,19	2.831,68	3.136,30	3.520,92	4.017,16
5. Bangunan	147.456,66	157.245,76	163.985,06	171.219,57	177.918,99
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	909.685,17	995.309,06	1.074.380,73	1.161.067,40	1.236.980,74
7. Pengangkutan & Komunikasi	188.713,47	196.178,12	205.159,47	215.461,71	225.360,21
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	43.156,80	45.500,14	48.005,62	52.205,62	55.838,23
9. Jasa-jasa	212.728,22	219.212,96	226.897,43	233.352,96	239.782,30
PDRB dengan Migas	4.920.902,64	4.641.409,60	4.336.407,78	4.056.822,27	4.145.150,31
PDRB tanpa Migas	1.851.531,57	1.969.930,02	2.081.436,51	2.204.999,82	2.322.161,45

Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2007-2011

Bila dilihat berdasarkan harga berlaku, PDRB Kota Lhokseumawe dengan Migas setiap tahunnya meningkat, tahun 2007 sebesar Rp.9.601.602,75 juta tahun 2008 naik menjadi sebesar Rp.10.259.266,69 juta, tahun 2009 meningkat menjadi sebesar Rp.10.303.075,09 juta dan tahun 2010 menjadi sebesar Rp.10.630.814,11 juta.

PDRB Kota Lhokseumawe tanpa Migas berdasarkan harga berlaku setiap tahunnya juga mengalami peningkatan yang cukup baik yaitu tahun 2007 sebesar Rp.3.249.040,70 juta tahun 2008 naik menjadi sebesar Rp.4.014.456,93 juta, tahun 2009 meningkat menjadi sebesar Rp.4.672.076,33 juta dan tahun 2010 menjadi sebesar Rp.5.473.504,36 juta serta meningkat menjadi Rp. 5.993.706,23 pada tahun 2011.

Nilai PDRB Kota Lhokseumawe dengan Migas dan tanpa Migas berdasarkan lapangan usaha atas dasar harga berlaku sejak tahun 2007-2011, dapat dilihat **Tabel 2.10** berikut ini,

Tabel 2.10
Produk Domestik Regional Bruto Kota Lhokseumawe
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha dengan Migas &
tanpa Migas (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2007	2008	2009	2010	2011
1. Pertanian	434.249,87	454.293,99	475.318,01	503.505,32	540.635,53
2. Pertambangan & Penggalian	14.115,21	14.891,68	16.081,56	18.173,88	19.285,38
3. a. Industri Pengolahan (dengan Migas)	6.352.562,05	6.244.809,76	5.630.998,76	5.157.309,75	4.920.146,01
3. b. Industri Pengolahan (tanpa Migas)	111.660,95	115.803,02	121.861,55	149.856,48	165.068,81
4. Listrik & Air Bersih	4.698,58	5.787,44	6.971,05	9.211,20	11.416,26
5. Bangunan	374.760,38	521.195,62	677.952,81	824.268,48	893.598,03
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	1.612.176,98	2.082.658,63	2.415.752,93	2.846.123,44	3.152.553,15
7. Pengangkutan & Komunikasi	360.977,94	438.442,91	524.555,82	647.791,05	701.753,12
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	77.643,95	100.775,07	130.069,58	157.638,21	175.427,47
9. Jasa-jasa	258.756,85	280.608,58	303.513,02	316.936,31	333.968,50
PDRB dengan Migas	9.601.602,75	10.259.266,69	10.303.075,09	10.592.824,11	10.913.852,24
PDRB tanpa Migas	3.249.040,70	4.014.456,93	4.672.076,33	5.435.514,36	5.993.706,23

Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2007-2011

Pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe atas dasar harga konstan tanpa migas pada tahun 2010 naik sebesar 5,93 persen terhadap tahun 2009. Pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor listrik dan air bersih sebesar 12,26 persen diikuti sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan sebesar 8,75 persen, perdagangan, hotel & restoran sebesar 8,07 persen, pertambangan dan penggalian sebesar 5,26 persen, pengangkutan dan komunikasi sebesar 5,02 persen, bangunan 4,41 persen, jasa-jasa 2,85 persen, industri pengolahan sebesar 2,29 persen dan terendah terjadi di sektor pertanian 2,22 persen, dapat dilihat **Tabel 2.11** berikut ini,

Tabel 2.11
Nilai & Laju Pertumbuhan PDRB Kota Lhokseumawe
dengan Migas & tanpa Migas Tahun 2009 - 2011
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan
(Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)			Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)			Laju Pertumbuhan (Persen)		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
1. Pertanian	475.318,01	503.505,32	540.635,53	271.864,58	277.898,30	288.030,90	5,93	2,22	3,65
2. Pertambangan & Penggalian	16.081,56	18.173,88	19.285,38	8.476,08	8.922,10	9.322,03	13,01	5,26	4,48
3. a. Industri Pengolahan (dengan Migas)	5.630.998,76	5.157.309,75	4.920.146,01	2.254.971,28	1.851.822,45	1.822.988,86	-8,41	17,88	-1,56
3. b. Industri Pengolahan (tanpa Migas)	121.861,55	149.856,48	165.068,81	79.531,24	81.351,24	84.910,88	22,97	2,29	4,38
4. Listrik & Air Bersih	6.971,05	9.211,20	11.416,26	3.136,30	3.520,92	4.017,16	32,14	12,26	14,09
5. Bangunan	677.952,81	824.268,48	893.598,03	163.985,06	171.219,57	177.918,99	21,58	4,41	3,91
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	2.415.752,90	2.846.123,44	3.152.553,15	1.074.380,73	1.161.067,40	1.236.980,74	17,82	8,07	6,54
7. Pengangkutan & Komunikasi	524.555,82	647.791,05	701.753,12	205.159,47	215.461,71	225.360,21	23,49	5,02	4,59
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	130.069,58	157.638,21	175.427,47	48.005,62	52.205,62	55.838,23	21,20	8,75	6,96
9. Jasa-jasa	303.513,02	316.936,31	333.968,50	226.897,43	233.352,96	239.782,30	4,42	2,85	2,76
PDRB dengan Migas	10.303.075,09	10.630.814,11	10.913.852,24	4.335.995,27	4.056.203,97	4.145.150,31	3,18	-6,45	2,18
PDRB tanpa Migas	4.672.076,33	5.473.504,36	5.993.706,23	2.081.024,00	2.204.381,53	2.322.161,45	17,15	5,94	5,31

Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2007-2012

Pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe dapat juga diukur dari laju inflasi dan pendapatan per kapita, dengan semakin tingginya pendapatan per kapita suatu daerah akan meningkatkan pengeluaran konsumsi daerah tersebut yang erat kaitannya dengan tingkat inflasi.

2.2.1.1.2. Laju inflasi Kota Lhokseumawe

Inflasi merupakan perubahan tingkat harga (barang jasa) umum yang terjadi secara terus menerus. Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan menggalakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Inflasi berdampak secara umum pada kegiatan ekonomi negara yang lebih lanjut berdampak pada pengangguran. Selain itu juga menimbulkan efek-efek kepada individu masyarakat diantaranya adalah menurunkan pendapatan riil masyarakat berpendapatan tetap, mengurangi nilai

kekayaan yang berbentuk uang dan memperburuk pembagian kekayaan. Secara umum laju inflasi dapat ditekan pada kisaran dibawah 10%.

Berdasarkan data BPS Kota Lhokseumawe bahwa laju inflasi Kota Lhokseumawe pada tahun 2010 mencapai 7,19 persen (inflasi nasional sebesar 6,96 persen). Bila dibandingkan dengan tahun 2009 terjadi kenaikan sebesar 3,69 persen namun jauh menurun dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 10,27 persen.

Angka laju inflasi Kota Lhokseumawe bila dibandingkan dengan angka laju inflasi provinsi Aceh di tahun 2011 tidak jauh berbeda hanya selisih 0,12%, sedangkan 0,24% jika dibandingkan dengan laju inflasi Nasional. Berikut adalah tabel perkembangan inflasi Kota Lhokseumawe Tahun 2008 s.d 2011 dengan perbandingan laju inflasi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional.

Tabel 2.12
Perkembangan Inflasi Kota Lhokseumawe dibandingkan dengan
Kota Banda Aceh dan Nasional
Tahun 2008 - 2011

Tahun	Angka Inflasi Kota Lhokseumawe	Angka Inflasi Kota Banda Aceh	Angka Inflasi Provinsi Aceh	Angka Inflasi Nasional
2008	10,27	13,78	11,92	11,06
2009	3,50	3,96	3,72	2,78
2010	7,19	4,64	5,86	6,96
2011	3,55	3,32	3,43	3,79

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2011

2.2.1.1.3.PDRB per kapita

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita dapat digunakan sebagai gambaran rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. PDRB Perkapita diperoleh dari hasil pembagian antara PDRB dengan jumlah penduduk. PDRB Perkapita Kota Lhokseumawe pada tahun 2010 dengan minyak dan gas sebesar Rp.27.581.787,16 atau sebesar Rp.2.298.482,26 perbulan, mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp.28.012.747,63 atau sebesar Rp.2.334.395,64 perbulan. Sedangkan pendapatan perkapita masyarakat tanpa minyak dan gas tahun 2010 sebesar Rp.13.077.497,18 atau sebesar Rp.1.089.791,49 perbulan, mengalami kenaikan dibanding tahun 2009 sebesar Rp.13.067.143,48 atau sebesar Rp.1.088.928,62 perbulan. Kenaikan pendapatan perkapita masyarakat tanpa minyak dan gas pada satu sisi memperlihatkan kemampuan daya beli masyarakat rata-rata selama tahun bersangkutan.

Akan tetapi dikaitkan dengan tingkat inflasi yang masih relatif tinggi, maka pendapatan perkapita masyarakat belum dapat dijadikan indikator kesejahteraan masyarakat yang mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat. Peningkatan nilai pendapatan perkapita masyarakat sebesar 0,50 persen pada kenyataannya tidak sebanding dengan tingkat inflasi yang mencapai 7,19 persen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terjadi penurunan daya beli masyarakat di Kota Lhokseumawe, sehubungan kenaikan harga berbagai barang kebutuhan pokok. Untuk melihat perbandingan antara LPE dan tingkat inflasi, dapat dilihat **Tabel 2.13** berikut ini,

Tabel 2.13
Perbandingan Kenaikan Pendapatan Perkapita Terhadap Inflasi
Tahun 2008 – 2011

Tahun	Pendapatan Perkapita (Rp)	Kenaikan LPE (%)	Inflasi (%)
2008	Dengan Migas : 30.473.260,33	(5,68)	10,27
	Tanpa Migas : 12.387.955,09	6,39	
2009	Dengan Migas : 28.012.747,63	(6,57)	3,50
	Tanpa Migas : 13.067.143,48	5,66	
2010*	Dengan Migas: 27.581.787,16	(6,45)	7,19
	Tanpa Migas: 13.077.497,18	5,94	
2011**	Dengan Migas : 23.686.571,43	2,18	3,55
	Tanpa Migas : 13.269.491,43	5,31	

Sumber : PDRB - BPS 2011(diolah)

2.2.1.1.4. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe selama periode 2005-2007 menunjukkan penurunan dari 15,9 persen pada tahun 2005 menjadi 12,75 persen pada tahun 2007, tingkat kemiskinan tersebut berkurang sebesar 3,15 persen. Namun pada tahun 2008 terjadi kenaikan secara signifikan yaitu mencapai 3,12 persen, sehingga naik menjadi 15,87 persen dibandingkan dengan persentase tahun 2007. Selanjutnya pada tahun 2009 kembali turun menjadi 15,08 persen dan pada tahun 2010 kembali turun sebesar 14,07 persen.

Selanjutnya persentase kemiskinan Kota Lhokseumawe jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh lebih baik, bila dilihat dari angka kumulatif yaitu 26,65 persen (tahun 2007), 23,53 persen (tahun 2008), 21,80 persen (tahun 2009) dan 20,98 persen (tahun 2010). Namun jika dibandingkan dengan rata-rata jumlah penduduk miskin secara nasional, tingkat kemiskinan Kota Lhokseumawe masih tergolong tinggi. Persentase jumlah penduduk miskin nasional yaitu mencapai 16,60

persen (tahun 2007); 15,40 persen (tahun 2008); 14,20 persen (tahun 2009); 13,72 persen (tahun 2010).

Sementara jumlah persentase penduduk miskin, Kota Lhokseumawe merupakan peringkat ke-2 dari 23 Kabupaten/ Kota yang tingkat persentase kemiskinannya terendah setelah Kota Banda Aceh, persentase kemiskinan Kota Banda Aceh tahun 2010 sebesar 9,19 persen, sedangkan persentase tertinggi tingkat kemiskinan berada di Kabupaten Bener Meuriah yaitu sebesar 26,23 pada tahun 2010.

Jika ditinjau dari jumlah jiwa jumlah penduduk miskin di Kota Lhokseumawe adalah sebanyak 24.000 jiwa pada tahun 2010, atau sekitar 14.07 persen dari jumlah penduduk. Dibandingkan dengan kondisi tahun 2009, jumlah penduduk miskin di Kota Lhokseumawe bertambah sebanyak 22.530 jiwa, tetapi secara persentase mengalami penurunan sebesar 1,01 persen.

Gambaran di atas diduga sebagai dampak dari meningkatnya partisipasi masyarakat dan adanya upaya Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk menurunkan persentase penduduk miskin. Berbagai upaya Pemerintah Kota Lhokseumawe diantaranya dengan memberikan bantuan modal usaha baik di sektor jasa, perdagangan, dan perindustrian. Disamping itu program-program pembangunan yang dialokasikan pada 2 (dua) tahun terakhir diduga ikut memberi pengaruh besar dalam hal peningkatan perekonomian masyarakat Kota Lhokseumawe sehingga persentase penduduk di atas garis kemiskinan menurun, untuk lebih jelas dapat dilihat **Tabel 2.14** berikut ini,

Tabel 2.14
Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin
Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh dan Nasional
Tahun 2006 s/d 2010

No	Uraian	Jumlah (0000)						Persentase (%)					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Kota Lhokseumawe	25.6	22.20	19.40	23.94	22.53	24.00	15.9	14.25	12.75	15.07	15.08	14.07
2	Provinsi Aceh	1166.38	1149.70	1083.70	959.70	892.86	861.85	28.69	28.28	25.65	23.53	21.80	20.98
3	Nasional	36802.10	39295.30	37168.30	34963.30	32530.00	31023.40	16.69	17.75	16.58	15.42	14.15	13.33

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2006-2010 (diolah)
*Data Kemiskinan PerKecamatan tidak tersedia

2.2.1.1.5. Angka kriminalitas yang tertangani

Jumlah angka kriminalitas yang tertangani pada tahun 2007 sebesar 18,78 persen dengan jumlah kasus 298 per 10.000 penduduk.

Pada setiap tahunnya angka kriminalitas yang tertangani meningkat namun karena jumlah kasus setiap tahunnya meningkat maka persentase penanganan kasus setiap tahunnya menjadi meningkat pula. tahun 2008 kasus kriminalitas yang tertangani 34.20 persen dengan jumlah kasus 543, tahun 2009 kasus kriminalitas yang tertangani 34.79 persen dengan jumlah kasus 554 dan tahun 2010 kasus kriminalitas yang tertangani 35.35 persen dengan jumlah kasus 605 sedangkan pada tahun 2011 jumlah kasus kriminalitas sangat tinggi sekali mencapai angka 890 kasus sehingga yang tertangani sebesar 50.83 persen, untuk lebih jelas dapat dilihat **Tabel 2.15** berikut ini,

Tabel 2.15
Angka Kriminalitas yang Tertangani
Di Kota Lhokseumawe Tahun 2007 – 2011

No	Uraian	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kasus	297	543	554	605	890
2	Jumlah Penduduk	158,169	158,760	159,239	171,163	175,082
Persentase		18.78	34.20	34.79	35.35	50.83

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2012 (diolah)

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Pendidikan

Pengertian pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai proses pembelajaran bagi individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai obyek-obyek tertentu dan spesifik. Pengetahuan tersebut diperoleh secara formal yang berakibat individu mempunyai pola pikir dan perilaku sesuai dengan pendidikan yang telah diperolehnya.

Pembangunan pendidikan Kota Lhokseumawe sebagai salah satu faktor untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, adalah sesuatu yang mutlak untuk ditingkatkan mutunya. Untuk itu berbagai aspek pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat, peningkatan mutu dan relevansi, serta peningkatan efisiensi dan peningkatan pengelolaan pendidikan, pada berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan perlu direncanakan secara matang sehingga pembangunan pendidikan ke masa depan dapat memenuhi amanat UUD 1945 pada umumnya dan mendukung pembangunan daerah Kota Lhokseumawe sebagai daerah otonom.

2.2.2.1.1. Angka melek huruf

Salah satu indikator terlaksananya dengan baik pendidikan untuk masyarakat dapat diketahui dengan meningkatnya angka melek huruf atau kemampuan baca tulis dalam masyarakat tersebut. Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari.

Dilihat dari pendidikan masyarakat Kota Lhokseumawe sudah cukup baik, hal ini terlihat dari angka melek huruf di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu tahun 2006-2010 terus mengalami peningkatan. Dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Aceh tahun 2010 sebesar 96,88 persen, capaian angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kota Lhokseumawe sudah lebih baik, untuk lebih jelas dapat dilihat **Tabel 2.16** berikut ini,

Tabel 2.16
Perbandingan Angka Melek Huruf Kota Lhokseumawe
dan Provinsi Aceh Tahun 2006 s.d 2010

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Kota Lhokseumawe	98,82	98,06	98,42	99,63	99,62
2	Provinsi Aceh	94,27	94,51	95,94	96,39	96,88

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Tahun 2010

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa angka melek huruf di Kota Lhokseumawe tertinggi pada tahun 2010 yaitu sebesar 99,62 persen. Sedangkan angka terendah terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 98,06 persen. Sedangkan pada tahun 2008 s.d tahun 2010 angka melek huruf terus mengalami peningkatan.

2.2.2.1.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Secara umum angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk dewasa (15 tahun ke atas). Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah penduduk, berarti semakin baik tingkat pendidikan tersebut. Angka rata-rata lama sekolah di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu tahun 2006-2010 terus mengalami peningkatan. Dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 7,92 dan Provinsi Aceh 8,81, maka capaian angka rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kota Lhokseumawe sudah lebih baik, untuk lebih jelas dapat dilihat **Tabel 2.17** berikut ini,

Tabel 2.17
Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Kota Lhokseumawe dengan Provinsi Aceh Tahun 2006 s.d 2010

No	Uraian	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Kota Lhokseumawe	9,70	9,70	9,70	9,91	9,99
2	Provinsi Aceh	8.50	8.50	8.50	8.63	8.81

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe Tahun 2011

Pada tahun 2010 rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas di Kota Lhokseumawe mencapai 9,99 tahun, mayoritas penduduk dewasa di Kota ini pernah mengenyam pendidikan formal antara 9 sampai 10 tahun. Bila dibandingkan dengan Provinsi Aceh pada tahun 2010 angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Aceh mencapai 8,81. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Lhokseumawe umur 15 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan sampai kelas 3 SMP. Program wajib belajar Sembilan Tahun yang dicanangkan oleh Pemerintah dapat dikatakan telah terwujud.

2.2.2.1.3. Angka Partisipasi Kasar

Partisipasi sekolah dapat dilihat Angka Partisipasi Kasar (APK), APK menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai jenjang pendidikan tersebut, untuk lebih jelas dapat dilihat **Tabel 2.18** berikut ini,

Tabel 2.18
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2006 s.d 2011
Kota Lhokseumawe

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	SD/MI						
1.1	Jlh siswa usia 7-12 thn	22,228	22,299	22,104	22,429	22,634	22,492
1.2	Jlh penduduk kelompok usia 7-12 thn	20,545	20,580	20,780	20,408	21,941	21,941
1.3	APK SD/MI	108.1	108.3	106.3	109.9	103.1	102.5
		9	5	7	6	1	
2	SMP/MTs						
2.1	Jlh siswa 13-15 thn	11,342	11,478	11,555	11,719	11,660	11,684
2.2	Jlh penduduk kelompok usia 13-15 thn	10,423	10,434	10,672	10,272	10,820	10,820
2.3	APK SMP/MTs	108.8	110.0	108.2	114.0	107.7	107.9
		2	1	7	9	6	9
3	SMA/MA/SMK						
3.1	Jlh siswa 16-18 thn	10,050	10,090	10,413	10,779	10,751	11
3.2	Jlh penduduk kelompok usia 16-18 thn	10,537	10,639	10,951	10,264	10,385	10,385
3.3	APK SMA/MA/SMK	95.38	94.84	95.09	105.0	103.5	109.0
					2	2	6

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa angka partisipasi kasar pada tingkat SD/ MI/ Paket A tertinggi pada tahun 2009 sebesar 109,9. Sedangkan terendah pada tahun 2011 sebesar 102,51 artinya dari table diatas seluruh penduduk kelompok usia sekolah dasar telah memperoleh pendidikan sekolah dasar. Begitu juga terjadi pada tingkat SMP/ Mts seluruh penduduk Kota Lhokseumawe usia Sekolah menengah pertama telah memperoleh pendidikan, itu terlihat pada tahun 2009 Angka partisipasi kasar sebesar 114,09 dan terendah pada tahun 2011 sebesar 107,99. Untuk Tingkat Sekolah Menengah Atas, Angka Partisipasi Kasar SMA/ SMK/ MA/ Paket C tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 109,06 dan terendah sebesar 94,84 yang terjadi pada tahun 2008, Sejak tahun 2009 sampai dengan 2011 APK SMA/ SMK/ MA/ Paket C telah mencapai nilai diatas 100.

2.2.2.1.4. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Menurut BPS Kota Lhokseumawe tahun 2010 penduduk Kota Lhokseumawe yang berumur 10 tahun ke atas pada tahun 2010 yang berijazah (pendidikan tertinggi yang ditamatkan) SMA sederajat sebesar 34,46 persen; berijazah SMP sederajat sebanyak 21,32 persen; SD sederajat sebanyak 20,13 persen; dan Perguruan Tinggi sebanyak 10,69 persen. Sementara itu persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang belum/ tidak tamat SD adalah 13,40 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun 2012 maka terjadi penurunan pada tingkat SMA, SMP sederajat dan Perguruan Tinggi, yaitu pada tingkat SMA sederajat menjadi 34,00 persen, pada tingkat SMP sederajat menjadi 20,54 dan untuk Perguruan Tinggi menjadi 9,48 persen. Sedangkan untuk SD sederajat dan yang belum/ tidak tamat SD ada kenaikan, yaitu SD sederajat menjadi 22,24 persen dan yang belum/ tidak tamat SD menjadi 13,74 persen.

Berdasarkan fakta bahwa sebagian besar penduduk Kota Lhokseumawe berpendidikan SMA sederajat, maka pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan di Kota Lhokseumawe dapat dikatakan telah berlangsung dengan baik karena sebagian besar penduduk telah melampaui Program Wajib Belajar Sembilan Tahun. Hal ini berkaitan dengan daya saing dengan sumber daya manusia daerah lain dalam menghadapi era kompetisi global di masa mendatang. Dengan kualifikasi penduduk di bidang pendidikan yang cukup, diharapkan Kota

Lhokseumawe mampu menghadapi persaingan tersebut. Penduduk yang berpendidikan akan menambah peluang partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, untuk lebih jelas dapat dilihat **Tabel 2.19** berikut ini,

Tabel 2.19
Persentase Penduduk menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kota Lhokseumawe Tahun 2010 - 2012

Tingkat Pendidikan	Tahun		
	2010	2011	2012
Tidak/belum tamat SD	13,40	14,56	13,74
SD Sederajat	20,13	22,03	22,24
SLTP Sederajat	21,32	20,36	20,54
SLTA Sederajat	34,46	33,66	34,00
Diploma IV/SI (perguruan tinggi)	10,69	9,39	9,48

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka 2012 diolah

2.2.2.1.5. Angka Partisipasi Murni

Partisipasi sekolah dapat dilihat Angka Partisipasi Murni (APM), APM menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Dengan demikian terdapat hubungan bahwa APM selalu lebih kecil atau sama dengan APK, bila APM kurang dari APK berarti terdapat murid SD diluar usia 7 - 12 tahun, bisa di bawah umur (*underage*) atau di atas umur (*overage*). Dari table APK yang telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa APK selalu lebih besar dari APM, berarti masih ada penduduk yang sekolah di luar usia sekolah yang bersesuaian, untuk lebih jelas dapat dilihat **Tabel 2.20** berikut ini,

RF

Tabel 2.20
Angka Partisipasi Murni (APM)
Kota Lhokseumawe Tahun 2006 s.d 2011

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	SD/MI						
1.1	Jlh siswa usia 7-12 thn	18,679	19,246	18,592	19,187	19,439	19,639
1.2	Jlh penduduk kelompok usia 7-12 thn	20,545	20,580	20,780	20,408	21,941	21,941
1.3	APM SD/MI	90.92	93.52	89.47	94.02	88.60	89.51
2	SMP/MTs						
2.1	Jlh siswa 13-15 thn	8,491	8,944	8,921	8,540	8,504	8,385
2.2	Jlh penduduk kelompok usia 13-15 thn	10,423	10,434	10,672	10,272	10,820	10,820
2.3	APM SMP/MTs	81.46	85.72	83.59	83.14	78.60	77.50
3	SMA/MA/SMK						
3.1	Jlh siswa 16-18 thn	7,439	6,626	8,270	8,647	8,198	7,792
3.2	Jlh penduduk kelompok usia 16-18 thn	10,537	10,639	10,951	10,264	10,385	10,385
3.3	APM SMA/MA/SMK	70.60	62.28	75.52	84.25	78.94	75.03

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Tahun 2012

Angka partisipasi murni pada tingkat SD/MI tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar 94,02. Sedangkan angka terendah terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 88,60. Pada tingkat SMP/ MTs angka partisipasi murni tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu 85,72. Sedangkan angka terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 77,50. Pada tingkatan SMA/MA/SMK angka partisipasi murni tertinggi pada tahun 2009 sebesar 84,25. Sedangkan angka terendah terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 70,60.

2.2.2.2. Kesehatan

2.2.2.2.1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Salah satu hasil pembangunan di bidang kesehatan dapat dilihat dari indikator utama yaitu : angka kematian, umur harapan hidup, status gizi, angka kesakitan, kondisi lingkungan dan juga pola perilaku. Angka kematian difokuskan pada tiga indikator kematian utama, yaitu : Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA) dan Angka Kematian Ibu (AKI).

a. Angka Kematian Bayi (AKB).

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator yang mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat

kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan, untuk lebih jelas dapat dilihat **Tabel 2.21** berikut ini,

Tabel 2.21
AKB dan AKHB Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2011

Tahun	Kecamatan	Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun	Jumlah kelahiran hidup per tahun	AKB	AKHB
2008	Banda Sakti	25	1644	15	985
	Muara Dua	10	1565	6	994
	Muara Satu	0	0	0	0
	Blang Mangat	8	462	17	983
2009	Banda Sakti	10	1642	6	994
	Muara Dua	2	902	2	998
	Muara Satu	5	709	7	993
	Blang Mangat	6	404	15	985
2010	Banda Sakti	7	1582	4	996
	Muara Dua	4	955	4	996
	Muara Satu	4	696	6	994
	Blang Mangat	5	469	11	989
2011	Banda Sakti	4	1625	2	998
	Muara Dua	7	957	7	993
	Muara Satu	4	727	6	994
	Blang Mangat	7	473	15	985

Sumber : Buku profil Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe tahun 2012

Dari data tabel diatas menunjukkan bahwa tahun 2008 AKB tertinggi di Kecamatan Blang Mangat yaitu sebanyak 17 sedangkan untuk Kecamatan Muara Satu tidak memiliki AKB, tahun 2009 AKB tertinggi ada di Kecamatan Blang Mangat yaitu sebanyak 15 dan terendah berada pada Kecamatan Muara Dua yaitu sebanyak 2, sedangkan tahun 2010 AKB tertinggi ada pada Kecamatan Blang Mangat yaitu sebanyak 11 dan terendah yaitu Kecamatan Banda Sakti dan Muara Dua dengan AKB yaitu sebanyak 4. Selanjutnya pada tahun 2011 AKB tertinggi juga terjadi pada Kecamatan Blang Mangat yaitu sebanyak 15 dan AKB terendah ada pada Kecamatan Banda Sakti yaitu sebanyak 2.

b. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia lima tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1000 kelahiran hidup. AKABA juga merupakan salah satu indikator penting karena memberikan gambaran peluang terjadinya

kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum mencapai umur 5 tahun dan merupakan salah satu target MDGs, untuk lebih jelas dapat dilihat **Tabel 2.22** berikut ini,

Tabel 2.22
Jumlah Kematian Bayi dan Balita
Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2011

Kecamatan	Puskesmas	2008		2009		2010		2011	
		Bayi	Balita	Bayi	Balita	Bayi	Balita	Bayi	Balita
Banda Sakti	Banda Sakti	18	0	5	0	0	3	0	0
	Mon			5	0	0	0	0	0
Muara Dua	Geudong	7	0	2	0	0	1	0	1
	Muara Dua	10	3						
Muara Satu	Muara Satu	-		5	0	5	1	2	3
			2	4	0				
Blang Mangat	Blang Mangat	8	1	2	0	2	1	1	0
	Blang Cut	0	1			1	0	0	0

Sumber : Buku Profil Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe tahun 2012

Angka Kematian Balita Kota Lhokseumawe dilihat dari tabel di atas, pada tahun 2008 Kecamatan Banda Sakti tidak ada kematian balita sedangkan Kecamatan Muara Dua terdapat 3 balita yang mati, pada Kecamatan Muara Satu dan Kecamatan Blang Mangat terdapat 2 balita mati. Untuk tahun 2009 tidak ada terjadi kematian balita, sedangkan pada tahun 2010 ada 3 balita yang mati selanjutnya pada masing-masing Kecamatan yang lain hanya 1 balita yang mati. Kemudian pada tahun 2011 tidak ada kematian balita di Kecamatan Banda Sakti dan Kecamatan Blang Mangat hanya Kecamatan Muara Dua terdapat 1 kematian balita dan 3 balita mati lainnya berada di Kecamatan Muara Satu.

2.2.2.2.2. Angka Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator/ penilaian derajat kesehatan suatu Negara dan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan program-program kesehatan. Angka Harapan Hidup disebut juga lama hidup manusia di dunia. Dari tabel dibawah, Kota Lhokseumawe dari tahun 2007-2011 angka harapan hidup Kota Lhokseumawe terus meningkat yaitu tahun 2007 sebesar 69,70, tahun 2008 yaitu 70,00, tahun 2009 yaitu 70.41, tahun 2010 yaitu 70.81 dan tahun 2011 yaitu 71.17.

Sedangkan jika angka harapan hidup Kota Lhokseumawe dibandingkan dengan provinsi pada tahun 2011 yaitu sebesar 68,80

angka harapan hidup Kota Lhokseumawe lebih tinggi sebesar 2,37 persen dan jika dibandingkan dengan angka harapan hidup Nasional pada tahun 2011 yaitu sebesar 70,76 angka harapan hidup Kota Lhokseumawe juga lebih tinggi sebesar 0,41 persen, untuk lebih jelas dapat dilihat **Tabel 2.23** berikut ini,

Tabel 2.23
Angka Harapan Hidup
Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2011

No	Uraian	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	Kota Lhokseumawe	69,70	70,00	70,41	70,81	71,17
2.	Provinsi Aceh	68,40	68,50	68,60	68,70	68,80
3.	Nasional	68,70	69,00	69,21	69,43	70,76

Sumber : Buku Profil Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe tahun 2012 (diolah)

2.2.2.2.3. Persentase Balita Gizi Buruk

Didalam mengukur status gizi balita untuk pertumbuhan optimal seorang anak ada tiga hal penting yang harus diperhatikan yaitu : Asupan gizi, lingkungan, pelayanan kesehatan yang optimal. Balita yang tercukupi dengan baik akan kebutuhan gizi bagi kesehatan tubuhnya, biasanya terlihat lebih aktif, cerdas dan ceria. Ia terlihat begitu periang dan pandai bersosialisasi dengan lingkungan disekitarnya. Ini dikarenakan gizi merupakan salah satu faktor yang cukup penting bagi proses kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan balita. Akan menjadi hal yang cukup menyenangkan tentu, jika orang tua memiliki balita yang sehat dari segi fisik dan psikisnya. Justru sebaliknya, persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Menurut data WHO, pengelompokkan persentase balita dapat dibagi ke dalam kategori sebagai berikut :

- a. rendah = di bawah 10 %
- b. sedang = 10-19 %
- c. tinggi = 20-29 %
- d. sangat tinggi = 30 %

Gambaran persentase Balita gizi buruk Kota Lhokseumawe untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.24** berikut ini,

Tabel 2.24
Persentase Balita Gizi Buruk
Kota Lhokseumawe Tahun 2006-2011

Kecamatan	Paskesmas	2008			2009			2010			2011		
		Jumlah Balita gizi buruk	Jumlah Balita	Persentase balita gizi buruk	Jumlah Balita gizi buruk	Jumlah Balita	Persentase balita gizi buruk	Jumlah Balita gizi buruk	Jumlah Balita	Persentase balita gizi buruk	Jumlah Balita gizi buruk	Jumlah Balita	Persentase balita gizi buruk
Banda Sakti	Banda Sakti	8	5.515	0.13	6	5.795	0.10	6	4.080	0.15	2	774	0.26
	MonGeudong	7	3.578	0.32	9	2.942	0.31	4	2.229	0.18	3	542	0.55
Muara Dua	Muara Dua	12	5.266	0.30	3	3.582	0.08	5	3.525	0.14	0	588	0
	Muara Satu	5	4.248	0.17	5	3.392	0.15	5	2.605	0.19	32	625	5.12
Muara Satu	Blang Mangat	6	1.717	0.52	2	1.545	0.13	4	1.123	0.36	15	949	1.58
	Blang Cut	0	890	0	2	778	0.26	5	614	0.81	2	476	0.42
Blang Mangat													

Sumber : Buku Profil Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe tahun 2012

Dari tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa rata-rata persentase balita gizi buruk di Kota Lhokseumawe berada pada kategori sedang. Hal ini terjadi pada tahun 2006, 2007, 2009, 2010 dan 2011. Sedangkan tahun 2008, persentase balita gizi buruk di Kota Lhokseumawe berada pada kategori rendah yaitu berkisar pada angka 9,35%.

2.2.2.3. Ketenagakerjaan

2.2.2.3.1. Rasio penduduk yang bekerja

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja (*demand for labour*) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja.

Sementara itu, angkatan kerja (*labour force*) menurut Soemitro Djojohadikusumo didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Bisa juga disebut sumber daya manusia.

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Jika dilihat pada tabel di bawah ini maka untuk tahun 2011 sebanyak 92 % dari angkatan kerja yang ada telah memperoleh kesempatan kerja sedangkan 8% nya masih mencari kerja atau pengangguran, untuk lebih jelas dapat dilihat **Tabel 2.25** berikut ini,

Tabel 2.25
Rasio Penduduk yang Bekerja
Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011

No	uraian	2010	2011
1	Jumlah tenaga kerja	5,813	5,438
2	Jumlah usia produktif	97,072	114,302
3	Jumlah penduduk bekerja	58,478	68,405
4	Jumlah pengangguran	2,236	5,649
5	Jumlah angkatan kerja	66,326	74,054
Jumlah rasio penduduk yang bekerja		0.88	0.92

Sumber : BPS Provinsi Tahun 2011 (data diolah)

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.2.3.1. Kebudayaan

2.2.3.1.1. Jumlah Grup dan Gedung kesenian

Kota Lhokseumawe terjadi penambahan group Kesenian setiap tahunnya. Dari tahun 2006-2012 jumlah group kesenian berturut - turut 138 group, 138 group, 156 group, 160 group, 175 group, 188 group dan 200 group. Untuk data Gedung Kesenian Kota Lhokseumawe tidak tersedia, sementara ini untuk pagelaran Kesenian yang diselenggarakan Kota Lhokseumawe menggunakan Gedung KNPI. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.26** berikut ini,

Tabel 2.26
Group Kesenian dan Gedung Kesenian
Kota Lhokseumawe

NO	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Group Kesenian	138	138	156	160	175	188	200
2	Jumlah Gedung Kesenian	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2012

2.2.3.2. Pemuda dan Olahraga

2.2.3.2.1. Jumlah Klub Olahraga dan Gedung Olah Raga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta *mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.*

Pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator salah satunya adalah jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk. Untuk Kota Lhokseumawe tidak tersedia gedung olahraga namun pelaksanaan olahraga masyarakat Kota Lhokseumawe menggunakan fasilitas olahraga Kabupaten Aceh Utara yang berlokasi di Kota Lhokseumawe.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Fokus Pelayanan Urusan Wajib

2.3.1.1. Pendidikan

2.3.1.1.1. Pendidikan Dasar

A. Angka partisipasi sekolah

Kelompok usia wajib belajar (13-15 tahun) di Kota Lhokseumawe yang belum memperoleh pendidikan tingkat SMP/ MTs, yaitu pada tahun 2006 dengan nilai APS nya sebesar 81,46 persen, untuk tahun 2010 dan 2011 masing-masing sebesar 98,03 persen dan 98,42 persen. Namun untuk Angka Partisipasi Sekolah Tingkat Dasar, dari tahun 2009 s.d 2011 nilai APS mencapai diatas 100 persen yang artinya seluruh penduduk dengan kelompok usia 7 - 12 tahun telah bersekolah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.27** berikut ini,

Tabel 2.27
Perkembangan Angka Partisipasi (APS) Sekolah
Tahun 2006 s/d 2011 Kota Lhokseumawe

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	SD/MI						
1,1	Jlh siswa usia 7-12 thn	18.679	19.246	18.592	19.187	19.439	19.639
1,2	Jlh penduduk kelompok usia 7-12 thn	20.545	20.580	20.780	20.408	21.941	21.941
1,3	APS SD/MI	90,92	102,4	99,57	106,9	100,13	101,2
2	SMP/MTs						
2,1	Jlh siswa 13-15 thn	8.491	8.944	8.921	8.540	8.504	8.385
2,2	Jlh penduduk kelompok usia 13-15 thn	10.423	10.434	10.672	10.272	10.820	10.820
2,3	APS SMP/MTs	81,46	119,81	113,87	103,99	98,03	98,42

Sumber : Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga tahun 2012

B. Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah indikator untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia pendidikan. Rasio ini bisa diartikan jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan.

Pada tahun 2011, perbandingan ketersediaan sekolah SD/ MI di Kota Lhokseumawe adalah 1 : 309. Angka ini menunjukkan bahwa 1 sekolah SD/ MI menampung 309 siswa. Ini lebih baik dari tahun sebelumnya 2010 mengingat ada penambahan 2 unit sekolah pada tahun 2011.

Sama dengan SD/ MA, rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SMP/ MTs pada tahun 2011 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 1 : 292. Ini juga disebabkan karena meningkatnya jumlah sekolah.

Berikut Tabel Jumlah guru dan murid jenjang Pendidikan Dasar pada Kota Lhokseumawe, untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.28** berikut ini,

if

Tabel 2.28
Jumlah Sekolah dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2006 – 2011 Kota Lhokseumawe

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	SD/MI						
1.1	Jumlah Gedung Sekolah	68	68	68	69	69	71
1.2	Jumlah Penduduk kelompok usia 7 - 12 Tahun	18.679	20.580	20.780	20.408	21.941	21.941
	Rasio	275	303	306	296	318	309
2	SMP/ MTs						
2.1	Jumlah Gedung Sekolah	27	28	29	34	35	37
2.2	Jumlah Penduduk kelompok usia 7 - 12 Tahun	8.491	10.434	10.672	10.272	10.820	10.820
	Rasio	314	373	368	302	309	292

Sumber :Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2012

C. Rasio guru terhadap murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Selama kurun waktu tahun 2006-2011 rasio ketersediaan guru di Kota Lhokseumawe terus mengalami kenaikan baik SD/ MI, SMP/ MTs. Pada Tahun 2006 Rasio ketersediaan guru untuk SD/ MI sebesar 1 : 20 sedangkan pada tahun 2011 menjadi 1 : 16 yang artinya 1 orang guru mengajar 16 murid SD/ MI. Hal ini juga terjadi dari tingkat SMP/ MTs, Pada Tahun 2006 rasio ketersediaan guru hanya 1 : 13 dan mengalami kenaikan hingga pada tahun 2011 menjadi 1 : 10, untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.29** berikut ini,

14

Tabel 2.29
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2006 – 2011 Kota Lhokseumawe

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	SD/MI						
1.1	Jumlah Guru	1.100	1.231	1.239	1.345	1.389	1.430
1.2	Jumlah Murid	22.228	22.299	22.111	22.429	22.634	22.492
1.3	Rasio	20	18	18	17	16	16
2	SMP/ Mts						
2.1	Jumlah Guru	847	901	982	1.033	1.100	1.145
2.2	Jumlah Murid	11.375	11.478	11.555	11.719	11.692	11.684
2.3	Rasio	13	13	12	11	11	10

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2012

D. Rasio Guru/ Murid per Kelas Rata-Rata

Rasio guru/ murid per kelas rata - rata tertinggi untuk jenjang SD/ MI di Kota Lhokseumawe terjadi pada tahun 2009 sebesar 2,0 persen dan yang terendah yaitu pada tahun 2008 sebesar 1,5 persen. Sedangkan untuk jenjang SMP/ MTs rasio tertinggi sebesar 3,3 persen pada tahun 2011 dan terendah pada tahun 2006 yaitu 2,8 persen. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.30** berikut ini,

Tabel 2.30
Rasio Guru/ Murid per Kelas Rata – Rata Tahun 2006 – 2011
Kota Lhokseumawe

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	SD/MI	1,7	1,9	1,5	2,0	1,9	1,9
2	SMP/ MTs	2,8	2,9	2,9	3,0	3,1	3,3

Sumber :Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2012

2.3.1.1.2.Pendidikan Menengah

A. Angka Partisipasi Sekolah

Untuk Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang pendidikan menengah pada Kota Lhokseumawe tertinggi sebesar 96,07 persen pada tahun 2011. Pada tahun-tahun sebelumnya Angka Partisipasi Sekolah mengalami naik turun yaitu berturut-turut sejak tahun 2006 sebesar 76,45 persen; 69,02 persen; 78,82 persen; 86,45 persen; dan 71,48 persen. Dibandingkan dengan Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Aceh

pada tahun 2011 sebesar 72,41 maka Angka partisipasi sekolah Kota Lhokseumawe sudah baik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.31** berikut ini,

Tabel 2.31
Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Usia Sekolah
pada Jenjang Pendidikan Menengah Kota Lhokseumawe dan Provinsi
Aceh
Tahun 2006 – 2011

No	Uraian	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Kota Lhokseumawe	76,45	69,02	78,82	86,45	71,48	96,07
2	Provinsi Aceh	72,43	72,79	72,73	72,74	73,53	72,41

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2012

B. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
Rasio ini digunakan untuk mengukur ketersediaan Sekolah/ Madrasah pada jenjang pendidikan menengah untuk setiap 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini juga mengindikasikan kemampuan (kapasitas) untuk menampung semua penduduk usia Pendidikan Menengah di suatu daerah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.32** berikut ini,

Tabel 2.32
Rasio ketersediaan Sekolah – Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2006 – 2011 Kota Lhokseumawe

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	SMA/ MA/ SMK	526,85	531,97	497,77	366,57	384,63	393,48

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2012

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah tingkat SMA/ MA/ SMK pada tahun 2011 sebesar 393,48 yang artinya 1 sekolah menampung 393,48 penduduk usia sekolah. Terjadi peningkatan dari tahun 2006 yang hanya 1 : 526,85 mengingat banyaknya pembangunan gedung – gedung sekolah baru dalam wilayah Kota Lhokseumawe selama lima tahun belakangan ini.

C. Rasio guru terhadap murid

Rasio guru terhadap murid di Kota Lhokseumawe pada tahun 2011 mengalami penurunan dari tahun 2010 yaitu sebesar 8,98 persen menjadi 9,27 persen. Rasio perbandingan jumlah murid dan guru di Kota Lhokseumawe memang jauh lebih tinggi dari standar nasional yaitu sebesar 12 persen. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.33** berikut ini,

Tabel 2.33
Rasio Guru Terhadap Murid Tahun 2006 – 2011
Kota Lhokseumawe

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	SMA/ MA/ SMK	11,34	10,68	10,07	8,81	8,98	9,27

Sumber :Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2012

D. Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata

Rasio guru terhadap murid per kelas rata adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah per kelas. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar pendidikan menengah di tiap ruangan kelas. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal ruang kelas untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Pada tahun 2011 dapat dilihat pada tabel rasio guru sebesar 3,33 persen walaupun ada penurunan sebesar 0,09 persen dibandingkan tahun 2010 yang mendapat rasio sebanyak 3,42 persen, untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.34** berikut ini,

Tabel 2.34
Rasio Guru terhadap murid per kelas rata-rata Tahun 2006 – 2011
Kota Lhokseumawe

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	SMA/ MA/ SMK	3,16	3,40	3,48	3,69	3,42	3,33

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2012

E. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (Tidak Buta Aksara)

Salah satu indikator terlaksananya pendidikan masyarakat dengan baik yaitu dapat dilihat dari meningkatnya Angka Melek Huruf atau kemampuan baca tulis dalam masyarakat tersebut. Angka Melek

Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka Melek Huruf untuk penduduk di wilayah Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan, yaitu tahun 2006 sebesar 97.99 persen, terus mengalami peningkatan hingga mencapai 99.00 persen di tahun 2010. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.35** berikut ini,

Tabel 2.35
Melek Huruf Usia > 15 Tahun
Tahun 2006 - 2010 Kota Lhokseumawe

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah Penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis	90,656	108,372	108,707	114,823	115,392
2	Jumlah Penduduk usia 15 tahun keatas	92,511	110,060	110,205	116,211	116,560
3	Angka Melek Huruf	97.99	98.47	98.64	98.81	99.00

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2012

2.3.1.1.3. Fasilitas pendidikan

A. Kondisi Sekolah pendidikan SD/ MI

Kondisi Sekolah Pendidikan SD/ MI dari table di atas menggambarkan, masih ada ruang kelas pada Sekolah Tingkat Dasar dengan kondisi rusak berat dan rusak ringan. Pada tahun 2009 Kondisi Sekolah Pendidikan SD/ MI terdapat 531 ruang kelas bekondisi baik, 27 ruang kelas yang kondisinya rusak ringan dan 18 ruang kelas rusak berat, sedangkan pada tahun 2010 Kondisi Sekolah Pendidikan SD/ MI yang berkondisi baik sebanyak 521 ruang kelas, untuk kondisi rusak ringan sebanyak 53 ruang kelas dan kondisi rusak berat sebanyak 26 ruang kelas. Selanjutnya pada tahun 2011 Kondisi Sekolah Pendidikan SD/ MI yang berkondisi baik 527 ruang kelas, 75 ruang kelas yang kondisinya rusak ringan dan 11 ruang kelas dengan kondisi rusak berat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.35** berikut ini,

Tabel 2.36
Kondisi Ruang Kelas SD/ MI
Tahun 2009 - 2011 Kota Lhokseumawe

Jenjang Pendidikan	Tahun 2009			Tahun 2010			Tahun 2011		
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
SD/ MI	531	27	18	521	53	26	527	75	11

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2012

14

B. Kondisi Sekolah pendidikan SMP/ MTs dan SMA/ SMK/ MA

Pembangunan untuk sektor pendidikan di Kota Lhokseumawe masih menjadi prioritas utama. Ini dapat kita ketahui dengan data bahwa jumlah ruang kelas baik itu tingkat SMP dan SMA semakin baik untuk tiap tahun ke tahun. Pada tahun 2011, untuk tingkat SMP/ MTs 18 ruang kelas dengan kondisi rusak ringan dan 10 ruang kelas dengan kondisi rusak berat. Ini lebih baik dari pada tahun sebelumnya dengan 48 ruang kelas rusak ringan dan 27 rusak berat. Untuk tingkat Sekolah Menengah terdapat 40 ruang kelas dengan kondisi rusak ringan dan 5 ruang kelas dengan kondisi rusak berat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.37** berikut ini,

Tabel 2.37
Kondisi Ruang Kelas SMP/Mts dan SMA/MA/SMK
Tahun 2009 – 2011 Kota Lhokseumawe

Jenjang Pendidikan	Tahun 2009			Tahun 2010			Tahun 2011		
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
SMP/ MTs	262	49	39	265	48	27	321	18	10
SMA/MA/SMK	309	7	85	287	17	56	266	40	5

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2012

2.3.1.1.4. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

A. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Secara umum layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Lhokseumawe bagi penduduk usia 4-6 tahun masih belum merata sampai ke pedesaan. Jumlah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Lhokseumawe tahun 2011 adalah sebanyak 42 buah dengan jumlah murid 2.639 orang.

Tabel 2.38
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kota Lhokseumawe Tahun 2011

No.	Kecamatan	Sekolah			Jumlah Siswa		
		Negeri	Swasta	N+S	L	P	L+P
01	Muara Dua	1	10	11	225	20	245
02	Banda Sakti	1	15	16	756	742	1498
03	Blang Mangat	1	5	6	164	189	353
04	Muara Satu	1	8	9	277	266	543
Jumlah		4	38	42	1422	1217	2639

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2012

2.3.1.1.5. Angka putus sekolah

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka Putus Sekolah digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12, 13-15 dan 16-18 tahun). Penyebab utama putus sekolah antara lain karena kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak sebagai investasi masa depannya; kondisi ekonomi orang tua yang miskin; dan keadaan geografis yang kurang menguntungkan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.39** berikut ini,

Tabel 2.39
Angka Putus Sekolah (APS)
Tahun 2006 – 2011 Kota Lhokseumawe

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	SD/ MI	13	14	15	5	7	5
2	SMP/ MTs	28	19	8	36	1	8
3	SMA/ SMK/ MA	11	23	NA	20	NA	25

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2012

2.3.1.1.6. Angka Kelulusan

Angka Kelulusan di Kota Lhokseumawe ditiap tahunnya mengalami perubahan baik di tingkat SD, SMP maupun SMA. Perubahan Angka Kelulusan apabila dilihat pada tabel dibawah ini yang menunjukkan data 6 (enam) tahun terakhir sering terjadi penurunan dan kenaikan, hal ini disebabkan ada murid yang pindah sekolah sebelum berakhir masa pendidikannya di sekolah tersebut baik yang masuk ke Kota Lhokseumawe ataupun keluar dari Kota Lhokseumawe menuju Kab/ Kota lain sehingga jumlah dan lulusan murid di Kota Lhokseumawe berubah-ubah. Angka Kelulusan Sekolah untuk tahun 2011 sesuai dengan data di bawah ini pada tingkat SD sebanyak 5 persen, SMP sebanyak 8 persen dan untuk SMA sendiri sebanyak 25 persen, untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.40** berikut ini,

Tabel 2.40
Angka Kelulusan
Kota Lhokseumawe Tahun 2006 – 2011

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	SD/ MI	100%	98,82 %	99,54 %	96,10 %	99,34 %	96,64 %
2	SMP/ MTs	83,82 %	94,71 %	97,41 %	87,65 %	99,29 %	92,66 %
3	SMA/ MA/ SMK	70,82 %	92,51 %	81,55 %	83,89 %	98,08 %	97,47 %

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2012

Tabel di atas menggambarkan Angka Kelulusan siswa sesuai kelompok umur di wilayah Kota Lhokseumawe dari Tahun 2006 sampai dengan 2011. Kelulusan tertinggi di tingkat SD/ MI sebesar 100% pada tahun 2006.

2.3.1.1.7. Pendidikan Dayah

A. Rasio Ketersediaan Dayah dan Santri

Pendidikan dayah memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat dan berakhlakul karimah yang berlandaskan nilai-nilai Dinul Islam. Berdasarkan akreditasi dayah pada tahun 2011, jumlah lembaga dayah di Kota Lhokseumawe sebanyak 13 dayah yang terdiri dari 8 Dayah Salafiyah (dayah tradisional) dan 5 Dayah Terpadu. Dari jumlah tersebut, dayah yang memiliki klasifikasi tipe A berjumlah 4 dayah salafiyah dan 5 dayah terpadu. Untuk Tipe B, dayah salafiyah berjumlah 2 dayah dan tidak memiliki dayah terpadu. Untuk Tipe C, dayah salafiyah berjumlah 2 dayah. Rasio ketersediaan dayah yang terakreditasi dan santri adalah 1:467, untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.41** berikut ini,

Tabel 2.41
Rekapitulasi Tipe Dayah Kota Lhokseumawe Hasil Akreditasi
Tahun 2011

No	Tipe Dayah	Salafiyah	Terpadu
1	Tipe A	4	5
2	Tipe B	2	0
3	Tipe C	2	0
4	Tipe D	0	0

Sumber : Badan Dayah Provinsi Aceh, 2012

14

B. Rasio Ketersediaan Tengku/ Guru dan Santri

Dari hasil kegiatan pemutakhiran data yang dilakukan tahun 2011 menunjukkan bahwa jumlah Teungku/ Ustadzah di Kota Lhokseumawe Sebanyak 453 orang. Yang terdiri dari 354 Tengku/ Ustadzah dengan status menetap dan 99 Tengku/ Ustadzah dengan status tidak menetap. Dari 13 dayah yang ada di dalam wilayah Kota Lhokseumawe terdapat 6070 santri yang terdiri dari Santri dengan status menetap sebanyak 4.493 orang dan santri dengan status tidak menetap sebanyak 1.577 orang. Rasio ketersediaan Tengku/ Ustadzah terhadap santri di Kota Lhokseumawe sebesar 13,39. Artinya secara rata - rata 1 Tengku/ Ustadzah mengajar untuk 13 Santri, untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.42** berikut ini,

Tabel 2.42
Rekapitulasi Jumlah Dayah Hasil Pemuktahiran
Kota Lhokseumawe Tahun 2011

NO	JUMLAH DAYAH	STATUS SANTRI		JUMLAH SANTRI	STATUS GURU/TEUNGKU		JUMLAH GURU/TEUNGKU
		MENETAP	TDK. MENETAP		MENETAP	TDK. MENETAP	
1	13	4,493	1,577	6,070	354	99	453

Sumber :Badan Dayah Provinsi Aceh Tahun 2012

2.3.1.2. Kesehatan

2.3.1.2.1.Rasio Posyandu per Satuan Balita

Dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan perlu dihitung rasio ketersediaan posyandu per balita. untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.43** berikut ini,

Tabel 2.43
Rasio Posyandu Per Satuan Balita
Kota Lhokseumawe Tahun 2006-2011

No	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah Posyandu	90	90	95	95	100	100
2	Jumlah Balita	25,395	25,568	26,749	22,804	22,587	18,414
3	Rasio	0.354	0.352	0.355	0.417	0.443	0.543

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2012

Data menunjukkan bahwa angka rasio posyandu tahun 2006 adalah 0,354. Berturut-turut dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 adalah 0,352, 0,355, 0,417, 0,443 dan 0,543. Sedangkan bila kita lihat

per Kecamatan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.44** berikut ini,

Tabel 2.44
Rasio Posyandu Per Satuan Balita Per Kecamatan
di Kota Lhokseumawe Tahun 2011

No	KECAMATAN	JUMLAH POSYANDU	JUMLAH BALITA	RASIO
1	Kecamatan Muara Satu	15	4,058	0,370
2	Kecamatan Muara Dua	24	5,781	0,415
3	Kecamatan Blang Mangat	29	1,589	1,825
4	Kecamatan Banda Sakti	32	6,744	0,474

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2012

Dari tabel tersebut angka rasio tertinggi berada di Kecamatan Blang Mangat yaitu 1,825. Berturut-turut selanjutnya bila diurutkan berdasarkan besarnya angka rasio adalah Kecamatan Banda Sakti (0,474), Kecamatan Muara Dua (0,415) dan Kecamatan Muara Satu (0,370).

2.3.1.2.2. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk

Sektor kesehatan memegang peranan penting dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama tahun 2006 - 2012 pembangunan sektor kesehatan di Kota Lhokseumawe tidak menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dikarenakan fasilitas kesehatan telah memadai tetapi tenaga medis masih kekurangan dibandingkan dengan jumlah penduduk. Untuk ini dapat dilihat pada Tabel 2.44 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk.

Dari tabel 2.44 dan 2.45 menunjukkan terdapatnya pelayanan kesehatan yang masih kurang ditinjau dari segi ketersediaan fasilitas Rumah Sakit, Puskesmas dan Poliklinik. Kota Lhokseumawe tidak memiliki Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah, Dari tabel ketersediaan Rumah Sakit yang dikelola oleh swasta, bahwa pada tahun 2006-2011 jumlah Rumah Sakit swasta sebanyak 8 buah dan Rumah Sakit Angkatan Darat 1 dan Rumah Sakit milik daerah 1 buah. Jumlah Puskesmas tahun 2006 ada 4 buah, dan pada tahun 2007-2008 bertambah menjadi 5 dan pada tahun 2010-2011 bertambah menjadi 6 buah Puskesmas. Diantara fasilitas kesehatan yang ada Pustu memiliki jumlah yang cukup besar. Pada tahun 2011 jumlah Posyandu sebanyak 18 buah, untuk selanjutnya pada tahun 2008 jumlah Pustu menjadi 21 buah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.45** berikut ini,

Tabel 2.45
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe

No	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah Puskesmas	4	5	5	6	6	6
2	Jumlah Poliklinik	-	-	-	-	-	-
3	Jumlah Pustu	18	18	19	21	22	21
4	Jumlah Penduduk	156.556	158.169	158.760	159.239	171.163	175.082
5	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	0.0026	0.0032	0.0031	0.0038	0.0035	0.0034
6	Rasio Poliklinik persatuan penduduk	-	-	-	-	-	-
7	Rasio Pustu persatuan penduduk	0.0115	0.0114	0.0120	0.0132	0.0129	0.0120

Sumber : Buku Profil Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2012

Kota Lhokseumawe tahun 2010-2011 memiliki rasio Puskesmas per 1000 penduduk sebesar 0,0343 yang artinya 1 Puskesmas melayani lebih kurang 29.180 penduduk, ini menunjukkan bahwa Puskesmas di Kota Lhokseumawe telah memenuhi konsep wilayah kerja Puskesmas dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah Puskesmas rata-rata 30.000 penduduk. Sedangkan untuk jumlah Pustu di Kota Lhokseumawe tahun 2011 sebanyak 21 Pustu yang menandakan bahwa untuk 1 Puskesmas dibantu oleh 3 Pustu. Rasio Pustu di Kota Lhokseumawe tahun 2010-2011 per 1000 penduduk sebesar 0,0129 di tahun 2010 dan 0,0108 di tahun 2011 yang artinya 1 Pustu melayani 92.593 penduduk di tahun 2011. Data rasio Puskesmas dan Pustu untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.46** berikut ini,

Tabel 2.46
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2006-2011

No	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	-	-	-	-	-	-
2	RUMAH SAKIT ITWA/PARU DAN PENYAKIT KHUSUS LAINNYA MILIK PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-
3	RUMAH SAKIT AD/AU/AL/POLRI	1	1	1	1	1	1
4	RUMAH SAKIT DAERAH	1	1	1	1	1	1
5	RUMAH SAKIT SWASTA	8	8	8	8	8	8
6	JUMLAH SELURUH RUMAH SAKIT	10	10	10	10	10	10
7	JUMLAH PENDUDUK	156.556	158.169	158.760	159.239	171.163	194.063
7	RASIO	0.0639	0.0632	0.0630	0.0628	0.0584	0.0515

Sumber : Buku Profil Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2012

Secara umum dapat kita katakan bahwa rasio Dokter per satuan penduduk di Kota Lhokseumawe mengalami penurunan. Kecenderungan penurunan ini dapat kita lihat dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Pada tahun 2009 angka rasio Dokter berada pada angka 0,026. Sedangkan pada tahun 2010 terjadi penurunan menjadi 0,024. Pada tahun 2011 terjadi penurunan lagi sampai pada angka 0,018. Hal ini disebabkan bahwa di Kota Lhokseumawe tidak terjadi

penambahan Dokter bahkan terjadi penurunan Dokter sebanyak 6 orang pada tahun 2011, untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.47** berikut ini,

Tabel 2.47
Jumlah Dokter dan Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe

No	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah Dokter			31	41	41	35
2	Jumlah Tenaga Medis	-	-	678	700	524	476
3	Jumlah Penduduk	156,556	158,169	158,760	159,239	171,163	175,082

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2012

Namun demikian angka rasio Dokter per satuan penduduk di Kota Lhokseumawe pada tahun 2010-2011 mengalami penurunan dari 0,24 menjadi 0,20. Ini menunjukkan bahwa 1 orang Dokter di tahun 2011 melayani 5.002 penduduk di Kota Lhokseumawe. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal maka perlu penambahan tenaga Dokter di Kota Lhokseumawe. Rasio Dokter per satuan penduduk di Kota Lhokseumawe, untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.48** berikut ini,

Tabel 2.48
Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011

No	Uraian	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah Dokter	31	41	41	35
2	Jumlah Penduduk	158,760	159,239	171,163	175,082
	Rasio Dokter per satuan penduduk	0.20	0.26	0.24	0.20

Sumber :Buku Profil Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2012

Tidak jauh berbeda dengan data rasio Dokter, rasio Tenaga Medis pun cenderung mengalami penurunan. Untuk dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2010, dan 2011 terjadi perubahan ke arah penurunan angka rasio. Pada tahun 2011 jika dibandingkan dengan tahun 2010 terjadi penurunan angka rasio menjadi 0,245. Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk di Kota Lhokseumawe tahun 2010 sebesar 0.0031 per 1000 penduduk dan di tahun 2011 adalah 0.0027 per 1000 penduduk. Ini menunjukkan bahwa 1 Tenaga Medis melayani 333 penduduk di tahun 2011. Rasio Tenaga Medis tersebut untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.49** berikut ini,

Tabel 2.49
Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe
Tahun 2010-2011

No	Uraian	2008	2009	2010	2011
1	Tenaga Medis	678	700	524	476
2	Jumlah Penduduk	158,760	159,239	171,163	175,082
	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	4.27	4.40	3.06	2.72

Sumber :Buku Profil Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2012

2.3.1.2.3.Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Angka Kematian Ibu juga merupakan salah satu target yang telah ditentukan dalam tujuan pembangunan millenium yaitu tujuan ke 5 yaitu meningkatkan kesehatan ibu dimana target yang akan dicapai sampai tahun 2015 adalah mengurangi sampai $\frac{3}{4}$ resiko jumlah kematian ibu. Dari hasil survei yang dilakukan AKI telah menunjukkan penurunan dari waktu ke waktu, namun demikian upaya untuk mewujudkan target tujuan pembangunan millenium masih membutuhkan komitmen dan usaha keras yang terus menerus.

Tabel 2.50
Angka Kematian Ibu Menurut Kecamatan
Di Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2011`

No	Kecamatan	Angka Kematian Ibu			
		2008	2009	2010	2011
1	Banda Sakti	2	3	4	3
2	Muara Dua	1	0	1	2
3	Muara Satu	0	1	0	1
4	Blang Mangat	2	0	1	1

Sumber: Profil Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2012

Adapun tabel dibawah ini disajikan untuk melihat sejauh mana pertolongan terhadap ibu hamil ditangani oleh tenaga yang berkompeten, pada tahun 2009 yaitu sekitar 58,8 %, terus meningkat sebesar 41,2% menjadi 100%, untuk lebih jelas dapat dilihat pada **tabel 2.51** berikut ini,

RF

Tabel 2.51
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
Kota Lhokseumawe Tahun 2009-2011

No	Uraian	Tahun		
		2009	2010	2011
1	Komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja	260	841	345
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	442	841	802
Persentase cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani		58,8%	100%	43,02%

Sumber: Buku profil Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2012 (diolah)

2.3.1.2.4. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Cakupan kunjungan ibu hamil, persalinan yang ditolong tenaga kesehatan dari tahun ke tahun di setiap Kecamatan semakin membaik. Tahun 2008 persalinan yang tidak tertolong mencapai 358 orang, sedangkan di tahun 2011 persalinan yang tidak tertolong dalam persalinan menurun hingga berjumlah 8 orang. Hal ini menunjukkan bahwa ibu hamil mulai mempercayai tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan untuk membantu persalinan mereka daripada dukun beranak sehingga angka kematian ibu dalam persalinan menurun. Data kunjungan ibu hamil, persalinan yang ditolong tenaga kesehatan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada **tabel 2.52** berikut ini,

Tabel 2.52

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil, Persalinan yang Ditolong Tenaga Kesehatan menurut Kecamatan Kota Lhokseumawe tahun 2008-2011

Tahun	Kecamatan	Ibu Hamil	Ibu Bersalin	Jumlah yang Ditolong Dalam Persalinan
2008	Banda Sakti	1942	1853	1646
	Muara Dua	-	-	-
	Muara Satu	1786	1705	1580
	Blang. Mangat	525	502	475
2009	Banda Sakti	1989	1898	1642
	Muara Dua	1023	976	899
	Muara Satu	876	836	703
	Blang. Mangat	509	486	392
2010	Banda Sakti	1876	1580	1580
	Muara Dua	1033	958	956
	Muara Satu	782	697	672

Tahun	Kecamatan	Ibu Hamil	Ibu Bersalin	Jumlah yang Ditolong Dalam Persalinan
	Blang.Mangat	513	475	474
2011	Banda Sakti	1761	1629	1628
	Muara Dua	1011	964	964
	Muara Satu	746	731	728
	Blang.Mangat	491	480	476

Sumber :Buku Profil Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2012

2.3.1.2.5.Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Untuk pelayanan kesehatan yang optimal adalah pemberian imunisasi serta pemeriksaan kesehatan anak secara rutin (penimbangan rutin di Posyandu). Adapun kegiatan imunisasi merupakan salah satu kegiatan prioritas dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sebagai salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah untuk mencapai MDGs khususnya untuk menurunkan angka kematian pada anak.

Kota Lhokseumawe telah menetapkan desa binaan UCI (Universal Child Immunization) artinya setiap Desa/ Kelurahan minimal 80 % bayi telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Pada Tabel dibawah ini dijelaskan pada tahun 2010 terdapat 66,2 % Desa/ Kelurahan UCI sedangkan pada tahun 2011 ada 72,1 % Desa/ Kelurahan UCI. untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.53** berikut ini,

Tabel 2.53
Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011

No	Uraian	Jumlah Desa	Desa/Kelurahan UCI		% Desa/Kelurahan UCI	
			Tahun		Tahun	
			2010	2011	2010	2011
1.	Cakupan Desa/Kelurahan UCI Kota Lhokseumawe	68	45	49	66,2	72,1

Sumber : Buku Profil Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe tahun 2012 (diolah)

2.3.1.2.6.Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Berdasarkan data mengenai cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Kota Lhokseumawe tahun 2010 sampai dengan 2011 ditemukan balita yang mengalami gizi buruk sebesar 29 balita dan jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan tersebut dapat ditangani. Begitu pula di tahun 2011 jumlah balita gizi buruk menurun menjadi 27 orang dan kesemuanya mendapat perawatan dari balita gizi buruk yang ditemukan sehingga persentase cakupan balita gizi buruk

yang mendapat perawatan mencapai 100%. Data cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.54** berikut ini,

Tabel 2.54
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011

No	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Tahun	
		2010	2011
1	Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan	29	27
2	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan	29	27
Persentase cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan		100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe

2.3.1.2.7. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB Paru dan DBD

Angka kesakitan Kota Lhokseumawe disajikan disini berdasarkan data hasil Puskesmas dan Rumah Sakit di Kota Lhokseumawe. Angka keluhan kesehatan sakit yang terjadi di Kota Lhokseumawe pada tahun 2008 tertinggi yaitu Diare (5.098 kasus) diikuti oleh TB Paru 1.060 kasus, demikian juga halnya tahun 2009, 2010 dan 2011 kasus Diare masih mendominasi angka keluhan kesehatan sakit di wilayah Kota Lhokseumawe. Sedangkan TB Paru terjadi penurunan yang sangat baik dimana tahun 2009 menjadi hanya 29 kasus, tahun 2010 dan 2011 masing-masing 195 kasus dan 229 kasus, untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.55** berikut ini,

Tabel. 2.55
Sebelas Jenis Penyakit yang Terjadi
Di Kota Lhokseumawe untuk Tahun 2008-2011

No	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus			
		Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
1	Polio	-	-	7	2
2	TB Paru	1.060	29	195	229
3	HIV	-	-	0	0
4	AIDS	-	3	0	1
5	Diare	5.098	7.702	7.349	7.212
6	Kusta PB	10	6	6	22
7	Kusta MB	37	21	21	26
8	Campak	143	114	44	65
9	DBD	490	471	378	232
10	Malaria	85	546	470	2.120
11	Filariasis	5	16	0	17

Sumber : Buku Profil Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe tahun 2012

14

2.3.1.2.8. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kota Lhokseumawe tahun 2011 mencapai 60,7%. Ini menandakan bahwa pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin perlu ditingkatkan di Kota Lhokseumawe. Data cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kota Lhokseumawe, untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.56** berikut ini,

Tabel 2.56
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011

No	Uraian	Masyarakat Miskin (Dan Hampir Miskin)	
		Tahun 2010	Tahun 2011
1	Kunjungan Pasien miskin disarana kesehatan strata 1	-	64.561
2	Jumlah seluruh penduduk miskin	106.326	106.326
Cakupan pelayanan Kesehatan rujukan Pasien Masyarakat miskin		-	60,7%

Sumber :Buku Profil Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2012

2.3.1.2.9. Cakupan Kunjungan Bayi

Menurut data dari Dinas Kesehatan bahwa cakupan kunjungan bayi menurut Kecamatan dan Puskesmas di tahun 2010 sebesar 97,9% dan menurun di tahun 2011 sebesar 94,5%. Penurunan ini terjadi karena banyak masyarakat di Kota Lhokseumawe yang membawa bayinya ke spesialis Dokter anak. Cakupan kunjungan bayi menurut Kecamatan dan Puskesmas, untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.57** berikut ini,

Tabel 2.57
Cakupan Kunjungan Bayi menurut Kecamatan dan Puskesmas Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011

No	Kecamatan	Puskesmas	Kunjungan Bayi			
			Tahun 2010		Tahun 2011	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Banda Sakti	Banda Sakti	607	93,4	1.191	104,4
		Mongeu Dong	308	94,2	431	91,9
2	Muara Dua	Muara Dua	702	116,4	956	97,8
3	Muara Satu	Muara Satu	284	70,1	575	83,7
4	Blang Mangat	Blang Mangat	217	100,0	263	81,2
		Blang Cut	170	125,9	127	83,6
Jumlah			2.288	97,9	3.543	94,5

Sumber :Buku Profil Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2012

RF

2.3.1.3. Pekerjaan Umum

2.3.1.3.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Perkembangan aktivitas pembangunan ekonomi dan sosial di Kota Lhokseumawe yang menunjukkan kecenderungan meningkat dalam tahun-tahun terakhir ini perlu diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Salah satu hal yang harus diberi perhatian dan menjadi prioritas adalah menyangkut penanganan ketersediaan sarana dan prasarana dasar seperti jalan dan jembatan. Dari data yang terbaru Kota ini memiliki panjang jalan 354.958 meter dengan banyak ruas mencapai 643 ruas yang tersebar pada 4 Kecamatan dengan rincian sebagaimana diskripsikan pada tabel, untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.58** berikut ini,

Tabel 2.58
Data Panjang Jalan Kota Lhokseumawe Tahun 2012

	Kecamatan	Jumlah Ruas	Panjang (m)	Persentase
1.	Banda Sakti	312	109.468	31
2.	Muara Dua	139	89.919	25
3.	Muara Satu	81	85.009	24
4.	Blang Mangat	111	70.562	20
Total		643	354.958	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe, Tahun 2012

Kondisi jalan Negara yang melintasi Kota Lhokseumawe, dengan total panjang jalan 23,2 mengalami kerusakan sedang dan ringan sepanjang 9,4 km (41,0 %) dan sisanya (59,0%) dalam kondisi baik. Untuk kondisi jalan Provinsi sepanjang 4,60 km di Kota Lhokseumawe secara umum dalam kondisi rusak ringan dan memerlukan perawatan. Sedangkan untuk kondisi jalan Kota sepanjang 227,39 km yang terbagi pada 4 (empat) Kecamatan ini masih memerlukan penanganan yang serius. Kerusakan jalan biasanya ditimbulkan akibat seringnya terjadi genangan air akibat tidak tersedianya *drain hole* yang memadai, kerusakan lain juga ditimbulkan oleh kelebihan muatan tonase dari truk, untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.59** berikut ini,

14

Tabel 2.59
Jenis, Kondisi, Kelas dan Panjang Jalan (Km)
di Kota Lhokseumawe Tahun 2007-2011

Jenis, Kondisi, Kelas	Status														
	Jalan Negara					Jalan Provinsi					Jalan Kabupaten				
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
Jenis Permukaan															
Aspal	23.2	23.2	23.2	23.2		4.6	4.6	4.6	4.6		241.7	241.7	255.7	255.71	
Paklah (kerikil)	0		0			0	0	0	0		4.7	4.7	2.52	5.75	
Tanah	0		0			0	0	0	0		0	0	0	0	
Tidak Terperinci	0		0			0	0	0	0		11.3	11.3	0	0	
Jumlah	23.2	23.2	23.2	23.2		4.6	4.6	4.6	4.6		257.7	257.7	258.2	261.46	
Kondisi Jalan															
Baik	0	0	23.2	23.2		0	0	4.6	4.6		84.7	84.7	211.2	231.85	
Sedang	16.8	16.8	0	0		0	0	0	0		118.1	118.1	23.23	29.31	
Rusak	6.4	6.4	0	0		4.6	4.6	0	0		33.4	33.4	23.78	4	
Rusak Berat	0	0	0	0		0	0	0	0		21.5	21.5	0	0	
Jumlah	23.2	23.2	23.2	23.2		4.6	4.6	4.6	4.6		257.7	257.7	258.2	265.16	
Kelas jalan															
Kelai I	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
Kelas II	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
Kelas III	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
Kelas III A	23.2	23.2	23.2	23.2		0	0	0	0		0	0	0	0	
Kelas III B	0	0	0	0		4.6	4.6	4.6	4.6		0	0	0	0	
Kelas III C	0	0	0	0		0	0	0	0		257.7	257.7	0	0	
Tidak Terperinci	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	258.2	265.16	
Jumlah	23.2	23.2	23.2	23.2		4.6	4.6	4.6	4.6		257.7	257.7	258.2	265.16	

Sumber: Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2012

Secara global pembenahan jaringan jalan di Kecamatan Banda Sakti memerlukan peningkatan dan pemeliharaan jalan karena belum seimbang dengan pertumbuhan kendaraan bermotor. Jumlah mobil meningkat rata-rata hampir 4,62 % pertahun, bus bertambah rata-rata 15,0% setiap tahunnya.

2.3.1.3.2. Rasio Jaringan Irigasi

Pembangunan yang mendukung kegiatan ketahanan pangan masih dirasakan masih sangat memperhatikan, hal ini disebabkan belum adanya sistem jaringan irigasi teknis yang mampu menyediakan kebutuhan air pada saat musim tanam. Untuk Kota Lhokseumawe memiliki luas pertanian sawah dan palawija yang mencapai 2.754 Ha yang tersebar pada 3 (tiga) Kecamatan yaitu, Kecamatan Muara Satu, Blang Mangat dan Kecamatan Muara Dua dengan produksi mencapai 12.944 kuintal per tahunnya, memerlukan perhatian yang serius guna meningkatkan *income generate* bagi masyarakat petani.

2.3.1.3.3. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

Pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam di Kota Lhokseumawe belum maksimal, terutama disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai dinul Islam di kalangan masyarakat. Berbagai perilaku masyarakat masih banyak yang

bertentangan dengan moralitas dan etika agama. Sarana dan prasarana ibadah memang dipandang telah mencukupi jika ditinjau dari jumlah penduduk yang ada, terutama penduduk laki-laki.

Banda Sakti dengan kepadatan penduduk yang mencapai 6.543 jiwa/km², Muara Satu 567 jiwa/km², Muara Dua 765 jiwa/km² dan Blang Mangat 386 jiwa/km² dengan sarana jumlah rumah ibadah Masjid, Mushala dan Meunasah pada Kecamatan Banda Sakti sebanyak 17 Masjid, 18 Mushalla, 18 Meunasah, 2 unit Gereja dan 1 unit Vihara. Pada Kecamatan Muara Satu dengan 8 Masjid, 13 Mushala, dan 11 Meunasah. Sedangkan Kecamatan Muara Dua 10 Masjid dan 11 Mushalla serta 17 Meunasah, untuk Blang Mangat 12 Masjid, dan 12 Mushalla dan 22 Meunasah. Secara kebutuhan baik Masjid, Mushalla dan sarana ibadah lainnya telah mencukupi kapasitasnya, yang perlu dilanjutkan adalah pemeliharaan terhadap sarana ibadah yang ada.

Rasio tempat ibadah per satuan pemeluk dihitung berdasarkan jumlah tempat ibadah dibagi dengan jumlah pemeluk. Sehingga berdasarkan data di atas maka rasio jumlah tempat ibadah persatuan pemeluk : Islam (1 : 986), Kristen (1 : 479) dan Budha (1 : 752), untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.60** berikut ini,

Tabel 2.60
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
Kota Lhokseumawe

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Sarana Ibadah				
			Mesjid	Mushalla	Meunasah	Gereja	Vihara
1	Banda Sakti	6.543	17	18	18	2	1
2	Muara Satu	567	8	13	11	-	-
3	Muara Dua	765	10	11	17	-	-
4	Blang Mangat	386	12	12	22	-	-
Total		8.261	47	54	68	2	1
Rasio			5,69	6,54	8,23	0,24	0,12

Sumber :Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2012

2.3.1.3.4.Persentase rumah tinggal bersanitasi

Pembangunan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan di perkotaan dan perdesaan Kota Lhokseumawe belum begitu mendapatkan perhatian dan prioritas. Penanganan masalah limbah masih terbatas pada tahap konsep penanganan dan belum diwujudkan ke dalam pembangunan fisik. Selain itu, pengelolaan limbah manusia secara sistematis belum dilakukan. Penanganan limbah pada tingkat rumah

14

tangga dilayani melalui jamban dengan tangki septik, sedangkan masyarakat yang tidak memiliki jamban menggunakan tempat pembuangan limbah tradisional seperti sungai, saluran drainase kota, dan lain-lain.

Ketika jumlah penduduk masih sedikit, maka daya dukung lingkungan masih mampu melakukan pembersihan sendiri (*self purification*), namun dengan bertambahnya jumlah penduduk dan peningkatan debit limbah cair yang dihasilkan maka diperlukan metode pengelolaan sehingga yang terbuang pada lingkungan diharapkan sudah memenuhi syarat.

Sesuai dengan hasil survei kesehatan lingkungan maka di wilayah Kota Lhokseumawe dapat kita ketahui bahwa ada 31.415 jamban dengan berbagai jenis jamban dan juga terdapat 26.377 unit SPAL. Secara umum semua fasilitas jamban dan SPAL dibangun secara swadaya oleh masyarakat sendiri.

Pada umumnya masyarakat di wilayah Kota Lhokseumawe menggunakan dua sistem yaitu sistem terpisah dan sistem gabungan. Sistem terpisah yaitu terjadinya pemisahan antara penyaluran air limbah dan air hujan. Air limbah dialirkan ke dalam SPAL yang berbentuk *septic tank*. Air hujan umumnya disalurkan melalui saluran drainase kota. Sistem gabungan yaitu semua air limbah tersebut masuk ke dalam satu wadah (*septic tank*). Pemerintah Kota telah memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sebanyak 1 unit. Pemerintah pun telah memiliki 2 unit mobil penyedot dan pengangkut tinja. Volume lumpur tinja yang dibuang ke ILPT ini berkisar 3 m³/hari.

Masyarakat mempunyai perannya masing-masing sesuai dengan tingkat kesadaran akan kesehatan lingkungan dan kemampuan finansialnya masing-masing. Masyarakat yang telah mampu, umumnya telah memiliki fasilitas penanganan limbah cair dengan baik. Namun masyarakat yang belum memiliki kemampuan finansial, penyediaan sarana ini menjadi sulit bagi mereka. Sehingga dapat kita katakan dengan kondisi masyarakat dengan berbagai latar belakang yang dimilikinya, penanganan limbah ini belum maksimal. Hal ini terlihat dari data kesehatan lingkungan bahwa 36.119 rumah yang disurvei, hanya 14.201 rumah yang memiliki SPAL. Bahkan dari total 14.201 SPAL tersebut, 53,84 % SPAL berada dalam kondisi memadai, sedangkan sisanya sebesar 46,16 % berada dalam kondisi tidak memadai.

14

2.3.1.3.5. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk

Sampah yang dihasilkan di Kota Lhokseumawe terdiri dari sampah yang berasal dari domestik dan non domestik. Sampah yang berasal dari domestik ditampung ditempat penampungan sementara yang berupa bak-bak sampah yang selanjutnya diangkut oleh truk sampah (*dump truck*) menuju ke tempat pembuangan akhir yang berada di Alue Lim dengan sistem "open dumping".

Dengan standar besaran jumlah sampah yang ditimbulkan oleh rumah tangga (domestik) sebesar 1,5 liter/hari, maka dapat diperoleh jumlah produksi sampah domestik Kota Lhokseumawe hingga akhir tahun 2026 yaitu sebesar 345.172 liter/hari. Jumlah sampah non-domestik adalah 40% dari sampah domestik, yaitu sebesar 138.070 liter/hari. Total produksi sampah ini keseluruhannya adalah sebesar 483.242 liter/hari.

Saat ini sarana persampahan yang terdapat di Kota Lhokseumawe masih jauh dari cukup untuk melayani produksi sampah Kota Lhokseumawe. Kondisi pelayanan sarana persampahan yang ada hampir sepenuhnya digunakan untuk melayani produksi sampah di kawasan pusat kota saja. Untuk lebih jelasnya mengenai sarana persampahan untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.61** berikut ini,

Tabel 2.61
Sarana dan Prasarana Sampah Kota Lhokseumawe
Tahun 2010

No	Kecamatan	Sarana dan Prasarana	Vol / Unit
1	Banda Sakti	Jumlah TPS/Drum	2.250
		Jumlah TPS/Bak	29
		Jumlah TPS/Gerobak Sampah	8
		Jumlah TPS/Container	13
		Mobil Kijang Pick Up	5
		Truck	8
2	Muara Satu	Jumlah TPS/Drum	950
		Jumlah TPS/Bak	11
		Jumlah TPS/Gerobak Sampah	2
		Jumlah TPS/Container	1
		Truck	3
3	Muara Dua	Jumlah TPS/Drum	250
		Jumlah TPS/Bak	5
		Jumlah TPS/Gerobak Sampah	2
		Jumlah TPS/Container	1
		Truck	3
4	Blang Mangat	Jumlah TPS/Drum	250
		Jumlah TPS/Bak	4
		Jumlah TPS/Gerobak Sampah	2
		Jumlah TPS/Container	1
		Truck	3

Sumber : BLHK Kota Lhokseumawe, 2010

14

Selanjutnya berbagai sarana lainnya dalam penanggulangan persampahan Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada **Tabel 2.62** berikut ini,

Tabel 2.62
Sarana Lainnya Dalam Persampahan
Kota Lhokseumawe Tahun 2010

No	Sarana dan Prasarana	Ket
1	Tempat Pengolahan Akhir	
	- Lokasi	Desa Alue Lim
	- Sistem yang digunakan	Open dumping
	- Jarak Dari Kota, Luas dan Status TPA	Jarak 20 Km dari Pusat Kota, Luas 8 ha, dan Status Milik Pemerintah Kota Lhokseumawe yang dikelola oleh BLHK Kota Lhokseumawe
	- Volume sampah yang masuk ke TPA	202 m3/hari
	- Alat Berat	2 Unit (Beco dan Buldozer) Dalam Kondisi Baik
2	Fasilitas Pendukung	
	- Ketersediaan instalasi pengolahan air lindi (leachate)	3 Unit
	- Sumur Pantau	3 Unit

Sumber : BLHK Kota Lhokseumawe, 2010

2.3.1.3.6. Rasio permukiman layak huni

Dari beberapa kawasan perumahan yang telah ada di Kota ini, hanya beberapa kawasan saja yang memiliki prasarana dasar penting yang telah tersedia seperti, kompleks perumahan PT. Arun, perumahan kompleks Tsunami Blang Crum yang dibangun oleh *Save the Children*, kompleks Mutiara, dan kompleks Asrama TNI/ Polri dan instansi vertikal yang layak. Tapi hanya kompleks PT. Arun saja yang memiliki fasilitas yang memiliki pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan dan pusat kuliner serta sarana olah raga seperti, stadion bola kaki, kolam renang, tenis out door, *volyball*, basket, badminton, *joging track* dan golf.

2.3.1.3.7. Panjang jalan dilalui Roda 4

Kota Lhokseumawe dalam perkembangannya guna penyediaan jaringan transportasi darat, terus melakukan pembenahan dengan dibangunnya *Lhokseumawe Outer Ring Road* yang menggunakan *trase* baru pada tepi laut dari Loskala hingga simpang Pertamina Hagu Selatan. Untuk tahap awal telah dilakukan pembebasan lahan dan dilanjutkan dengan pembangunan *trase* tersebut dengan melakukan perkerasan. Kota Lhokseumawe telah memiliki panjang jalan lebih dari 255.19 km yang terdiri dari jalan Nasional, Provinsi dan Kota. Data tersebut belum

RF

termasuk pada penambahan pada jalan Ujong Pacu – Cot Trieng dan Lhokseumawe *Outer Ring Road* yang sedang dilaksanakan pekerjaannya.

2.3.1.3.8. Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)

Semua jalan yang menghubungkan antara pusat Ibukota ke kawasan permukiman telah dapat dilalui kendaraan roda 4 (empat) terutama adalah Kecamatan Banda Sakti yang juga merupakan pusat Pemerintahan Kota Lhokseumawe. Dengan adanya jaringan transportasi yang memadai ini turut memperlancar pelayanan pada semua Kecamatan dapat dilakukan secara prima.

2.3.1.3.9. Panjang jalan yang memiliki trotoar dan *drainase*/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)

Dalam sebuah sistem jaringan transportasi, hal yang tak kalah penting adalah konsep pedestrian atau trotoar jalan dan saluran drainase yang dalam sebuah jalan meliputi jalan Panglatch, Jl. T. Hamzah Bendahara, sebagian Jl. Merdeka, Jl. Samudera dan Samudera Baru, sebagian Jl. Darussalam, Jl. Pase, Jl. Malahayati, Jl. T. Nyak Adam Kamil, Jl. Chik Di Tiro yang mencapai 3.940 meter yang semuanya berada pada Kecamatan Banda Sakti

2.3.1.3.10. Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

Secara umum, sistem *drainase* dapat didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/ atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal.

Bangunan sistem *drainase* terdiri dari saluran penerima (*interceptor drain*), saluran pengumpul (*collector drain*), saluran pembawa (*conveyor drain*), saluran induk (*main drain*), dan badan air penerima (*receiving waters*). Di sepanjang sistem sering dijumpai bangunan lainnya seperti gorong-gorong, jembatan air (*aqueduct*), pelimpah, pintu-pintu air, kolam tando, dan stasiun pompa.

Dalam rangka pengembangan dan penataan kawasan permukiman dan peningkatan taraf hidup masyarakat di Kota Lhokseumawe, penanganan *drainase* merupakan salah satu prioritas

RF

yang perlu mendapatkan penanganan. Karena gangguan dan kerugian akan masalah banjir dan genangan telah mengakibatkan dampak penurunan kondisi sosial ekonomi masyarakat, kerusakan lingkungan pemukiman dan sektor-sektor ekonomi yang potensial.

Pembangunan rencana sistem *drainase* saat ini antara lain belum memadainya jaringan *drainase* baik dalam jumlah maupun kapasitas. Sistem *drainase eksisting* baru mencakup sebagian kecil dari daerah pelayanan dan sebagian besar berada di daerah pusat-pusat kegiatan saja. Dapat dikatakan banyak terdapat fungsi saluran *drainase* yang masih digunakan bersama-sama dengan sistem penyaluran air limbah baik domestik maupun industri (sistem tercampur) sehingga terjadi penurunan kapasitas aliran pada saat musim hujan.

Rencana pengembangan prasarana *drainase* disesuaikan dengan tingkat perkembangan kawasan terbangun dan prasarana jalannya serta terintegrasi dengan pengendalian banjir dan program perbaikan jalan.

Perencanaan sistem *drainase* di Kota Lhokseumawe meliputi pembuatan sistem saluran *primer*, *sekunder*, dan *tersier* (kawasan permukiman), rehabilitasi saluran yang kondisinya buruk, pemasangan pompa dan pemasangan pintu-pintu air. Saluran pembuangan air yang direncanakan adalah Krueng Cunda dan Krueng Meuraza serta alur-alur sungai lainnya. Saluran *drainase primer* mengikuti jalan utama (arteri primer, arteri sekunder dan kolektor primer), sedangkan saluran *drainase sekunder* mengikuti jalan kolektor sekunder dan jalan lokal, sementara saluran *drainase tersier* mengikuti jalan lingkungan permukiman penduduk.

Sementara itu, untuk kondisi *drainase* di Kota Lhokseumawe saat ini khususnya di Kecamatan Banda Sakti yang merupakan pusat perkantoran dan perdagangan hampir semua *drainase* rampung dikerjakan pada tahun 2011 yang lalu.

2.3.1.3.11. Lingkungan Pemukiman

Luas wilayah Kota Lhokseumawe 18.106 ha telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan atau kebutuhan oleh 171,163 jiwa penduduk. Dilihat dari tata guna pemanfaatan lahan (wilayah) yang ada, peruntukan untuk kebutuhan permukiman sangat menonjol, yaitu sekitar 10.887 ha

14

atau sekitar 60,08 % dari luas wilayah seluruhnya. Untuk lebih jelasnya dilihat pada **Tabel 2.63** berikut ini,

Tabel 2.63
Luas Wilayah dan Tingkat Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan Kota Lhokseumawe

No.	Kecamatan	Penduduk	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan
1.	Banda Sakti	73.543	11,24	6543
2.	Muara Satu	31.723	55,90	567
3.	Muara Dua	44.209	57,80	765
4.	Blang Mangat	21.689	56,12	386
	Jumlah	171,163	181,08	945

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka, Tahun 2010

2.3.1.4. Perumahan

2.3.1.4.1. Rumah tangga pengguna air bersih

Permasalahan air bersih di Kota Lhokseumawe dapat kita lihat dari bagaimana pola masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersihnya. Masyarakat menggunakan berbagai macam cara dalam memenuhi kebutuhan airnya. Dari data profil kesehatan lingkungan terlihat bahwa sebanyak 25.039 rumah menggunakan sumur gali pada kategori memenuhi syarat atau 69,32% dari total rumah. Sedangkan yang menggunakan sumur gali yang tidak memenuhi syarat sebanyak 5.162 rumah atau 14,29%. Cara lain yang digunakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersihnya adalah dengan mengandalkan sumur pompa. Masyarakat yang menggunakan sumur pompa sebanyak 264 rumah atau 0,73% dan berada dalam kondisi memenuhi syarat, sedangkan yang menggunakan sumur pompa tetapi tidak memenuhi syarat sebanyak 4 rumah atau 0,01%. Sumber air bersih lainnya yang digunakan oleh masyarakat adalah PAH (Penampungan Air Hujan). Jumlah rumah yang menggunakan PAH tersebut sebanyak 523 rumah atau 1,47% dengan kondisi memenuhi syarat, untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.64** berikut ini,

BP

Tabel 2.64
Hasil Rekapitulasi Pendataan Sumber Air Bersih (SAB)
Di Wilayah Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2008

No.	Puskesmas	Jumlah Rumah	Jenis Sarana Air Bersih					
			Sumur Gali		Sumur Pompa		PAH	
			MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS
1	Muara Dua	17.299	11.902	997	98	-	532	-
2	Banda Sakti	8.506	7.773	2.524	67	-	-	-
3	Mongedong	5.613	2.491	765		-	-	-
4	Blang Mangat	3.339	1.505	705	91	-	-	-
5	Blang Cut	1.362	1.368	171	8	4		-
	Total	36.119	25.039	5.162	264	4	532	-
	Rasio Pengguna air bersih		69,321		0,007		1,472	

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2008

Ket : MS : Memenuhi Syarat

TMS : Tidak Memenuhi Syarat

Selanjutnya selain sumber air bersih yang terdapat pada table 2.61 di atas selebihnya masyarakat Kota Lhokseumawe menggunakan PDAM sebagai sumber air bersih, yaitu sebanyak 5118 rumah atau 14,17 %. Jumlah pelanggan PDAM di Kota Lhokseumawe setiap tahun terjadi peningkatan. Pada tahun 2008 jumlah pelanggan PDAM sebanyak 6.699, untuk tahun 2009 terjadi peningkatan jumlah pelanggan sebanyak 50 pelanggan dari tahun 2008. Sedangkan untuk tahun 2010 jumlah pelanggan sebanyak 6.892 meningkat sebanyak 143 pelanggan dari tahun 2009. untuk lebih jelas dapat dilihat pada **tabel 2.65** berikut ini,

Tabel 2.65
Jumlah Pelanggan Berdasarkan Golongan PDAM
Tahun 2008 - 2010

No.	Golongan	Tahun		
		2008	2009	2010
1	Rumah Tangga	5.858	5.934	6.042
2	Niaga & Industri	717	692	727
3	Instansi Pemerintah	78	76	76
4	Khusus	-	-	-
5	Sosial Khusus	35	37	37
6	Sosial Umum	11	10	10
	Total	6.699	6.749	6.892

Sumber : PDAM Tirta Mon Pase Tahun 2010



Perbandingan jumlah penduduk Kota Lhokseumawe dan jumlah penduduk yang dapat menikmati air bersih pada PDAM, maka dapat dilihat tingkat pelayanan PDAM. Pada tahun 2008 masyarakat yang dapat menikmati air bersih dari PDAM hanya 25,32% saja. Tahun 2009 persentase jumlah penduduk yang menikmati air bersih hanya meningkat 0,11% jumlah peningkatan persentase ini sangat kecil. Pada tahun 2010 penduduk yang dapat menikmati air bersih PDAM 41.352 jiwa artinya hanya 24,16%. untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.66** berikut ini,

Tabel 2.66
Tingkat Pelayanan PDAM
Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2010

No.	URAIAN	2008	2009	2010
1	Jumlah Penduduk	158.760	159.239	171.163
2	Penduduk yg menikmati air (jiwa)	40.194	40.494	41.352
	Persentase (%)	25,32	25,43	24,16

Sumber : PDAM Tirta Mon Pase Tahun 2010

2.3.1.4.2. Rumah tangga pengguna listrik

Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Lhokseumawe bila dilihat dari jumlah desa sebanyak 68 desa maka jumlah desa yang berlistrik sebanyak 68 desa berlistrik sehingga persentase rumah tangga pengguna listrik mencapai 100 persen.

2.3.1.4.3. Rumah tangga ber-Sanitasi

Keadaan Sanitasi Kota Lhokseumawe salah satunya dapat dilihat dari Prilaku Hidup Bersih Sehat. Menurut Survey Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2009 Rumah Tangga ber-Prilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) Kota Lhokseumawe yang dilakukan terhadap 210 sampel rumah di setiap Puskesmas, diketahui bahwa rumah yang ber-Prilaku Hidup Bersih Sehat persentase rata-rata 26,28% dari seluruh Puskesmas. Di wilayah Puskesmas Muara Dua persentase rumah PHBS 31,4 %, di Puskesmas Muara Satu rumah PHBS adalah 44,3 %, Puskesmas Blang Mangat adalah 34,8 %, Puskesmas Blang Cut rumah ber PHBS hanya 3,8 % saja, dan di Puskesmas Banda Sakti adalah 17,1 %. untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.67** berikut ini,

RF

Tabel 2.67
Rumah Tangga Berprilaku Hidup Bersih Sehat
Kota Lhokseumawe Tahun 2009

No	Kecamatan	Puskesmas	Rumah Tangga		
			Jumlah di Pantau	Ber PHBS	%
1	Muara Dua	PKM Muara Dua	210	66	31,4
2	Muara Satu	PKM Muara Satu	210	93	44,3
3	Blang Mangat	PKM Blang Mangat	210	73	34,8
		PKM Blang Cut	210	8	3,8
5	Banda Sakti	PKM Banda Sakti	210	36	17,1
		PKM Mon Geudong	-	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2010

Penggunaan jamban juga merupakan salah satu indikator untuk melihat keadaan sanitasi masyarakat, dari 36.119 rumah yang ada di Kota Lhokseumawe 26.794 rumah menggunakan jamban yang Memenuhi Syarat (MS) atau 78,18 % sedangkan sisanya sebesar 9.325 atau 25,82 % rumah menggunakan jamban yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.68** berikut ini,

Tabel 2.68
Rekapitulasi Pendataan Jamban
Di Kota Lhokseumawe Tahun 2008

No	Puskesmas	Jlh Rumah	Jenis Jamban					
			Leher Angsa		Plenengangan		Cemplung	
			MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS
1	Muara Dua	17.299	13.809	156	-	-	2.195	585
2	Banda Sakti	8.506	6.182	700			-	135
3	Mon Geudong	5.613	861	858			684	1.084
4	Blang Mangat	3.339	1.380	754	29		695	27
5	Blang Cut	1.362	938	189	9		12	133
	Total	36.119	23.170	2.657	38	-	3.586	1.964

Sumber : Buku Putih Sanitasi tahun 2008

2.3.1.4.4. Lingkungan pemukiman kumuh

Catatan terakhir di empat Kecamatan menunjukkan 2.390 unit rumah warga mengalami kerusakan, dimana sekitar 603 unit rumah yang rusak total dan 380 unit yang rusak berat, disamping rumah yang rusak ringan sebanyak 1.409 unit. Secara keseluruhan wilayah pemukiman penduduk yang terkena hempasan gelombang tsunami sekitar 150

hektar. Sebagian besar kerusakan ditemui di Kecamatan Blang Mangat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.69** berikut ini,

Tabel 2.69
Kawasan Kumuh Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2010

No	Kecamatan	Gampong	Luas (km ²)	Luas Kawasan Kumuh (km ²)
1	Banda Sakti	Pusong Lama	0.4	0.400
		Pusong Baro	0.18	0.180
		Keude Cunda	0.5	0.167
		Tumpok Teungoh	1.2	0.400
		Mon Geudong	0.64	0.160
		Jawa Lama	0.6	0.150
		Hagu Selatan	0.56	0.140
		Ujong Blang	1.1	0.275
		Ulee Jalan	0.5	0.167
2	Muara Satu	Blang Nalcung		
		Mameuh	1	0.333
		Batuphat Timur	3	0.750
3	Muara Dua	Batuphat Barat	9.8	2.450
		Keude Cunda	0.22	0.055
4	Blang Mangat	Meunasah Mesjid	6	1.500
		Ulee Blang Mane	2	0.667
		Meunasah Mesjid		
		Peunteut	4	1.333
		Keude Peunteut	0.1	0.033
		Balang Peunteut	2	0.500

Sumber : SK Walikota Penetapan Daerah Kawasan Kumuh Kota Lhokseumawe, 2010

2.3.1.4.5. Rumah layak huni

Program pembangunan rumah layak huni yang kita kenal dengan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian sosial, kementerian perumahan rakyat, kementerian pekerjaan umum dan melalui CSR berbagai perusahaan yang bertujuan membantu masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni membangun kembali rumah layak huni. Program ini belum dapat menyentuh seluruh masyarakat miskin di Provinsi Aceh umumnya dan Kota Lhokseumawe khususnya, namun pada tahun 2013 usulan program kegiatan melalui dana TDBH Migas Dan Otonomi khusus Aceh mewajibkan Kabupaten/ Kota untuk menyisihkan sebesar 10 persen dari total dana Otonomi khusus untuk pembangunan rumah layak huni.

Untuk data Rumah layak huni Kota Lhokseumawe belum tersedia, namun rumah layak huni tersebut sangat dibutuhkan pembangunannya di Kota Lhokseumawe mengingat banyaknya kaum dhuafa yang belum memiliki rumah. Demikian juga dengan masyarakat yang berdomisili di kawasan kumuh Kota Lhokseumawe seperti yang tergambar pada table 2.69 di atas.

2.3.1.5. Penataan Ruang

2.3.1.5.1. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kota Lhokseumawe pada tahun 2008 sebesar 0,0063144 sedangkan pada tahun 2009 sebesar 0.014269 dan pada tahun 2010 sebesar 0.006488 kemudian pada tahun 2011 sebesar 0,00574, untuk lebih jelas dapat dilihat pada **tabel 2.70** berikut ini,

Tabel 2.70
Rasio Bangunan ber-IMB per-Satuan Bangunan
Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2011

No	Uraian	Tahun			
		2008	2009	2010	2011
1	Jumlah bangunan ber-IMB	217	496	227	202
2	Jumlah bangunan Rasio bangunan ber-IMB (1:2)	34366	34760	34987	35189
		0.0063144	0.014269	0.006488	0.00574

Sumber : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2012

2.3.1.6. Perencanaan Pembangunan

2.3.1.6.1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Dalam pembangunan daerah, peran serta dan partisipasi masyarakat memiliki arti yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Melalui penyediaan ruang bagi publik ini diharapkan pembangunan daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Komitmen Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk melaksanakan perencanaan dan pembangunan partisipatif tersebut akan terus dilaksanakan dalam rangka peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah. 14

Kota Lhokseumawe telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025, namun sampai saat ini belum ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan belum di Qanunkan.

2.3.1.6.2.Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lhokseumawe pada periode Tahun 2006-2012 telah disusun dan ditetapkan dengan Qanun Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2008. Untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lhokseumawe periode Tahun 2012-2017 sedang dalam proses penyusunan.

2.3.1.6.3.Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Daerah akan sangat sulit melaksanakan kewajiban mengelola dan melayani kebutuhan masyarakat tanpa adanya rencana kegiatan yang disusun secara cermat dan komprehensif. Penyusunan rencana dimaksud harus mampu mengidentifikasi permasalahan pembangunan secara runtun dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya baik yang berasal dari dinamika internal maupun eksternal. Atas dasar hal tersebut penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi suatu keharusan bagi daerah.

Sinergi pelaksanaan pembangunan daerah yang berkualitas, memerlukan peran serta dan partisipasi berbagai pihak pemangku kepentingan di Kota Lhokseumawe sehingga memiliki arti yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan. Berikut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota

Lhokseumawe Tahun 2010-2013 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe. untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.71** berikut ini,

Tabel 2.71
RKPD Yang Telah Ditetapkan dengan PERDA
Tahun 2010 – 2013

No.	Uraian	Tahun / No. Perda			
		2010	2011	2012	2013
1	RKPD	Peraturan Walikota Nomor : 32 Tahun 2009 tanggal Maret 2009	Peraturan Walikota Nomor : 13 Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010	Peraturan Walikota Nomor : 12 Tahun 2011 tanggal 15 Mei 2011	Peraturan Walikota Nomor : 25 Tahun 2012 tanggal 7 Mei 2012

Sumber :Bappeda Kota Lhokseumawe Tahun 2012

RKPD Kota Lhokseumawe yang akan dipergunakan oleh SKPD sebagai acuan untuk melaksanakan Rencana Kerja pada setiap tahun disusun dengan harapan dapat terjadi keseimbangan serta mempersempit egoisme sektoral dalam pelaksanaannya. Penyusunan RKPD mendasarkan pada fungsi-fungsi pelayanan dasar Pemerintah Daerah yang merupakan analisis usulan dari SKPD. Dari tabel di atas terlihat dari Tahun 2010 sampai Kota Lhokseumawe telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lhokseumawe dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe.

2.3.1.6.4. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Dalam pelaksanaannya RPJMD Kota Lhokseumawe akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan dengan mewujudkan program-program melalui penajaman pada kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan rencana tahunan yang digunakan untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dokumen RPJMD dan RKPD merupakan dokumen yang dijadikan bahan penyusunan RAPBD, terdiri dari program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBK Lhokseumawe. Penjabaran RPJMD yang diawali dengan penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD oleh Kepala Bappeda, yang diikuti secara bersamaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD.

RKPD yang berisi tujuan, sasaran, prioritas, program dan kegiatan adalah hasil dari suatu proses berjenjang yang dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Gampong, Kecamatan hingga Kota.

14

Dengan demikian materi dalam RKPD adalah refleksi dari kebutuhan masyarakat secara *bottom up* yang dipaduserasikan dengan program dan kegiatan yang direncanakan SKPD yang bersifat *top down* yang diselaraskan dengan program dan kegiatan dalam RPJMD. Berdasarkan hasil pepaduserasian, kondisi riil dan dinamika perkembangan masyarakat.

Program Pembangunan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2007 -2011 secara langsung maupun tidak langsung telah memberi manfaat besar kepada masyarakat Kota Lhokseumawe. Disisi lain juga terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut baik dalam penganggaran yang belum melihat pada kebutuhan yang sebenarnya terutama dalam penganggaran untuk program kegiatan SKPK yang belum sepenuhnya mengacu kepada RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2007-2012 sehingga pada akhir tahun anggaran banyak terdapat program kegiatan SKPK yang tidak sesuai dengan Visi dan Misi Walikota terpilih maupun dalam pelaksanaan program kegiatan oleh SKPK belum sepenuhnya berpedoman pada perencanaan pembangunan daerah yang telah disusun sebelumnya seperti halnya Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD)

2.3.1.7. Perhubungan

2.3.1.7.1. Jumlah arus penumpang angkutan umum

Berbicara permasalahan Transportasi di Kota Lhokseumawe kita hanya akan membicarakan transportasi darat karena Kota Lhokseumawe tidak mempunyai Transportasi Laut dan Udara. Arus Transportasi Darat dalam hal ini Kota Lhokseumawe mempunyai armada Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dimana perkembangan jumlah unit dan penumpang setiap tahunnya sedikit mengalami fluktuasi. Hal tersebut jelas terlihat pada tabel dibawah, bahwa jumlah unit kendaraan mengalami penurunan dimana pada tahun 2008 jumlah kendaraan di Kota Lhokseumawe 36,435 unit, tahun 2009 terdapat 37,6114 unit, tahun 2010 mencapai 34,174 unit dan pada tahun 2011 hanya 33,188 unit. Adapun dengan Jumlah Penumpang yang naik turun di Terminal Kota Lhokseumawe Tidak mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan atau dapat dikatakan mengalami fluktuasi yang masih normal dimana pada tahun 2008 jumlah penumpang yang naik 144,573 penumpang dan turun 162,941 penumpang, pada tahun 2010 penumpang yang naik 147,683

14

penumpang dan turun 152,538, sedangkan pada tahun 2011 penumpang yang naik 149,963 penumpang dan yang turun 150,395 penumpang. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan penumpang yang datang ke Kota Lhokseumawe pada setiap tahunnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.72** berikut ini,

Tabel 2.72
Jumlah Kendaraan Dan Arus Penumpang Angkutan Umum
Kota Lhokseumawe Tahun 2008- 2011

Tahun	Unit Kendaraan	Jumlah Penumpang	
		Naik	Turun
2008	36,435	144,573	162,941
2009	37,614	148,733	163,541
2010	34,174	147,683	152,538
2011	33,188	146,936	150,395

Sumber : Dinas Perhubungan, pariwisata dan budaya

2.3.1.7.2. Rasio ijin trayek

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/ atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek terdiri atas jaringan trayek lintas batas negara, jaringan trayek antar Kota antar Provinsi, jaringan trayek antar Kota dalam Provinsi, jaringan trayek perkotaan dan jaringan trayek perdesaan. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Di Kota Lhokseumawe rasio mengalami kenaikan dimana pada tahun 2010 rasio Ijin trayek sebesar 0,0050 dan pada tahun 2011 sebesar 0,0051 dimana mengindikasikan bahwa 1 kendaraan melayani 20 penumpang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.73** berikut ini,

Tabel 2.73
Rasio Ijin Trayek Di Kota Lhokseumawe
Tahun 2010-2011

No	Uraian	2010	2011
1	Jumlah Ijin Trayek	853	895
2	Jumlah penduduk	171,163	17,082
	Rasio Ijin Trayek	0,0050	0,0051

Sumber : Dinas Perhubungan, pariwisata dan budaya Tahun 2012

14

2.3.1.7.3. Jumlah uji kir angkutan umum

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/ atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Pengujian dimaksud meliputi:

- a. Uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.
- b. Uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji.

Di Kota Lhokseumawe, Uji Kir Angkutan Umum terlihat bahwa Jumlah angkutan yang di uji Kir sangat stabil dimana hampir semua kendaraan mengikuti Uji Kir setiap tahunnya, yaitu pada Tahun 2009 kendaraan yang mengikuti Uji Kir adalah 3.024, pada tahun 2010 adalah 3.090 kendaraan, dan pada tahun 2011 adalah sebesar 2.850 kendaraan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.74** berikut ini,

Tabel 2.74
Uji Kir Angkutan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2009-2011

Tahun	Jumlah Kendaraan	Kendaraan Yg Diuji
2009	2905	3047
2010	3053	3090
2011	3140	2850

Sumber : Dinas Perhubungan, pariwisata dan budaya

2.3.1.7.4. Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis

Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Sedangkan Pelabuhan Udara/ Bandara bisa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Kemudian Terminal Bis dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/ atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

14

Di Kota Lhokseumawe hanya terdapat Terminal Bis Prasarana Transportasi bagi penduduk Kota Lhokseumawe dikarenakan belum adanya Pelabuhan Udara dan Laut sebagai prasarana transportasi masyarakat Kota Lhokseumawe seperti yang telah dijelaskan pada sub Arus Penumpang Umum Kota Lhokseumawe diatas. Untuk sementara ini masyarakat Kota Lhokseumawe menggunakan pelabuhan laut dan udara milik Kabupaten Aceh Utara yang lokasinya berada di sekitar wilayah Kota Lhokseumawe Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.75** berikut ini,

Tabel 2.75
Jumlah Pelabuhan Udara, Laut dan Terminal Bis Kota Lhokseumawe Tahun 2009-2011

Tahun	Pelabuhan Udara	Pelabuhan Laut	Terminal Bis
2009	-	-	1
2010	-	-	1
2011	-	-	1

Sumber Dinas Perhubungan, pariwisata dan budaya

2.3.1.7.5. Rasio Angkutan darat

Berbicara tentang Rasio angkutan Penumpang di Kota Lhokseumawe dalam hal ini angkutan bis di Kota Lhokseumawe maka kita harus melihat jumlah angkutan darat yang ada di Kota Lhokseumawe dan jumlah penumpang angkutan tersebut, dimana pada tahun 2010 jumlah angkutan adalah 34,174 dan pada tahun 2011 adalah 22,188. Sedangkan jumlah Penumpang angkutan pada tahun 2010 adalah 300,176 penumpang dan pada tahun 2011 adalah 297,331 penumpang dimana terjadi sedikit penurunan baik pada jumlah angkutan dan juga pada jumlah penumpang angkutan darat di Kota Lhokseumawe. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.76** berikut ini,

Tabel 2.76
Rasio Angkutan Darat Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011

No	Uraian	Tahun	
		2010	2011
1	Jumlah Angkutan Darat	34.174	33.188
2	Jumlah Penumpang Angkutan Darat	300.176	297.331
Rasio Angkutan Darat		0,0312	0,0306

Sumber : Dinas Perhubungan, pariwisata dan budaya Tahun 2011 (diolah)

2.3.1.7.6. Kepemilikan KIR angkutan umum

Persentase kepemilikan KIR bagi setiap kendaraan yang ada di Kota Lhokseumawe belum cukup baik dimana hampir setengah dari kendaraan yang ada di Kota Lhokseumawe belum memiliki Kir atau tidak melakukan uji kir. Tapi bila terlihat bahwasannya setiap tahunnya kendaraan yang belum memiliki Kir semakin berkurang seperti terlihat pada tabel dibawah bahwa pada tahun 2010 persentase Kir adalah 51,20 % dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 53,12 %. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.77** berikut ini,

Tabel 2.77
Kepemilikan KIR Angkutan Umum
Tahun 2010-2011

No	Uraian	Tahun	
		2010	2011
1	Jumlah Angkutan Umum yang memiliki KIR	791	757
2	Jumlah Angkutan Umum	1545	1425
Persentase Kepemilikan KIR angkutan Umum		51,20	53,12

Sumber : Dinas Perhubungan, pariwisata dan budaya

2.3.1.7.7. Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Lhokseumawe mengalami kendala karena tidak adanya peralatan yang memadai untuk melakukan global checking pada setiap kendaraan yang ada. Pada setiap tahunnya petugas yang berwenang dalam melakukan pengujian kelayakan Angkutan umum hanya mengecek administrasi saja, oleh karena itu proses berlangsungnya pengujian tersebut hanya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit saja. Adapun Pengujian kelayakan Angkutan umum di Kota Lhokseumawe dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.78** berikut ini,

Tabel 2.78
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)
Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011

No	Uraian	Tahun	
		2010	2011
1	Periode Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	180 hari	180 hari
2	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	15 menit	15 menit

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Budaya

2.3.1.7.8. Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di setiap Kota/ Kabupaten adalah berbeda-beda dimana kebijakan harga tersebut diatur oleh daerah masing-masing. Untuk Kota Lhokseumawe biaya pengujian kelayakan angkutan umum tergantung dari jenis dari kendaraan yang ada dimana biaya ditentukan dari jenis kendaraan yang ada. Bila dilihat dari biaya pada setiap tahunnya tidak ada penambahan biaya Rp.34.000. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.79** berikut ini,

Tabel 2.79
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
Tahun 2010-2011

No	Uraian	Tahun	
		2010	2011
1	Rata-rata biaya pengujian kelayakan angkutan umum	34.000	34.000

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Budaya

2.3.1.7.9. Pemasangan Rambu-rambu

Rambu-rambu merupakan hal yang penting bagi kelancaran lalu lintas ataupun untuk mengetahui tempat/ lokasi yang ingin dicari oleh para pendatang/ wisatawan ketika berkunjung disuatu Kota/ Kabupaten. Oleh karena itu rambu-rambu merupakan sebuah petunjuk maupun peringatan bagi setiap orang. Di Kota Lhokseumawe jumlah rambu-rambu belum tersedia dengan maksimal dimana dari jumlah rambu-rambu yang harusnya tersedia diseluruh elemen Kota Lhokseumawe yaitu 800 hanya tersedia 285 rambu pada tahun 2010 dan 387 rambu pada tahun 2011 atau hanya 35,65 % pada tahun 2010 dan 48,38 % pada tahun 2011. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.80** berikut ini,

Tabel 2.80
Pemasangan Rambu-rambu
Tahun 2010-2011

No	Uraian	Tahun	
		2010	2011
1	Jumlah Pemasangan rambu-rambu	285	387
2	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	800	800
Persentase Rasio Pemasangan Rambu-rambu		35,65	48,38

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Budaya

2.3.1.8. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup sebagaimana dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan yang tercemarkan mengakibatkan hal yang fatal bagi manusia, misalnya air yang dicemari oleh limbah cair dari pabrik, udara yang dikotori oleh banyaknya asap kendaraan dan asap pabrik, dan juga limbah yang berasal dari medis ini akan mengakibatkan penyakit antara lain kanker, gangguan sistem syaraf, hepatitis, pembengkakan hati dan gejala depresi.

2.3.1.8.1. Persentase penanganan sampah

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan/ dibuang sebagai hasil dari aktivitas manusia maupun hasil aktivitas alam yang tidak/ belum memiliki nilai ekonomis. Jenis sampah yang dihasilkan bermacam-macam bentuk dan jenisnya. Secara garis besar sampah dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: sampah kering atau sampah anorganik, sampah basah atau sampah organik dan sampah berbahaya. Sampah-sampah tersebut perlu adanya penanganan yang serius. Tujuan dan manfaat penanganan sampah/ pengelolaan sampah merupakan langkah-langkah yang dilakukan dengan tujuan mengubah sampah material yang tidak berguna menjadi material yang memiliki nilai ekonomis dan mengolah sampah menjadi material yang tidak membahayakan lingkungan hidup.

Untuk Penanganan sampah di Kota Lhokseumawe masih dirasa sangat minim. Ini dapat dilihat dari jumlah sampah yang diproduksi dan jumlah sampah yang ditangani dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011. Pada tahun 2006 jumlah sampah yang ditangani 84.651,58 M³ dan jumlah sampah yang diproduksi sebanyak 142.857,35 M³ persentasenya 1,69%. Sedangkan pada tahun 2007 jumlah sampah yang dapat ditangani sebanyak 85.498,10 M³, jumlah sampah yang diproduksi 144.329,21 M³ persentasenya adalah sebesar 1,69%. Untuk tahun 2008 jumlah sampah yang ditangani sebanyak 86.353,08 M³ dan jumlah sampah yang diproduksi 144.868,50 M³ persentasenya hanya sebesar

74

1,68%. Tahun 2009 ada penurunan persentase dari tahun sebelumnya yaitu 1,67% dengan jumlah sampah yang ditangani sebanyak 87.216,61 M³ dan jumlah sampah yang diproduksi sebanyak 145.305,59 M³. Pada tahun 2010 jumlah sampah yang ditangani sebanyak 88.088,77 M³ dengan jumlah sampah yang diproduksi 145.739,94 M³ persentasenya sebesar 1,65%. Tahun 2011 persentasenya sebesar 1,64% dengan jumlah sampah yang ditangani 88.969,66 M³ dan jumlah sampah yang diproduksi sebanyak 146.128,66 M³, Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.81** berikut ini,

Tabel 2.81
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah
Tahun 2006 s/d 2011

No	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Sampah Yang Terangkut	84.652	85.498	86.353	87.217	88.088	88.970
2	Jumlah Timbunan Sampah	141.149	142.694	143.340	143.823	148.214	144.387
	Persentase	59,97%	59,92%	60,24%	60,64%	59,43%	61,62%

Sumber: Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Lhokseumawe Tahun 2012

Dari uraian data di atas dapat dilihat persentase penanganan sampah yang terangkut di Kota Lhokseumawe dari tahun 2006 s.d 2011 meningkat walaupun tidak signifikan.

2.3.1.8.2. Persentase Penduduk berakses air minum

Permasalahan air bersih di Kota Lhokseumawe dapat kita lihat dari bagaimana pola masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersihnya. Masyarakat menggunakan berbagai macam cara dalam memenuhi kebutuhan airnya. Dari data profil kesehatan lingkungan terlihat bahwa sebanyak 25.039 atau 82,91% rumah menggunakan sumur gali (pada kategori memenuhi syarat). Sedangkan rumah yang menggunakan sumur gali yang tidak memenuhi syarat sebanyak 5.162 atau 17,09% rumah. Metode lain yang digunakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersihnya adalah dengan mengandalkan sumur pompa. Masyarakat yang menggunakan sumur pompa ini sebanyak 264 rumah atau 98,51% dan berada dalam kondisi memenuhi syarat. Namun ada juga masyarakat yang menggunakan sumur pompa tetapi tidak

14

memenuhi syarat sebanyak 4 rumah atau 1,49%. Sumber air bersih lainnya yang digunakan oleh masyarakat adalah PAH (Penampungan Air Hujan). Jumlah rumah yang menggunakan PAH tersebut sebanyak 523 rumah dengan kondisi memenuhi syarat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.82** berikut ini

Tabel 2.82
Hasil Rekapitulasi Pendataan Sumber Air Bersih (SAB)
Di Wilayah Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2008

No.	Puskesmas	Jumlah Rumah	Jenis Sarana Air Bersih					
			Sumur Gali		Sumur Pompa		PAH	
			MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS
1	Muara Dua	17.299	11.902	997	98	-	532	-
2	Banda Sakti	8.506	7.773	2.524	67	-	-	-
3	Monggeudong	5.613	2.491	765		-	-	-
4	Blang Mangat	3.339	1.505	705	91	-	-	-
5	Blang Cut	1.362	1.368	171	8	4		-
Total		36.119	25.039	5.162	264	4	532	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2008

Ket : MS : Memenuhi Syarat

TMS : Tidak Memenuhi Syarat

2.3.1.8.3. Persentase Luas pemukiman yang tertata

Dari luas permukiman Kota Lhokseumawe yang mencapai lebih dari 60% dari penggunaan lahan yang ada, hanya sebagian kecil saja permukiman yang telah tertata secara baik. Kawasan tersebut dibangun oleh pihak developer atau pengembang maupun oleh pihak lainnya. Sebagai contoh PT. Arun membangun kawasan perumahan yang hanya diperuntukan bagi karyawannya saja dengan fasilitas yang lengkap dari jaringan air bersih, jaringan jalan, hingga pelayanan pendidikan serta kesehatan yang ditata dengan konsep kota mandiri.

Selain itu juga beberapa asrama TNI/ Polri dan instansi vertikal lainnya, yang telah dibangun tapi masih dalam skala kecil. Untuk kawasan perumahan lain yang telah dibangun sebagian besar tersebar pada Kecamatan Blang Mangat yang meliputi kawasan Bukit Rata Gampong Alue Awe, Komplek Mutiara, Blang Crum yang dibangun oleh BRR dan *Save the Children's* bagi korban tsunami yang mencapai 300 unit rumah dan beberapa kawasan lainnya. Pada Kecamatan Muara Dua kawasan permukiman yang telah terbangun meliputi sebagian Gampong

Meunasah Mesjid dan Uteun Kot yang dibangun pihak *developer*. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.83** berikut ini,

Tabel 2.83
Persentase Luas Permukiman yang Tertata
Kota Lhokseumawe

No.	Uraian	2010	2011
1	Luas Area Permukiman yang tertata	507	507
2	Luas Area permukiman keseluruhan	18.061	18.061
Persentase (%)		2,81	2,81

Sumber :Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2012

2.3.1.8.4.Pencemaran status mutu air

Status mutu air adalah kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan terhadap baku mutu air yang ditetapkan. Banyak cara untuk melakukan penilaian status mutu air pada suatu sumber air, yaitu diantaranya yang disajikan dalam KepMen LH No. 115/2003, tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air, yaitu dengan Metoda Storet dan Metoda Indeks Pencemaran.

Dari hasil kajian status mutu air menunjukkan bahwa sumber-sumber air pada umumnya masih berstatus tercemar ringan sampai dengan memenuhi baku mutunya. Namun khusus untuk ruas-ruas sungai yang merupakan badan air penampungan untuk kegiatan penduduk, pertanian ataupun industri pada umumnya telah tercemar *sedang sampai berat*.

Kota Lhokseumawe memiliki 2 (dua) sungai besar yang berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat, yakni Krueng Cunda dan Krueng Geukuh yang berada antara perbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara. Pada Krueng Cunda pencemaran yang terjadi akibat buangan limbah cair dari rumah maupun limbah medis dari rumah sakit dan puskesmas yang pembuangan tanpa ada proses penetralisir limbah cair. Sedangkan pada Krueng Geukuh pencemaran bersumber dari insektisida dan pestisida yang berasal dari sawah milik petani gampong Ujong Pacu dan sekitarnya.

Berbagai strategi baik penegakan hukum ataupun program yang bersifat khusus yaitu seperti program kali bersih, dan program-program lainnya belum mampu merubah kualitas air menjadi lebih baik.

RF

Berdasarkan strategi pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air untuk kondisi seperti ini perlu dilakukan program mutu air sasaran yang perlu diprogramkan secara seksama agar setiap tahapan prosesnya untuk memperbaiki satu tingkat kelas air di atasnya dapat tercapai. pengendalian pencemaran air secara terpadu yang dilakukan dengan cara optimasi pemanfaatan airnya dengan sistem yang terkoordinasi secara baik dalam melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang mempunyai komitmen tinggi untuk melaksanakan programnya serta pelaksanaan pengawasan yang tegas untuk mencapai tujuan akhir status mutu air. Parameter Kualitas Air yang digunakan untuk kebutuhan manusia haruslah air yang tidak tercemar atau memenuhi persyaratan fisika, kimia, dan biologis.

2.3.1.8.5. Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air

Bencana longsor dapat dikurangi dampaknya apabila masyarakat memahami karakteristik wilayah rawan bencana, objek yang rentan bahaya, dan kapasitas individu serta masyarakat dalam menghadapi bencana. Akan tetapi, sebagian besar penduduk masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertambangan galian C yang berada pada wilayah perbukitan pada Gampong Paloh dan Blang Panyang Kecamatan Muara Satu 3 tipe longsor lahan di daerah dalam bentuk jatuhan bahan rombakan, longSORan bahan rombakan, longSORan tanah, dan sedimentasi endapan tanah. Namun, dari berbagai tipe tersebut lebih banyak didominasi longSORan tanah. Besarnya luasan longSOR lahan dipengaruhi oleh curah hujan, ketebalan lapukan batuan, dan kemiringan lereng.

Selama ini pihak Pemerintah kota Lhokseumawe belum melakukan tindakan *preventif* dan *defentif* sehingga permasalahan longsor ini masih berlanjut. Untuk tahun 2013 pemerintah akan berupaya untuk membangun tanggul sedimentasi yang akan melindungi badan jalan dari bahaya tergelincirnya kendaraan yang ada. Untuk jangka panjangnya perlu dilakukannya reboisasi atau penutup lahan dengan vegetasi. Diharapkan dapat mengurangi angka *runoff* atau limpasan yang akan mempengaruhi longsor yang ada.

14

2.3.1.8.6.Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk

Pada tahun 2006 jumlah TPS sebanyak 5 TPS dengan jumlah daya tampung sebanyak 142.857,35 ton, pada Tahun 2007 jumlah TPS bertambah menjadi 16 jumlah daya tampung 144.329,21 ton dari jumlah penduduk 158.169 jiwa. Tahun 2008 daya tampungnya 144.868,50 ton meningkat sebesar 539.290 ton dari tahun 2007 dengan jumlah TPS sebanyak 16 dari jumlah penduduknya sebanyak 158.760 jiwa. Di tahun 2009 jumlah TPS bertambah satu dari 16 menjadi 17 dengan jumlah daya tampung sampah sebanyak 145.305,59 ton dari jumlah penduduk 159.239 jiwa dan. Pada Tahun 2010 terjadi penambahan TPS menjadi 18 dengan jumlah daya tampung sampah sebanyak 145.739,94 ton dari jumlah penduduk 159.715 jiwa. Tahun 2011 jumlah TPS sebanyak 18 dengan daya tampung TPS nya sebanyak 146.128,66 ton dari jumlah penduduk 160.141 jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.84** berikut ini,

Tabel 2.84
Jumlah Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk
Tahun 2006 s/d 2011

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah TPS	15	16	16	17	18	18
2	Jumlah Daya Tampung TPS	142.857,35	144.329,21	144.868,50	145.305,59	145.739,94	146.128,66
3	Jumlah penduduk (Jiwa)	156.556	158.169	158.760	159.239	159.715	160.141
	Rasio TPS terhadap Jumlah Penduduk	91,250	91,249	91,250	91,250	91,250	91,248

Sumber : Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Lhokseumawe Tahun 2011

2.3.1.9. Pertanahan

2.3.1.9.1.Persentase luas lahan bersertifikat

Persentase luas lahan bersertifikat di Kota Lhokseumawe setiap tahunnya terus meningkat. Berdasarkan tabel dibawah dapat kita lihat pada tahun 2007 persentase luas lahan bersertifikat sebesar 0.22 persen meningkat menjadi 1.97 persen pada tahun 2011. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.85** berikut ini,

28

Tabel 2.85
Persentase luas tanah bersertifikat di Kota Lhokseumawe
Tahun 2007 s.d 2011

No	Uraian	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Luas wilayah daratan	181,060,000	180,669,512	180,595,922	180,101,245	177,881,804
2	Luas tanah bersertifikat HGB		2,927	362,361	2,596	
3	Luas tanah bersertifikat HGU	0	0	0	0	0
4	Luas tanah bersertifikat HM	394,349	589,663	458,441	907,619	219,441
5	Luas tanah bersertifikat HPL	0	0	0	0	0
6	Luas tanah bersertifikat HP	1,743	80,000	7,949	473,156	
7	Total luas tanah bersertifikat	396,092	1,068,682	1,897,433	3,280,804	3,500,245
8	Prosentase HGB dibanding luas daratan	0.0000	0.0016	0.2006	0.0014	0.0000
9	Prosentase HGU dibanding luas daratan	0	0	0	0	0
10	Prosentase HM dibanding luas daratan	0.22	0.33	0.25	0.50	0.12
11	Prosentase HPL dibanding luas daratan	0	0	0	0	0
12	Prosentase HP dibanding luas daratan	0.0010	0.0443	0.0044	0.2627	0.0000
13	Prosentase total luas lahan bersertifikat	0.22	0.59	1.05	1.82	1.97

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe Tahun 2011

2.3.1.10. Kependudukan dan Catatan Sipil

2.3.1.10.1. Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk

Rasio penduduk Kota Lhokseumawe yang ber KTP semakin lama semakin meningkat. Hal ini terlihat dari angka 12.80 persen pada tahun 2006 meningkat menjadi 77.96 pada tahun 2009. Pada tahun tahun 2010 terjadi penurunan sebesar 4.15 persen yaitu dari angka 77.96 persen menjadi 73.81 persen. Begitu pula pada tahun 2011 terjadi penurunan sebesar 15.46 persen dari tahun 2010. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.86** berikut ini,

Tabel 2.86
Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk di Kota Lhokseumawe
Tahun 2006 s.d 2011

No	Uraian	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah penduduk usia > 17 yang berKTP	20,034	119,682	121,897	124,148	126,332	102,162
2	Jumlah penduduk	156,556	158,169	158,760	159,239	171,163	175,082
3	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	12.80	75.67	76.78	77.96	73.81	58.35

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe Tahun 2011

2.3.1.10.2. Rasio bayi berakte kelahiran

Rasio bayi berakte kelahiran di Kota Lhokseumawe mengalami perubahan angka setiap tahunnya. Rasio terendah terlihat pada tahun 2007 yaitu sebesar 5.47 persen sedangkan rasio tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 19.196 persen. Hal ini dikarenakan pada tahun 2010 adanya kebijakan bahwa biaya pembuatan akte kelahiran digratiskan bagi masyarakat secara nasional. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.87** berikut ini,

Tabel 2.87
Rasio bayi berakta kelahiran di Kota Lhokseumawe
Tahun 2006 s.d 2011

No	Uraian	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran	9,251	5,993	7,397	8,268	19,196	6,701
2	Jumlah penduduk yang telah menikah	108,524	109,643	110,234	110,205	116,211	118,872
Rasio bayi berakte kelahiran		8.52	5.47	6.71	7.50	16.52	5.64

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe Tahun 2012

2.3.1.10.2. Kepemilikan KTP

KTP merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh NKRI. KTP wajib dimiliki oleh penduduk yang telah berumur 17 tahun keatas atau telah kawin atau pernah menikah. Masa berlakunya KTP adalah 5 tahun kecuali penduduk yang berusia 60 tahun ke atas diberi KTP yang berlaku seumur hidup. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.88** berikut ini,

Tabel 2.88
Kepemilikan KTP di Kota Lhokseumawe
Tahun 2006 s.d 2011

No	Uraian	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah penduduk yang memiliki KTP	20,034	119,682	121,897	124,148	126,332	102,162
2	Jumlah penduduk wajib KTP > 17 atau pernah/sudah menikah	108,524	109,643	110,234	110,205	116,211	118,872
3	Kemilikan KTP	18.46	109.16	110.58	112.65	108.71	85.94

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe Tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kepemilikan KTP pada tahun 2006 sebesar 18.46 persen. Angka ini terus meningkat hingga tahun 2009 sebesar 112.65 persen. Pada tahun 2010 turun menjadi 108.71 persen, sedangkan pada tahun 2011 kembali terjadi penurunan menjadi 85.94 persen.

2.3.1.10.3. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

Akte Kelahiran merupakan surat identitas resmi pertama yang dipunyai oleh seorang manusia di dunia ini. Akte kelahiran itu dibuat dengan berpatokan pada surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit bersalin tempat bayi tersebut dilahirkan. Akte kelahiran tersebut digunakan sebagai dasar penulisan surat-surat resmi penting yang lain. Mulai dari Ijazah Sekolah, KTP, Pasport, sampai ke Buku Nikah dan dokumen-dokumen penting lainnya. Sehingga penulisan nama yang benar di dalam akte kelahiran menjadi sangat krusial sifatnya. Akte dapat kita peroleh di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.89** berikut ini,

Tabel 2.89
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk di Kota Lhokseumawe
Tahun 2006 s.d 2011

No	Uraian	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran	9,251	5,993	7,397	8,268	19,196	6,701
2	Jumlah penduduk	156,556	158,169	158,760	159,239	171,163	175,082
3	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	5.91	3.79	4.66	5.19	11.22	3.83

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe Tahun 2012

Pada Tahun 2006 persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran di Kota Lhokseumawe mencapai angka 5,91 persen. Angka tersebut mengalami penurunan menjadi 3,79 persen pada tahun 2007. Pada tahun 2008 dan 2009 kembali meningkat menjadi yaitu 4,66 persen dan 5,19 persen. Namun pada tahun 2010 terjadi peningkatan yang cukup tinggi yaitu dari angka 5,19 menjadi 11,22 persen.

Hal ini dikarenakan adanya pembuatan Akta Kelahiran Istimewa massal yaitu akte kelahiran yang diperoleh setelah melewati batas waktu pelaporan peristiwa kelahiran dan tidak dipungut biaya. Namun pada tahun 2011 kembali mengalami penurunan yang cukup jauh menjadi 3,83 persen. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.90** berikut ini,

Tabel 2.90
Kepemilikan akta Kelahiran per 1000 Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2006-2011

No	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah Penduduk	156.556	158.169	158.760	159.239	171.163	175.082
2	Jumlah Penduduk memiliki akta kelahiran	9.251	5.993	7.397	8.268	19.196	6.701
	persentase	16,92	26,39	21,46	19,26	8,92	26,13

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2012

Pada Tahun 2006 persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran di Kota Lhokseumawe mencapai angka 16,92. Angka tersebut mengalami peningkatan menjadi 26,39 pada tahun 2007. Namun pada tahun 2008 terjadi fluktuasi angka dari angka 26,39 menjadi 19,26. Bahkan pada tahun 2010 hanya mencapai angka 8,92. Walaupun demikian angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2011 menjadi 26,13.

2.3.1.10.4. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kota Lhokseumawe telah mulai berlaku setelah pergantian KTP Merah Putih yaitu pada tahun 2006. Pada tahun 2012 terjadi pergantian KTP Nasional menjadi KTP elektronik atau e-KTP. Hampir 90 persen penduduk Kota Lhokseumawe telah memiliki dan/ atau telah mengaktifkan e-KTP. Dengan demikian penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kota Lhokseumawe telah berhasil dengan baik.

2.3.1.11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.3.1.11.1. Rasio KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.91** berikut ini,

Tabel 2.91
Rasio KDRT Kota Lhokseumawe
Tahun 2006 s.d 2011

No	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah KDRT		3	22	26		18
2	Jumlah RT	33.627	33.995	34.149	34.264	38.673	39.784
	Rasio KDRT	0,000	0,009	0,064	0,076	0,000	0,045

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Lhokseumawe Tahun 2012

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia menunjukkan jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian secara umum rasio KDRT di Kota Lhokseumawe bisa dikatakan masih sangat rendah. Hal ini bisa dilihat dari angka yang tidak mencapai angka 1 digit. Pada tahun 2006 dan tahun 2010 angka KDRT di Kota

Lhokseumawe bahkan hanya angka nol. Angka KDRT tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu pada angka 0,076.

2.3.1.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

2.3.1.12.1. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Gerakan KB Nasional selama ini telah berhasil mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam membangun keluarga kecil yang makin mandiri. Keberhasilan ini mutlak harus diperhatikan bahkan terus ditingkatkan karena pencapaian tersebut belum merata. Makin tinggi pertumbuhan penduduk semakin mempersulit usaha peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk semakin besar usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu Pemerintah terus berupaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan Program Keluarga Berencana. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.92** berikut ini,

Tabel 2.92
Rata-rata jumlah anak per keluarga Tahun 2006 s.d 2011
Kota Lhokseumawe

N	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah Anak	50.671	135.97 2	121.22 4	104.92 6	105.20 9	107.82 6
2	Jumlah Keluarga	12.665	33.938	34.635	34.808	34.969	35.909
	Rata-Rata Jumlah anak per Keluarga	4	4	4	3	3	3

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Lhokseumawe Tahun 2012

Secara umum jumlah anak per keluarga di Kota Lhokseumawe mencapai 4 anak berkeluarga. Hal ini terlihat pada tahun 2006, 2007 dan 2008. Namun pada tahun 2009, 2010 dan tahun 2011 jumlah anak per keluarga di Kota Lhokseumawe terjadi penurunan menjadi 3 anak per keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa program KB Nasional di Kota Lhokseumawe telah berhasil mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam membangun keluarga kecil yang mandiri.

2.3.1.12.2. Rasio akseptor KB

Program KB dirintis sejak tahun 1951 dan terus berkembang sehingga terbentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program ini salah satunya bertujuan sebagai penjarangan kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi dan menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat melalui

usaha-usaha perencanaan dan pengendalian penduduk. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.93** berikut ini,

Tabel 2.93
Rasio Akseptor KB
Tahun 2006 s.d 2011 Kota Lhokseumawe

No	Uraian	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah Akseptor KB	17,321	18,287	18,380	18,928	19,306	21,010
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	23,997	24,286	24,382	24,484	24,573	26,190
	Rasio Aseptor KB	72.18	75.30	75.38	77.31	78.57	80.22

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Lhokseumawe Tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio akseptor KB di Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan di setiap tahunnya, yaitu dari 72.18 persen pada tahun 2006 menjadi 80.22 persen pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa program KB Nasional di Kota Lhokseumawe sudah berhasil di terapkan namun pencapaiannya belum merata.

2.3.1.12.3. Cakupan peserta KB aktif

Peserta KB aktif di Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini terlihat dari angka cakupan peserta KB aktif yang telah mencapai angka 95.28 persen. Dengan demikian program KB Nasional telah terlaksana dengan baik di masyarakat kota Lhokseumawe. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.94** berikut ini,

Tabel 2.94
Cakupan peserta KB aktif di Kota Lhokseumawe
Tahun 2011

No	Uraian	Jumlah Penduduk Peserta KB		
		PUS	Peserta KB	Rasio
1	Cakupan Peserta KB Aktif	25,190	24,955	95.28

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Lhokseumawe Tahun 2012

Jumlah penduduk peserta KB di Kota Lhokseumawe Tahun 2011 sebesar 24.586 jiwa , adapun peserta yang tidak mengikuti KB sebesar 1.604 jiwa dari total peserta usia subur di Kota Lhokseumawe sebanyak 25.190 jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.95** berikut ini,

Tabel 2.95
Jumlah Penduduk Peserta KB
Tahun 2011 Kota Lhokseumawe

No	Uraian	Jumlah Penduduk Peserta KB		
		PUS	Peserta KB	Tidak KB
1	Penduduk Peserta KB	25,190	24,586	1,604

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan Kota Lhokseumawe Tahun 2012

2.3.1.13. Ketenagakerjaan

2.3.1.13.1. Angka partisipasi angkatan kerja

Konsep dan definisi Angkatan Kerja yang digunakan mengacu kepada *The Labor Force Concept yang disarankan oleh International Labor Organization (ILO)*. Konsep ini membagi penduduk usia kerja (digunakan 15 tahun ke atas) dan penduduk bukan usia kerja (kurang dari 15 tahun).

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, pada Aceh Info 2012 mengungkapkan Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Termasuk Dalam Kelompok Angkatan Kerja di Kota Lhokseumawe pada tahun 2012 mencapai 74.054 Jiwa meningkat 4.317 jiwa dibandingkan dengan Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Termasuk Dalam Kelompok Angkatan Kerja pada tahun 2007 yaitu sebesar 69.737 jiwa.

Tabel 2.96
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Termasuk Dalam
Kelompok Angkatan Kerja (jiwa)

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Provinsi Aceh	1.742.185	1.793.410	1.897.922	1.938.519	2.001.259
2	Lhokseumawe	69.737	58.825	62.036	66.326	74.054

Sumber : Badan Pusat Statistik, Aceh Info 2012

2.3.1.13.2. Tingkat partisipasi angkatan kerja

Rasio antara Angkatan Kerja dengan Jumlah Penduduk Usia Kerja dikenal dengan istilah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yang merupakan besarnya Jumlah Penduduk masuk didalam Pasar Kerja.

Analisis Angkatan Kerja dalam kaitannya dengan kondisi perekonomian merupakan hal yang menarik untuk dilakukan karena tingkat dan pola partisipasi angkatan kerja cenderung bergantung pada ketersediaan kesempatan kerja dan perbedaan pada tuntutan memperoleh pendapatan antar kelompok penduduk. Misalnya, partisipasi

14

perempuan dalam angkatan kerja cenderung berbeda antar kelompok umur, menurut status perkawinan dan perbedaan tingkat pendidikan. Jadi, dibandingkan dengan laki-laki, tingkat partisipasi perempuan cenderung lebih rendah, tidak hanya karena peran ganda mereka dalam rumah tangga di sebagian besar Negara berkembang, tetapi juga berkaitan dengan komitmen perempuan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja selama kehidupannya. Perempuan cenderung keluar dari pasar kerja ketika mereka memasuki masa perkawinan, melahirkan dan membesarkan anak, dan kemudian kemungkinan mereka akan kembali ke dunia kerja ketika anak-anak sudah cukup besar. Meningkatnya pencapaian tingkat pendidikan perempuan juga biasanya diikuti oleh meningkatnya tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Selanjutnya perbedaan besaran angkatan kerja juga bervariasi antar desa dan kota yang salah satunya disebabkan adanya perbedaan kesempatan memperoleh pendapatan.

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Aceh umumnya dan khususnya di Kota Lhokseumawe dalam 5 (lima) tahun terakhir (2007-2012) menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Peningkatan jumlah kesempatan kerja yang tercipta turut mendukung kondisi tersebut. Hal ini ditandai dengan peningkatan yang cukup signifikan pada kelompok penduduk yang termasuk kategori angkatan kerja. Menurut data dari Badan Pusat Statistik yang dirangkum dalam Aceh Info 2012, persentase jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Lhokseumawe pada tahun 2012 sebesar 62,07 persen dibandingkan jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi sebesar 63,78 persen terjadi selisih angka sebesar 1,71 persen Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Lhokseumawe sudah baik, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.97 berikut ini,

Tabel 2.97
Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Lhokseumawe dan Provinsi Aceh Tahun 2007-2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Provinsi Aceh	62,12	60,32	62,50	63,17	63,78
2	Kota Lhokseumawe	61,42	52,32	54,61	57,73	62,07

Sumber : Badan Pusat Statistik, Aceh Info 2012

RP

2.3.1.13.3. Tingkat pengangguran terbuka

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT memberikan indikasi besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya contohnya kriminalitas. Sebaliknya semakin rendah angka pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat. Sangatlah tepat jika pemerintah seringkali menjadikan indikator ini sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Untuk Provinsi Aceh khususnya Kota Lhokseumawe, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan yang sangat signifikan dimana pada setiap tahunnya Tingkat Pengangguran Terbuka terus mengalami penurunan yang drastis yaitu hampir sekitar 75 persen tingkat penurunannya, dimana pada tahun 2007 Tingkat Pengangguran Terbuka adalah sebesar 18,71 persen dan pada Tahun 2012 Tingkat Pengangguran Terbuka menurun hingga hanya tinggal 7,63 persen saja. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Lhokseumawe cukup berhasil dalam mengatasi Kesempatan Bekerja bagi masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.98** berikut ini,

Tabel 2.98
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kota Lhokseumawe dan Provinsi Aceh Tahun 2007-2011

No	Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011
1	Provinsi Aceh	9,84	9,56	8,71	8,37	7,43
2	Kota Lhokseumawe	18,71	14,35	13,26	11,83	7,63

Sumber : Badan Pusat Statistik, Aceh Info 2012

14

2.3.1.14. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sektor Koperasi merupakan sektor yang cukup strategis dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi mengingat bahwa penyebaran jumlah koperasi di Kota Lhokseumawe tahun 2011 adalah sebanyak 282 unit dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 160 unit dan koperasi yang tidak aktif sebanyak 120 unit. Koperasi yang ada di Kota Lhokseumawe bergerak pada sektor perdagangan/ jasa, pertanian, industri, perikanan dan kelautan, sektor transportasi serta sektor riil lainnya. Secara umum koperasi Kota Lhokseumawe adalah Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam (KSP/ USP) yang ditujukan pada pemenuhan kebutuhan modal usaha bagi usaha kecil menengah dan pemenuhan kebutuhan konsumtif.

Pemerintah Kota Lhokseumawe di bawah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi melakukan upaya-upaya pembinaan untuk memberikan nilai positif dalam perkembangan perkoperasian Kota Lhokseumawe khususnya sehingga kemandirian koperasi sebagai pelaku ekonomi akan membantu Pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi rakyat sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kota Lhokseumawe.

Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) juga merupakan salah satu sektor yang cukup strategis dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan usaha-usaha produktif bagi masyarakat. Namun demikian, sektor ini belum berkembang secara optimal.

2.3.1.14.1. Populasi Koperasi

Koperasi yang ada di Kota Lhokseumawe sebanyak 272 koperasi yang terdiri dari Koperasi Pegawai Negeri (KPN) sebanyak 29 koperasi, Koperasi Karyawan (Kopkar) sebanyak 35 koperasi, Primkopad terdiri dari 6 koperasi, Koperasi Unit Desa (KUD) sebanyak 5 koperasi, Koperasi Serba Usaha (KSU) sebanyak 25 koperasi, Koperasi Konsumsi sebanyak 15 koperasi, Koperasi Beasiswa sebanyak 2 koperasi, Koperasi Niaga sebanyak 13 koperasi, Koperasi Pedagang Pasar (Koppas) sebanyak 13 koperasi, Koperasi Pedagang Kecil sebanyak 6 koperasi, Koperasi Wanita (Kopwan) sebanyak 21 koperasi, Koperasi Industri dan Kerajinan (Kopinkra) sebanyak 24 koperasi, Koperasi Pemuda sebanyak 4 koperasi, Kopti sebanyak 1 koperasi, Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) sebanyak 10 koperasi, Koperasi Angkutan sebanyak 8

koperasi. Koperasi Nelayan dan dan Perikanan sebanyak 25 koperasi. Koperasi Peternakan sebanyak 8 koperasi. Koperasi Pertanian sebanyak 20 koperasi. Koperasi Simpan Pinjam sebanyak 1 koperasi. Koperasi Pengusaha sebanyak 1 koperasi. Koperasi Perbengkelan sebanyak 2 koperasi. Koperasi Konsultan sebanyak 1 koperasi.

2.3.1.14.2. Persentase koperasi aktif

Jumlah Koperasi di Kota Lhokseumawe hingga tahun 2011 jumlah koperasi 282, koperasi yang aktif berjumlah 160 sedangkan yang tidak aktif sebanyak 122 dengan persentase 56,74%. Hal ini mengindikasikan bahwa koperasi Kota Lhokseumawe masih belum beraktifitas seperti yang diharapkan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.99** berikut ini,

Tabel 2.99
Persentase Koperasi Aktif
Tahun 2006 s/d 2011

No.	URAIAN	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah Koperasi Aktif	49	83	135	136	140	160
2	Jumlah Koperasi	90	177	242	262	272	282
	Persentase (%)	54,44	46,89	55,79	51,91	51,47	56,74

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Tahun 2012

2.3.1.14.3. Jumlah Anggota Koperasi

Jumlah anggota koperasi Kota Lhokseumawe sampai dengan tahun 2011 sebanyak 12.102 orang yang terdiri dari 8.803 orang laki-laki dan 3.211 orang perempuan. Koperasi yang ada di Kota Lhokseumawe terdiri dari Koperasi Pegawai Negeri (KPN) sebanyak 29 koperasi dengan jumlah anggota koperasi sebanyak 1.435 orang, Koperasi Karyawan (Kopkar) sebanyak 35 koperasi jumlah anggota koperasi sebanyak 1.842 orang, Primkopad terdiri dari 6 koperasi dengan jumlah anggotanya sebanyak 1.154 orang, Koperasi Unit Desa (KUD) sebanyak 5 koperasi jumlah anggotanya sebanyak 299 orang, Koperasi Serba Usaha (KSU) sebanyak 25 koperasi jumlah anggotanya 1.377 orang, Koperasi Konsumsi sebanyak 15 koperasi dengan jumlah anggotanya 390 orang, Koperasi Beasiswa sebanyak 2 koperasi dengan jumlah anggotanya 103 orang, Koperasi Niaga sebanyak 13 koperasi dengan jumlah anggotanya 410 orang, Koperasi Pedagang Pasar (Koppas) sebanyak 13 koperasi

14

jumlah anggotanya 338 orang, Koperasi Pedagang Kecil jumlah koperasinya 6 koperasi dan jumlahnya 224 orang, Koperasi Wanita (Kopwan) sebanyak 21 koperasi dan jumlah anggotanya 1.057 orang, Koperasi Industri dan Kerajinan (Kopinkra) sebanyak 24 koperasi dengan jumlah anggotanya 829 orang, Koperasi Pemuda jumlah koperasinya sebanyak 4 koperasi dan jumlah anggotanya 144 orang, KOPTI jumlah koperasi hanya 1 koperasi saja dan anggotanya sebanyak 22 orang, Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) sebanyak 10 koperasi dengan jumlah anggotanya 354 orang, Koperasi Angkutan sebanyak 8 koperasi dan jumlah anggotanya 265 orang, Koperasi Nelayan dan Perikanan terdiri dari 25 koperasi dengan jumlah anggotanya 814 orang, Koperasi Peternakan jumlahnya sebanyak 8 koperasi dan jumlah anggotanya sebanyak 223 orang, Koperasi Pertanian sebanyak 20 koperasi dengan jumlah anggotanya 604 orang, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) terdiri dari 1 koperasi dengan jumlah anggotanya sebanyak 20 orang, Koperasi Pengusaha sebanyak 1 koperasi dan jumlah anggotanya 37 orang, Koperasi Perbengkelan terdiri dari 2 koperasi dan jumlah anggotanya sebanyak 51 orang dan Koperasi Konsultan terdiri dari 1 koperasi dengan jumlah anggotanya sebanyak 22 orang.

2.3.1.14.4. Jumlah Penyebaran BPR/ LKM

Jumlah Usaha Kecil Menengah non BPR/ LKM di Kota Lhokseumawe yang tersebar di 4 Kecamatan pada tahun 2011 sebanyak 6.150. Sedangkan jumlah BPR/ LKM sebanyak 13 dan jumlah UKM Non BPR/ LKM sebanyak 6.137. Terjadi penambahan sebanyak 1.181 dari tahun 2010. Ini menunjukkan bahwa jumlah UKM Non BPR/ LKM di Kota Lhokseumawe meningkat tajam. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.100** berikut ini,

Tabel 2.100
Jumlah UKM Non BPR/ LKM
Tahun 2006 s/d 2011

No.	URAIAN	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah Seluruh UKM	841	1.731	2.603	3964	4.969	6.150
2	Jumlah BPR/LKM	13	13	13	13	13	13
3	Jumlah UKM Non BPR/LKM	828	1.718	2.590	3951	4.956	6.137

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Tahun 2012

14

Jumlah BPR/ LKM di Kota Lhokseumawe sebanyak 13, dengan rincian jumlah BPR dari tahun 2006 sampai dengan 2011 sebanyak 2, sedangkan LKM dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 sebanyak 11. Tidak ada peningkatan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.101** berikut ini,

Tabel 2.101
Jumlah BPR/LKM
Tahun 2006 s/d 2011

No.	URAIAN	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah BPR	2	2	2	2	2	2
2	Jumlah LKM	11	11	11	11	11	11
3	Jumlah BPR dan LKM	13	13	13	13	13	13

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Tahun 2012

2.3.1.14.5. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil


Jumlah Usaha Mikro dan Kecil di Kota Lhokseumawe pada tahun 2007 terdapat 1.329 unit, tahun 2008 meningkat menjadi 1.372 unit. Tahun 2009 usaha mikro dan kecil meningkat menjadi 1.447 unit, sedangkan pada tahun 2010 usaha mikro dan kecil Kota Lhokseumawe meningkat lagi menjadi 1.876 unit. Diharapkan dengan adanya peningkatan usaha mikro dan kecil ini, maka perekonomian masyarakat Kota Lhokseumawe semakin meningkat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.102** berikut ini,

Tabel 2.102
Usaha Mikro dan Kecil
Tahun 2007 - 2011

No.	Uraian	Satuan	2007	2008	2009	2010
1.	Unit Usaha a. Industri Kecil & Menengah	Unit	1.329	1.372	1.447	1.876
		Unit	1.329	1.372	1.447	1.876

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe Tahun 2012

2.3.1.15. Penanaman Modal

Investasi merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal yang terdiri dari mesin, pabrik, kantor dan produk-produk tahan lama lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Faktor-faktor penentu investasi sangat tergantung pada situasi dimasa depan yang sulit untuk diramalkan, maka investasi merupakan komponen yang paling mudah berubah. 

Kota Lhokseumawe dalam penanaman modal atau investasi telah dilakukan pada Bank Aceh, hal ini dilakukan karena diwajibkan oleh Pemerintah Aceh agar Kabupaten/ Kota menyertakan Modalnya pada Bank Aceh, selanjutnya penanaman modal juga dilakukan bagi PDAM Iee Beusare Rata yang merupakan investasi awal yaitu pada tahun 2011. Diperkirakan 10 (sepuluh) tahun sejak berdirinya, PDAM Iee Beusare Rata pada tahun ke-10 telah mampu memberikan penerimaan bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe.

2.3.1.15.1. Jumlah investor/ perusahaan (PMDN/ PMA)

Jumlah perusahaan yang mengajukan proposal permohonan izin investasi PMDN terus mengalami peningkatan. Akan tetapi untuk investasi PMA dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 tidak ada sama sekali. Hal ini menunjukkan investor PMA kurang berminat menanamkan modalnya di Kota Lhokseumawe. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.103** berikut ini,

Tabel 2.103
Jumlah Investor PMDN/PMA
Tahun 2006 s/d 2011

Tahun	URAIAN	PMPD	PMA	Total
2006	Jumlah Investor Kota Lhokseumawe	1.021	-	1.021
2007	Jumlah Investor Kota Lhokseumawe	1.643	-	1.643
2008	Jumlah Investor Kota Lhokseumawe	2.097	-	2.097
2009	Jumlah Investor Kota Lhokseumawe	2.217	-	2.217
2010	Jumlah Investor Kota Lhokseumawe	2.987	-	2.987
2011	Jumlah Investor Kota Lhokseumawe	3.087	-	3.087

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Tahun 2012

2.3.1.15.2. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja yang bekerja pada PMA dan PMDN berupa tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal.

Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada PMA/ PMDN pada tahun 2006 sebanyak 669 orang, jumlah seluruh PMA/ PMDN sebanyak

661 orang dan rasio daya serap tenaga kerjanya sebanyak 98,80%. Pada tahun 2007 jumlah tenaga kerja yang bekerja pada PMA/ PMDN sebanyak 996 orang, jumlah seluruh PMA/ PMDN sebanyak 622 orang dan rasio daya serap tenaga kerjanya sebesar 62,45%. Terjadi penurunan sebesar 36% dari tahun sebelumnya. Tahun 2008 jumlah tenaga kerja yang bekerja pada PMA/ PMDN sebanyak 1.362%, sedangkan jumlah seluruh PMA/ PMDN sebanyak 643 orang dan rasio daya serap tenaga kerjanya 47,21%. Tahun 2008 juga terjadi penurunan 15% dari tahun 2007. Pada tahun 2009 jumlah tenaga kerja yang bekerja pada PMA/ PMDN sebanyak 1.668 orang, jumlah seluruh PMA/ PMDN sebanyak 784 orang dan rasio daya serap tenaga kerjanya sebesar 47,00%. Pada tahun 2009 ini terjadi penurunan tetapi tidak signifikan. Tahun 2010 jumlah tenaga kerja yang bekerja pada PMA/ PMDN sebanyak 1.992 orang, jumlah seluruh PMA/ PMDN sebanyak 1.038 orang, dan rasio daya serap tenaga kerjanya sebesar 52,11%. Kenaikannya hanya 5% dari tahun 2010. Tahun 2011 jumlah tenaga kerja yang bekerja pada PMA/ PMDN sebanyak 2.194 orang, sedangkan jumlah seluruh PMA/ PMDN sebanyak 1.240 orang dan rasio daya serap tenaga kerjanya sebesar 56,52%. Kenaikan rasio daya serap tenaga kerja dari tahun 2010 adalah sebesar 4%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.104** berikut ini,

Tabel 2.104
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Tahun 2006 s/d 2011

No.	URAIAN	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja pada PMA/PMDN	669	996	1.362	1.668	1.992	2.194
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	661	622	643	784	1.038	1.240
	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	98,80	62,45	47,21	47,00	52,11	56,52

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Tahun 2012

2.3.1.16. Kebudayaan

2.3.1.16.1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Festival Seni dan budaya ini merupakan salah satu upaya untuk melestarikan dan mengembangkan, sekaligus untuk memperkenalkan atau mensosialisasikan kesenian tradisional. Disamping itu penyelenggaraan Festival ini, selain menjadi media hiburan diharapkan juga menjadi ajang peningkatan kualitas karya seni, melalui kreatifitas dan aktifitas seniman yang ada di Kota Lhokseumawe. Festival

ini juga bisa memberikan nilai positif bagi perkembangan dunia kepariwisataan di Kota Lhokseumawe, oleh karena itu diharapkan penyelenggara dapat mengembangkan kreativitasnya, sehingga penyelenggaraan Festival ini dari waktu ke waktu akan semakin atraktif dan bisa menarik wisatawan untuk menikmatinya.

Saat ini Kota Lhokseumawe memiliki 200 jumlah group kesenian yang menjadi wadah berlangsungnya kegiatan kesenian. Hal ini menggambarkan bahwa Aceh memiliki khasanah budaya yang tinggi dengan berbagai jenis kesenian seperti tarian yang dapat memikat wisata baik dari lokal maupun dari mancanegara seperti tarian; (Rapai, Rapai Debus, Rapai Geleng, Seureune Kalee, Seudati, Saman, Ranup Lampuan, Pemulia Jamee, Marhaban, Didong, Rebana dan Qasidah Gambus), sastra (pantun, syair, hikayat, seumapa) dan seni lukis (kaligrafi) serta Dalail Khairat dan Meurukon. Adapun jenis alat musik Budaya Aceh diantara; Arab, Bangsi Alas, Serune Kale, Rapai Geundrang, Tambo, Takatok Trieng, Beareguh, Canang dan Celempong.

Berbagai jenis kesenian tersebut mengandung nilai-nilai islami, bersifat demokratis yang mencerminkan kehidupan masyarakat sehari-hari, misalnya jenis tarian dilakukan secara berkelompok sebagai simbol dari keanekaragaman masyarakat Aceh, dinamis iringannya yang disertai lagu dan pantun yang mengandung nasehat yang baik bagi kehidupan masyarakat. Disini dapat kita lihat penyelenggaraan festival seni budaya dari tahun 2006 s.d 2012 seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini , Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.105** berikut ini,

Tabel 2.105
Penyelenggara Festival Seni Budaya
Kota Lhokseumawe

No	Kegiatan	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Pekan Kebudayaan Aceh (PKA)	-	-	-	v	-	-	-
2	Pengirim Tim Kesenian Ke LN	-	-	-	v	v	V	v
3	Anugerah Budaya	-	-	-	v	-	-	-
4	Audisi Paduan Suara GBN	-	-	-	v	v	V	v
5	Festival dan Lomba Karya Seni	-	-	-	-	-	V	-
6	Festival Permainan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-
7	Hari Kesenian Daerah	-	-	v	-	-	-	-
8	Festival Rapai Uroeh	-	-	-	-	-	V	-
9	Festival Seudati	-	-	-	v	-	V	V
10	Festival Cut Bang Cut Kak	-	-	-	-	-	V	v
11	Festival Lomba Seni Lukis	-	-	-	-	-	-	v
12	Festival Lomba Lagu Qasidah	-	-	-	-	-	-	v

No	Kegiatan	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
13	Festival Seni Budaya Islami	-	-	-	-	-	V	v
14	Festival Lomba Syiar Budaya Islam	-	-	v	-	-	-	-
15	Festival Seni Budaya Antar Sekolah	-	-	v	-	-	-	-
16	Audisi Penyanyi Cilik	-	-	-	v	-	-	-
17	Pelatihan Pengembangan Kesenian	-	-	-	-	v	-	-
	Total	-	-	3	6	3	7	7

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Budaya Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat tergambar bahwa dalam wilayah Kota Lhokseumawe terdapat 17 jenis kegiatan seni budaya tarian aceh dalam penyelenggaraan festival seni budaya yang dilaksanakan untuk tiap tahunnya, namun tidak semua jenis tarian aceh yang ditampilkan dalam penyelenggaraan festival seni budaya tersebut.

2.3.1.16.2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.106** berikut ini,

19

Tabel 2.106
Situs/ Bangunan Cagar Budaya
Kota Lhokseumawe

No	Lokasi	Makam	Tugu	Monumen/ Museum	Benteng	Tempat Bersejarah	Jlh
1	Kec. Banda Sakti	1 Tgk. Lsm 2 Tgk. Chik Ditunong			1 Kurok- Kurok	1 Meriam Belanda 2 Tiang Gantung Tgk. Chik Ditunong 1 Men Tujuh	5
2	Kec. Muara Dua	1 Tgk. Chik Buket Krueng	1 Pahlawan TKR	1 P. Ramli			4
3	Kec. Blang Mangat	1 Tgk. Abdul Jalil	1 Tgk. Abdul Jalil				2
4	Kec. Muara Satu	1 Taufik saleh 2 Putroe Neng 3 Tgk. Siah Hudam 4 Tgk. Chik Dipaloh 5 Tgk. Jeurat Mekuindram				1 Gua Jepang	6
Jumlah		9	2	1	1	4	17

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Budaya Tahun 2012

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa Kota Lhokseumawe memiliki situs/ bangunan cagar budaya untuk makam terdapat sebanyak 9 (sembilan), tugu sebanyak 2 (dua), benteng sebanyak 1 (satu) unit dan tempat bersejarah sebanyak 4 (empat), jadi jumlah situs/ bangunan cagar budaya Kota Lhokseumawe seluruhnya berjumlah 17 (tujuh belas) unit.

2.3.1.17. Kepemudaan dan Olah Raga

2.3.1.17.1. Kepemudaan dan Olahraga

Urusan kepemudaan dan olahraga terdiri dari 2 (dua) sub bidang yaitu; *kepemudaan dan olahraga*, keduanya masing-masing memiliki beberapa sub-sub bidang antara lain; kebijakan dibidang kepemudaan/ olahraga, pelaksanaan, koordinasi, serta pembinaan dan pengawasan.

Pemuda dan Olahraga haruslah diposisikan dan diberdayakan sebagai instrument dan pilar pembangunan bangsa (*Nation and Character Building*). Oleh sebab itulah pembangunan kepemudaan dan keolahragaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah dalam arti pemuda dan olahraga memiliki posisi yang strategis dalam pembangunan bangsa yang mengarahkan kepada meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan.

Berdaya saing dalam lingkup kepemudaan mengandung arti: "memiliki kemampuan berkompetisi yang dihasilkan melalui pola pengkaderan dan peningkatan potensi pemuda secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan metode pendidikan,

pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, serta pemanfaatan kajian, kemitraan, dan sentra pemberdayaan pemuda yang terus-menerus dikembangkan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam menciptakan nilai tambah kepemudaan di berbagai bidang pembangunan, serta peningkatan akhlak mulia dan prestasi pemuda Indonesia di kancah kompetisi global.”

Berdaya saing dalam lingkup keolahragaan mengandung arti: “memiliki kemampuan berkompetisi yang dihasilkan melalui pola pembinaan dan pengembangan pelaku, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, pola pelatihan, penghargaan, prasarana, dan sarana olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai dengan metode penataran, pelatihan, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, dan kompetisi yang telah menerapkan manajemen dan iptek olahraga modern, serta pemanfaatan bantuan, pemudahan, dan sentra keolahragaan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam kompetisi bertaraf regional atau internasional”.

2.3.1.17.2. Jumlah Organisasi Olahraga

Secara umum organisasi diartikan sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan. Setiap orang melaksanakan tugas masing-masing, didasari oleh hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan tersebut. Kegiatan olahraga memiliki tujuan yang bermacam-macam, seperti meningkatkan kesehatan atau membina prestasi untuk meraih suatu kejuaraan, rekreasi yang dapat menimbulkan kegembiraan. Kegiatan organisasi olahraga dapat terdiri atas; Organisasi Olahraga Di Masyarakat dan Organisasi Olahraga Di Sekolah. Jumlah organisasi Olahraga dari tahun 2006 sampai saat ini telah mencapai 30 (tiga puluh) organisasi olahraga.

Dalam bidang olahraga terdapat 30 (tiga puluh) organisasi olahraga yang merupakan wadah berkumpul dan beraktivitasnya para atlet di berbagai kegiatan cabang olahraga yang diminati oleh masyarakat Kota Lhokseumawe. Pembinaan dan pengembangan organisasi tersebut diarahkan untuk memotivasi dan memfasilitasi masyarakat gemar berolahraga serta menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang refresentatif guna mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi pembinaan olahraga tradisional, olahraga pendidikan/pelajar/santri, olahraga rekreasi, olahraga pengandang cacat dan olahraga prestasi.

2.3.1.17.3. Jumlah kegiatan kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudaan dalam wilayah Kota Lhokseumawe meliputi 7 (tujuh) kegiatan yang dapat membangkitkan semangat pemuda pemudi dalam mengembangkan bakat dan prestasi baik dalam kalangan masyarakat maupun di tingkat pendidikan. Berikut ini adalah tabel jumlah kegiatan kepemudaan dari tahun 2008 s.d 2012 yang dibiayai oleh APBK dan Dana Otsus. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.107** berikut ini,

Tabel 2.107
Jumlah Kegiatan Kepemudaan
Kota Lhokseumawe Tahun 2012

No	Nama Kegiatan	Tahun	Anggaran	Keterangan
1	Pendataan Potensi Pemuda	2008	APBK	
2	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	2009	APBK	
3	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	2009	APBK	
4	PASKIBRAKA	2006 s.d 2012	-	
5	Pelatihan Osis	2012	Otsus	
6	Pelatihan Wasit	2012	Otsus	
7	Operasional Sekretariat dan Pembinaan Gugus Depan SGTD	2012	APBK	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Lhokseumawe Tahun 2012

2.3.1.17.4. Jumlah kegiatan olahraga

Saat ini Kota Lhokseumawe terdapat 8 (delapan) Jumlah kegiatan olahraga terdiri dari; 1. POPDA, 2. PORSENI, 3. USIA DINI, 4. POPSMA, 5. LPI SMP/ SMA, 6. OSIS SD, 7. OSIS SMP dan 8. OSIS SMA, yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan berbagai cabang olahraga yang telah dilakukan pembinaan dan diperlombakan dalam setiap tahunnya dalam tingkat pendidikan. Berikut ini adalah tabel jumlah kegiatan dan cabang olahraga yang diperlombakan dari tahun 2008 s.d 2012 yang di danai oleh ABPK Lhokseumawe. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.108** berikut ini,

Tabel 2.108
Jumlah Kegiatan Olahraga di Kota Lhokseumawe
Tahun 2012

No	Nama Kegiatan	Tahun	Jumlah Cabang	Anggaran	Ket
1	POPDA	2008	9 cabang	ABPK	
2	PORSENI	2008	9 cabang	ABPK	
3	USIA DINI	2008	7 cabang	ABPK	

No	Nama Kegiatan	Tahun	Jumlah Cabang	Anggaran	Ket
4	USIA DINI	2009	9 cabang	ABPK	
5	PORSENI	2009	8 cabang	ABPK	
6	POPSMA	2009	5 cabang	ABPK	
7	POPDA	2010	9 cabang	ABPK	
8	LPI SMP / SMA	2011	1 cabang	ABPK	
9	O2SN SD	2011	5 cabang	ABPK	
10	O2SN SMP	2011	8 cabang	ABPK	
11	O2SN SMA	2011	5 cabang	ABPK	
12	O2SN SD	2012	6 cabang	ABPK	
13	O2SN SMP	2012	7 cabang	ABPK	
14	O2SN SMA	2012	5 cabang	ABPK	
15	LPI SMP / SMA	2012	1 cabang	ABPK	
16	POPDA	2012	9 cabang	ABPK	

Sumber : Data Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora Kota Lhokseumawe Tahun 2012

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa tidak semua kegiatan dilakukan pada tahun berjalan seperti terlihat pada tabel diatas, di tahun 2008 hanya 3 (tiga) kegiatan saja yang dilaksanakan dengan masing-masing kegiatan meliputi; POPDA diikuti dengan 9 cabang olahraga, PORSENI diikuti 9 cabang olahraga dan USIA DINI diikuti 7 cabang olahraga. Dan untuk tahun berikutnya sampai dengan tahun 2012 yang diikuti oleh beberapa cabang olahraga sebagaimana tersebut pada tabel diatas.

2.3.1.17.5. Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta)

Gelanggang atau balai remaja merupakan suatu wadah tempat berkumpulnya para remaja putra maupun putri dalam mengembangkan kreatifitasnya dan bernilai positif serta bernuansa islami karena adanya silaturahmi antar remaja dari berbagai tempat pendidikan ataupun kalangan remaja dalam masyarakat gampong di wilayah Kota Lhokseumawe.

2.3.1.17.6. Lapangan olahraga

Untuk mendukung kegiatan dari berbagai jenis cabang olahraga pastinya sarana dan prasarana sangat dibutuhkan seperti lapangan olahraga sebagai tempat pembinaan dan pelatihan bagi kader muda-mudi dalam membina jiwa dan raga untuk siap fisik dan mental mereka dalam mengikuti ajang perlombaan maupun sebagai tempat pelaksanaan perlombaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun pusat setiap tahunnya. Sebahagian dari lapangan olahraga itu sendiri mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah dalam bentuk pemeliharaan dikarenakan lapangan olahraga tersebut merupakan aset pemerintah daerah.

74

Hampir dalam setiap Gampong dalam wilayah Kota Lhokseumawe memiliki lapangan olahraga ada yang terbentuk dengan sendirinya dan ada pula terbentuk berkat hasil gotong-royong warga masyarakat umumnya pemuda dalam menggalakkan kegiatan olahraga. Biasanya lapangan olahraga yang terbentuk dalam gampong tersebut merupakan suatu kegemaran warga atau pemuda pemudi di lingkungan itu sendiri, adapun lapangan yang sering kita jumpai dalam setiap Gampong adalah lapangan bola kaki, volley, dan lapangan badminton.

2.3.1.18. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah , kepegawaian dan Persandian

2.3.1.18.1. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja di Kota Lhokseumawe tahun 2011 sebesar 5,026 yang artinya 1 Polisi Pamong Praja mengawasi 2.000 penduduk di Kota Lhokseumawe. Walaupun rasio jumlah Polisi Pamong Praja menurun dari tahun 2010 ke tahun 2011, hal ini disebabkan jumlah Polisi Pamong Praja tetap namun jumlah penduduk di Kota Lhokseumawe bertambah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.109** berikut ini,

Tabel 2.109
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja
Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011

No	Uraian	Tahun	
		2010	2011
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	88	88
2	Jumlah Penduduk	171.163	175.082
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja		5,141	5,026

Sumber : Kantor Satpol PP dan WH Tahun 2011

2.3.1.18.2. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

Jumlah Linmas di Kota Lhokseumawe tahun 2010 sebanyak 88 orang, jumlah ini tidak mengalami penambahan di tahun 2011 hal ini disebabkan tidak adanya formasi penerimaan di Linmas. Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk di Kota Lhokseumawe di tahun 2011 sebesar 5,03 artinya 1 orang Linmas mengawasi sebanyak 2.000 penduduk di Kota Lhokseumawe. Data rasio jumlah Linmas di Kota Lhokseumawe tahun 2010-2011 dapat dilihat pada table berikut di bawah ini, Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.110** berikut ini,





Tabel 2.110
Jumlah Linmas Kota Lhokseumawe
Tahun 2010-2011

No	Uraian	Tahun	
		2010	2011
1	Jumlah Linmas	88	88
2	Jumlah Penduduk	171.163	175.082
Rasio Jumlah Linmas		5,14	5,03

Sumber : Kantor Satpol PP dan WH Tahun 2011

2.3.1.18.3. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

Rasio Pos Siskamling per jumlah Desa/ Kelurahan Kota Lhokseumawe tahun 2010 sebesar 2,85. Rasio ini sama dengan tahun 2011, indikasi ini disebabkan tidak adanya penambahan pos siskamling di tahun 2011. Rasio pos siskamling per jumlah Desa/ Kelurahan ini menggambarkan bahwa keamanan di Kota Lhokseumawe semakin kondusif sehingga jumlah pos siskamling di Kota Lhokseumawe tidak perlu dilakukan penambahan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.111** berikut ini,

Tabel 2.111
Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan
Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011

No	Uraian	Tahun	
		2010	2011
1	Jumlah pos siskambling	194	194
2	Jumlah Desa	68	68
Rasio pos Siskamling		2,85	2,85

Sumber : Kantor Satpol PP dan WH Tahun 2011

2.3.1.19. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan menurut Undang-Undang Pangan No. 7 Tahun 1996 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, merata dan terjangkau.

2.3.1.19.1. Daerah Rawan Pangan

Peningkatan ketahanan pangan merupakan salah satu program utama nasional sejak satu dasawarsa yang lalu. Untuk mewujudkan

14

komitmen tersebut Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan. Kerawanan pangan merupakan masalah multidimensional, yang dapat didefinisikan sebagai "Suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan beraktifitas dengan baik, baik dalam jangka waktu pendek/ sementara maupun jangka panjang". Ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan atau ketahanan nasional. Program pemantapan ketahanan pangan merupakan prioritas utama pembangunan, karena pangan merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi manusia, untuk ini Kota Lhokseumawe tidak mempunyai daerah rawan pangan.

2.3.1.19.2. Jumlah Tenaga Penyuluh

Jumlah Tenaga Penyuluh Teknis Lapangan (PTL) Kota Lhokseumawe saat ini hanya 12 orang yang terdiri dari 4 orang di Kecamatan Muara Satu, 3 orang di Kecamatan Blang Mangat. Tenaga Harian Lepas (THL) berjumlah 14 orang yang ditempatkan di Kecamatan Muara Satu 7 orang dan Kecamatan Blang Mangat 7 orang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.112** berikut ini,

Tabel 2.112
Jumlah Penyuluh PNS, THL-TB, BPP, Gapoktan Kec, Desa, Kel. Tani Serta Penyuluh PNS Provinsi Tahun 2012

No	Penyuluh Kota Lhokseumawe	Penyuluh PNS	THL TB	BPP	Gapoktan	Desa	Kelompok Tani
1	Kec. Muara Satu	3	7	4	11	11	25
2	Kec. Muara Dua	2	7	3	14	18	29
3	Kec. Blang Mangat	-	-	-	13	22	35
4	Kec. Banda Sakti	-	-	-	3	18	6

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe Tahun

2.3.1.20. Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.3.1.20.1. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan Satu lembaga kemasyarakatan yang berperan sebagai mitra pemerintah, harus

13

tetap dijaga dan ditingkatkan sebagai institusi yang mampu menggerakkan pembangunan menuju kemandirian masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra pemerintah harus dapat mewujudkan peran dan fungsinya sebagai lembaga sosial kemasyarakatan, melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Gampong. Sampai Tahun 2011 Kota Lhokseumawe tidak memiliki Kelompok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Binaan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

2.3.1.20.2. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Tim Penggerak PKK berperan sebagai motivator, fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak. Pembinaan teknis kepada keluarga dan masyarakat dilaksanakan dalam kerjasama dengan unsur dinas instansi pemerintah terkait.

Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang dalam program kerjanya banyak berkiprah pada peningkatan pemberdayaan kemasyarakatan, kekeluargaan serta peningkatan kualitas perempuan, harus dapat banyak dilibatkan oleh pemerintah sebagai mitra kerja, khususnya dalam peningkatan pembangunan kemasyarakatan dengan pola kerjasama lintas sektoral.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Lhokseumawe dirasa selama ini telah banyak memainkan perannya ditengah-tengah masyarakat dan aktif dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah baik bidang pembangunan maupun dalam pembinaan masyarakat. Kelompok Binaan PKK Kota Lhokseumawe Tahun 2006 s.d 2011. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.113** berikut ini,

14

Tabel 2.113
Kelompok Binaan PKK Tahun 2006 s.d 2011
Kota Lhokseumawe

No	Kecamatan	2006			2007			2008			2009			2010			2011		
		Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata- rata Jumlah PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah PKK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Banda Sakti	16	6	0.33	16	6	0.33	16	6	0.33	16	6	0.33	16	6	0.33	16	6	0.33
2	Muara Dua	17	2	0.12	17	5	0.29	17	5	0.29	17	5	0.29	17	2	0.12	17	3	0.18
3	Blang Mangat	22	5	0.23	22	5	0.23	22	6	0.27	22	6	0.27	22	3	0.14	22	2	0.09
4	Muara Satu	11	-	-	11	6	0.55	11	4	0.36	11	6	0.55	11	1	0.09	11	4	0.36
Jumlah		68	13	0.68	68	22	1.40	68	21	1.26	68	23	1.45	68	17	0.68	68	15	0.96

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2012

Keberhasilan suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh perempuan. Perempuan mempunyai andil besar dalam membentuk sebuah keluarga yang bermartabat. Lebih dari itu, perempuan juga mempunyai andil besar dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan kelompok. Salah satu buktinya, bahwa perempuan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya dengan melakukan kegiatan usaha produktif rumah tangga.

Salah satu wadah organisasi perempuan dimasyarakat Gampong adalah PKK. PKK merupakan sebuah gerakan yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai penggerak dan dinamisatornya dalam membangun, membina, dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat.

Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan. Dari keluarga yang sejahtera ini, maka tata kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat melahirkan ketentraman, keamanan, keharmonisan, dan kedamaian. Dengan demikian, kesejahteraan keluarga menjadi salah satu tolok ukur dan barometer dalam pembangunan. Dengan kelompok Binaan PKK Kota Lhokseumawe yang pada tahun 2006 berjumlah 13 kelompok binaan, pada tahun 2011 telah berjumlah 15 kelompok binaan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga masyarakat umumnya dan keluarga kelompok binaan khususnya.

2.3.1.20.3. PKK Aktif

Kegiatan PKK yang meliputi kesehatan, ekonomi, keterampilan, sesungguhnya berupaya agar kaum perempuan tetap mampu mandiri dan kuat dalam melahirkan calon-calon generasi bangsa yang berakhlak dan bermoral. Kegiatan PKK harus sinergis dengan program-program pemerintah sehingga TP PKK diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam berbagai aspek kehidupan, untuk terwujudnya masyarakat yang bahagia dan sejahtera. Data PKK Aktif Kota Lhokseumawe. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.114** berikut ini,

Tabel 2.114
PKK Aktif Tahun 2006 s.d 2011
Kota Lhokseumawe

No.	Uraian	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Banda Sakti	18	18	18	18	18	18
2	Muara Dua	17	17	17	17	17	17
3	Blang Mangat	22	22	22	22	22	22
4	Muara Satu	11	11	11	11	11	11
Jumlah		68	68	68	68	68	68

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat 2012

PKK Kota Lhokseumawe terus berupaya meningkatkan eksistensinya dalam bersinergi dengan pemerintah untuk menyukseskan berbagai program pembangunan. Program dan kegiatan PKK merupakan bagian dari pembangunan, untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh peran aktif masyarakat yang salah satunya diwadahi dalam PKK.

Untuk terus mendorong peran aktif kader-kadernya, Tim Penggerak PKK Kota Lhokseumawe rutin menggelar pembinaan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja TP PKK Gampong atas rangkaian pembinaan yang telah dilakukan oleh Kecamatan dan Kota selama ini. Selain itu, pembinaan ini juga bertujuan untuk mendorong tumbuhnya motivasi dan penguatan kelembagaan, kesadaran dan gotong royong masyarakat dalam menyukseskan 10 Program Pokok PKK.

2.3.1.20.4. Posyandu aktif

Mengatasi gizi buruk yang terjadi pada anak balita merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menanggulangnya. Karena itu, keberadaan posyandu pun dirasa penting bagi tumbuh kembang anak.

Posyandu adalah wujud peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan. Kita mengenalkan lima program prioritas yang dilaksanakan di Posyandu, yaitu program gizi, kesehatan ibu dan anak (KIA), keluarga berencana (KB), imunisasi dan penanggulangan diare. Selain 5 program tersebut, posyandu mempunyai kegiatan penunjang, yaitu: dana sehat, simpan pinjam dan arisan. Kegiatan posyandu dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk menunjukkan kontribusi yang nyata dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Posyandu adalah bagian dari pembangunan untuk mencapai keluarga kecil bahagia dan sejahtera merupakan kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan dari Puskesmas setempat. Konsep Posyandu berkaitan erat dengan keterpaduan. Keterpaduan yang dimaksud meliputi keterpaduan dalam aspek sasaran, aspek lokasi kegiatan, aspek petugas penyelenggara, aspek dana dan lain sebagainya. Posyandu dimulai terutama untuk melayani balita (imunisasi, timbang berat badan). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.115** berikut ini,

Tabel 2.115
Posyandu Aktif Tahun 2006 s.d 2011
Kota Lhokseumawe

No.	Uraian	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Banda Sakti	30	30	31	31	32	32
2	Muara Dua	18	18	21	21	24	24
3	Blang Mangat	27	27	28	28	29	29
4	Muara Satu	15	15	15	15	15	15
Jumlah		90	90	95	95	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2012

Sasaran utama kegiatan posyandu ini adalah balita dan orangtuanya, ibu hamil, ibu menyusui dan bayinya, serta wanita usia subur. Sedangkan yang bertindak sebagai pelaksana posyandu adalah kader. Kader direkrut dari, oleh dan untuk masyarakat, yang bertugas membantu kelancaran pelayanan kesehatan. Keberadaan kader sering dikaitkan dengan pelayanan rutin di posyandu. Sehingga seorang kader posyandu harus mau bekerja secara sukarela dan ikhlas, mau dan sanggup melaksanakan kegiatan posyandu, serta mau dan sanggup

Rf

menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan dan mengikuti kegiatan posyandu.

Dari tahun 2006 sampai tahun 2011 Posyandu Aktif Kota Lhokseumawe terus meningkat. Kecamatan Banda Sakti merupakan Kecamatan yang memiliki jumlah Posyandu aktif paling tinggi karena diikuti dengan jumlah penduduk Kecamatan Banda sakti yang paling besar. Sedangkan jumlah Posyandu aktif paling sedikit adalah Kecamatan Muara Satu.

2.3.1.21. Statistik

2.3.1.21.1. Buku "Kota Lhokseumawe Dalam Angka"

Buku Lhokseumawe Dalam Angka yang diterbitkan setiap tahun merupakan kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Lhokseumawe yang mempunyai fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Dalam hal penyusunan LDA Bappeda bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lhokseumawe. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Kepres RI Nomor 86 Tahun 1998 tentang BPS Bab V Pasal 26 Ayat (2), bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan data statistik regional bagi Pemerintah Daerah, penyediaan dana dan fasilitasnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setempat.

Publikasi Lhokseumawe Dalam Angka setiap tahunnya disusun untuk memenuhi kebutuhan data dan media informasi tentang perkembangan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Tersedianya data yang akurat menjadi instrument penting dalam mendukung suksesnya pelaksanaan pembangunan dan mengevaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

2.3.1.21.2. Buku "PDRB Kota Lhokseumawe"

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Lhokseumawe yang juga merupakan kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Lhokseumawe dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lhokseumawe sudah tersedia setiap tahun guna memberikan gambaran mengenai struktur ekonomi Kota Lhokseumawe baik ekonomi secara keseluruhan maupun masing-masing sektor.

2.3.1.22. Kearsipan

2.3.1.22.1. Pengelolaan arsip secara baku

Kota Lhokseumawe berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 02 Tahun 2012 tentang Sususnan Organisasi dan tata kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Lhokseumawe pada tanggal 07 Juni 2012 baru membentuk Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Lhokseumawe sehingga untuk pengelolaan Arsip secara baku belum dapat dilaksanakan.

2.3.1.23. Komunikasi dan Informatika

2.3.1.23.1. Jumlah surat kabar Nasional/ Lokal

Surat kabar adalah media komunikasi yang berisi informasi aktual dari berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, kriminal, seni, olahraga, luar negeri, dalam negeri dan sebagainya. Surat kabar lebih menitikberatkan pada penyebaran fakta maupun peristiwa agar diketahui publik. Surat kabar pada umumnya terbit harian, sekalipun ada juga surat kabar mingguan. Dari segi ruang lingkupnya, ada surat kabar lokal atau surat kabar nasional

Surat kabar sebagai bentuk media massa cetak memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan media lainnya. Kelebihan yang dimilikinya yakni proses penyampaiannya sangat akurat dan berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Berita-berita yang disiarkan media cetak tersusun dalam *alinea*, paragraf, dan kata-kata yang terdiri atas huruf-huruf yang dicetak pada kertas. Dengan demikian setiap peristiwa atau hal-hal yang diberitakan terekam sedemikian rupa sehingga dapat dibaca setiap saat dan dapat dikaji ulang, bisa dijadikan dokumentasi dan bisa dipakai sebagai bukti untuk keperluan tertentu. Kota Lhokseumawe selama tahun 2011 memiliki jumlah jenis Surat Kabar terbitan Nasional dan Lokal, untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.116** berikut ini, 14

Tabel 2.116
Data Jumlah Surat Kabar Nasional Di Kota Lhokseumawe
Tahun 2011

NO	URAIAN	TAHUN 2011
1.	Jumlah Jenis Surat Kabar Terbitan Nasional	10
2.	Jumlah Jenis Surat Kabar Terbitan Lokal	12
Jumlah		22

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe Tahun 2012

Surat kabar banyak diminati oleh masyarakat, karena harganya yang terjangkau dan dapat dicari di berbagai tempat. Walaupun di zaman sekarang sudah ada media elektronik lain yang lebih canggih dalam penyampaian informasi yang lebih cepat dan teraktual, misalnya internet. Namun surat kabar tidak kalah menariknya dengan internet dalam penyampaian informasi, karena masih banyak masyarakat yang belum bisa mengakses internet. Dari data Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe diketahui bahwa Kota Lhokseumawe terdapat 10 (sepuluh) jenis surat kabar terbitan nasional dan terdapat 12 jenis surat kabar terbitan lokal.

2.3.1.23.2. Jumlah penyiaran radio/ TV lokal

Kepercayaan akan prinsip kemerdekaan pers dan kemerdekaan berekspresi tidak pernah berarti pengakuan bagi lembaga penyiaran untuk menyiarkan materi apapun dengan sebebas-bebasnya. Lembaga penyiaran pada dasarnya beroperasi dengan menggunakan ranah publik dan, karenanya, harus menyajikan materi dengan menempatkan kepentingan publik pada prioritas teratas. Dengan demikian, kemerdekaan berekspresi melalui lembaga penyiaran dibatasi oleh apa yang dipersepsikan sebagai kepentingan publik.

Sesuai dengan kodratnya, lembaga penyiaran dapat menjangkau secara langsung khalayak yang sangat beragam baik dalam usia, latar belakang, ekonomi, budaya, agama, dan keyakinan. Teori-teori komunikasi juga sudah menunjukkan bagaimana isi siaran dapat mempengaruhi secara kuat khalayak yang menerimanya. Dengan demikian, lembaga penyiaran harus senantiasa berhati-hati agar isi siaran yang dipancarkannya tidak merugikan, menimbulkan efek negatif, atau bertentangan dan menyinggung nilai-nilai dasar yang dimiliki

beragam kelompok khalayak tersebut. Data penyiaran Radio dan Televisi yang terdapat di Kota Lhokseumawe Tahun 2012. untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.117** berikut ini,

Tabel 2.117
Data Jumlah Penyiar Radio/ TV Lokal dan Nasional di Kota Lhokseumawe Tahun 2012

NO	URAIAN	TAHUN 2012
1.	Jumlah Penyiar Radio Lokal	4
2.	Jumlah Penyiar Radio Nasional	1
3..	Jumlah Penyiar TV Lokal	1
4.	Jumlah Penyiar TV Nasional	3
JUMLAH		9

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe Tahun 2012

Mendirikan stasiun penyiaran harus terlebih dahulu memikirkan untuk membuat perencanaan stasiun penyiaran seperti apa yang akan didirikan. *Pertanyaan pertama tentu saja mengenai apakah stasiun penyiaran yang akan didirikan itu merupakan stasiun penyiaran televisi atau stasiun penyiaran radio.* Di Kota Lhokseumawe terdapat 9 (sembilan) jenis penyiaran radio dan televisi. Dari 9 (Sembilan) jenis penyiaran radio dan televisi tersebut terdapat 4 (empat) jenis penyiaran radio lokal, 1 (satu) jenis penyiaran radio nasional, 1 (satu) jenis penyiaran televisi lokal dan 3 (tiga) jenis penyiaran televisi nasional.

2.3.1.23.3. Web site milik Pemerintah Daerah

Website milik Pemerintah Daerah sangat bermanfaat bagi publik agar publik dapat dengan mudah mengakses data maupun informasi mengenai Pemerintahan. Begitu juga sebaliknya, bagi Pemerintah sendiri website dapat menjadi sebuah instrumen dalam mewujudkan sifat akuntabel dan transparansi terhadap publik. Namun hingga saat ini Kota Lhokseumawe hanya memiliki 2 (dua) Website yaitu milik Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe. Diharapkan untuk tahun kedepan setiap instansi Pemerintah di Kota Lhokseumawe dapat memiliki website agar mempermudah bagi seluruh masyarakat dan aparatur negara dalam mengakses data dan informasi yang diinginkan.

14

2.3.1.23.4. Pameran/ Expo

Pameran/ expo bagi masyarakat sangat berguna karena merupakan event dimana publik dapat melihat informasi maupun perencanaan-perencanaan kedepan yang akan dilakukan bahkan dapat melihat berbagai produk-produk terbaru. Substansi pameran itu sendiri tergantung pada tema di saat melakukan pameran. Tema pameran dapat berbagai macam sehingga masyarakat sangat mendapatkan keuntungan dari dilakukannya sebuah pameran.

Di Kota Lhokseumawe sendiri untuk tahun 2012 telah melakukan sebanyak 2 (dua) kali yang bertempat di KP3 Kota Lhokseumawe dan mendapatkan apresiasi yang tinggi oleh masyarakat setempat.

2.3.1.24. Perpustakaan

2.3.1.24.1. Jumlah perpustakaan

Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar-mengajar. Perpustakaan yang terorganisir secara baik dan sistematis, secara langsung atau pun tidak langsung dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar di sekolah maupun tempat perpustakaan tersebut berada. Hal ini, terkait dengan kemajuan bidang pendidikan dan dengan adanya perbaikan metode belajar-mengajar yang dirasakan tidak bisa dipisahkan dari masalah penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan.

Keberadaan Perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi Perpustakaan yang dimiliki. Demikian halnya dengan pembangunan perpustakaan gampong sebagai sarana mencerdaskan masyarakat desa. Berikut adalah data tentang data tentang jumlah gedung perpustakaan Kota Lhokseumawe sampai Tahun 2011. untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.118** berikut ini,

Tabel 2.118
Data Jumlah Gedung Perpustakaan di Kota Lhokseumawe
Tahun 2006 s.d 2011

NO	NAMA PERPUSTAKAAN	JUMLAH PERPUSTAKAAN					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Perpustakaan Umum	-	-	-	-	-	-

NO	NAMA PERPUSTAKAAN	JUMLAH PERPUSTAKAAN					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
2.	Perpustakaan Perguruan Tinggi	10	10	10	10	10	10
3..	Perpustakaan Sekolah	85	86	88	89	92	95
4.	Perpustakaan Rumah Ibadah	1	1	1	1	1	2
5.	Perpustakaan Pesantren	27	31	32	33	34	34
JUMLAH		123	127	131	133	137	141

Sumber : data diolah, 2012

Jumlah penduduk Kota Lhokseumawe yang melek huruf dalam kurun waktu tahun 2006 sd 2010 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 tercatat sebesar 97,99 % dan tahun 2010 menjadi 99,00 %, (data Disdikpora Kota Lhokseumawe 2012). Dengan kondisi demikian kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana untuk melakukan aktivitas keilmuan dibidang pendidikan non formal terus meningkat terutama sarana gedung perpustakaan.

Kota Lhokseumawe sampai tahun 2011 belum memiliki Perpustakaan Umum. Pada tahun 2012 tepatnya tanggal 07 Juni 2012 berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 02 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Lhokseumawe baru terbentuknya Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Lhokseumawe sekaligus Perpustakaan Umum Daerah Kota Lhokseumawe. Dalam kurun waktu tahun 2006 sampai dengan 2011 gedung perpustakaan yang terdapat di Kota Lhokseumawe merupakan Perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Rumah Ibadah dan Pesantren.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1. Pertanian

2.3.2. 1.1. Produksi padi atau bahan pangan lokal lainnya pertahun

Produksi komoditas pangan Kota Lhokseumawe dalam dua tahun terakhir secara keseluruhan menunjukkan perkembangan yang positif pada produksi padi pada tahun 2009 sebesar 75.474 kuintal/ha. Pada tahun 2010 komoditi padi menurun secara signifikan hingga mencapai 607 kuintal/ha. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.119** berikut ini,

14

Tabel 2.119
Produksi Komoditas Pangan Kota
Lhokseumawe Tahun 2009 – 2011

No.	KOMODITI	PRODUKTIVITAS (Kuintal/Ha)		
		2009	2010	2011
1	Padi	75.474	573,75	607,00
2	Jagung	6.195	171	168
3	Ubi Kayu	11.520	2.750	17.453
4	Ubi Jalar	1.020	153	1.600
5	Kedelai	240	15	380

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe

Komoditi dari sektor tanaman yang berproduktivitas tinggi di Kota Lhokseumawe dari tahun 2010 hingga tahun 2011 merupakan ubi kayu sebesar 17.453 kuintal/ha. Data produksi komoditas pangan tersebut dapat dilihat pada tabel di atas dengan gambaran pertumbuhan produksi pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.6
Grafik Produksi Pangan Kota Lhokseumawe
Tahun 2009 – 2011



Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe, 2012

Potensi luas lahan sawah Kota Lhokseumawe 3.747 ha, sedangkan yang digunakan untuk budidaya padi hanya sebesar 2.754 Ha. Berdasarkan potensi tersebut penggunaan lahan sawah belum sepenuhnya digunakan untuk budidaya padi seluas 993 ha. Dalam upaya peningkatan produksi tanaman padi perlu dilakukan optimalisasi penggunaan lahan sawah yang belum dibudidayakan serta perlu adanya inovasi teknologi yang dapat meningkatkan produksi tanaman padi. Meningkatnya produksi jagung setiap tahunnya mengindikasikan bahwa pengembangan tanaman jagung sudah digemari oleh masyarakat dan adanya peluang pasar yang besar sehingga untuk selanjutnya perlu

RF

adanya upaya pengembangan komoditi ini untuk dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.

2.3.2. 1.2. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Produktivitas komoditi pangan Kota Lhokseumawe tahun 2009 – 2011 yang memegang peranan tetinggi adalah ubi kayu. Produktivitas tanaman ubi kayu yang ditahun 2009 mencapai 240 kuintal/ha dan tahun 2011 mengalami kenaikan 583 kalinya dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena tersedianya lahan dan kemudahan dalam penanaman ubi kayu itu sendiri. untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.120** berikut ini,

Tabel 2.120
Produktivitas Komoditas Pangan Kota
Lhokseumawe Tahun 2007 – 2011

No.	KOMODITI	PRODUKTIVITAS (Kuintal/Ha)		
		2009	2010	2011
1	Padi	42,00	4,80	5,00
2	Jagung	35,00	1,08	3,50
3	Ubi Kayu	240,00	21,83	127,39
4	Ubi Jalar	170,00	17,00	100,0
5	Kedelai	8,00	0,88	14,07

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe

2.3.2. 1.3. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Secara konseptual, sektor andalan pembangunan ekonomi Kota Lhokseumawe ialah sektor yang diharapkan mampu menjadi mesin penggerak utama pembangunan ekonomi (*engine of development*) dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pertumbuhan yang cukup tinggi dan stabil merupakan syarat keharusan agar suatu sektor layak dijadikan sebagai andalan pembangunan ekonomi.

Struktur perekonomian Kota Lhokseumawe, jika memasukkan komponen minyak bumi dan gas pada tahun 2010 dan 2011 masih didominasi oleh kelompok sekunder yang terdiri dari sektor industri pengolahan, sedangkan untuk sektor pertanian masih belum begitu mengembirakan.

Tanpa penghitungan dengan minyak dan gas, secara sektoral di tahun 2010 sektor pertanian mengalami pertumbuhan positif walaupun merupakan pertumbuhan terkecil yaitu sekitar 2,22%. Sektor ini mencakup sub sektor tananam bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan serta perikanan dengan rincian seperti terdiskripsikan pada tabel di bawah ini. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.121** berikut ini,

Tabel 2.121
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011

No.	Sektor	PDRB Migas				PDRB Non Migas			
		2010		2011		2010		2011	
		Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%
1	Tanaman Bahan Makanan	57.675,47	20,75	59.591,81	20,69	57.675,47	20,75	59.591,81	20,69
2	Tanaman Perkebunan	6.846,54	2,46	7.034,13	2,44	6.846,54	2,46	7.034,13	2,44
3	Peternakan	84.720,70	30,49	87.397,92	30,34	84.720,70	30,49	87.397,92	30,34
4	Kehutanan	54,51	0,02	50,44	0,02	54,51	0,02	50,44	0,02
5	Perikanan	128.601,08	46,28	133.956,60	46,51	128.601,08	46,28	133.956,60	46,51
Jumlah		277.898,30	100	288.030,90	100	277.898,30	100	288.030,90	100
Kontribusi terhadap PDRB dengan		6,85	4145150,31	6,95	4056203,97	12,61			12,40

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe tahun 2012

2.3.2. 1.4. Kontribusi sub sektor pertanian pangan terhadap PDRB

Produksi komoditas pangan Kota Lhokseumawe dalam beberapa tahun terakhir secara keseluruhan menunjukkan perkembangan yang positif. Produksi padi pada tahun 2007 tidak ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2008 produksi padi meningkat sebanyak 37,21%, sedangkan tahun 2009 terjadi penurunan sebesar 27,27%. Dalam persentase tahun 2009 produksi padi menurun, tetapi dalam produksi meningkat dan pada tahun 2010 produksi padi meningkat 73,58%. Sedangkan untuk komoditi jagung pada tahun 2008 persentasenya sebesar 69,31%, tahun 2009 terjadi penurunan persentase sebesar 2,15% sementara produksinya meningkat. Tahun 2010 penurunan persentase sangat tajam sebesar 72,37%. Persentase komoditi ubi kayu tahun 2008 sebesar 79,86%, untuk tahun 2009 persentasenya nol karena produksinya sama dengan tahun sebelumnya. Tahun 2010 presentase komoditi ubi kayu naik sebesar 138,72%, ini disebabkan karena produksi lebih dari 100% tahun sebelumnya. Komoditi Ubi Jalar tahun 2008 menurun 52,34%, tahun 2009 persentasenya nol, karena produksi sama dengan tahun sebelumnya. Tahun 2010 komoditi ubi jalar

rf

meningkat menjadi 50% dari tahun sebelumnya. untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.122** berikut ini,

Tabel 2.122
Produksi Komoditas Pangan Kota Lhokseumawe
Tahun 2006 – 2010

No.	KOMODITI	PRODUKSI (Ton/Tahun)				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Padi	4.270	4.270	5.859	7.457	12.944
2	Jagung	186	186	606	619	171
3	Ubi Kayu	232	232	1.152	1.152	2.750
4	Ubi Jalar	214	214	102	102	153

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe tahun 2012

Potensi luas lahan sawah Kota Lhokseumawe 3.747 ha, sedangkan yang digunakan untuk budidaya padi hanya sebesar 2.754 Ha. Berdasarkan potensi tersebut penggunaan lahan sawah belum sepenuhnya digunakan untuk budidaya padi seluas 993 ha. Dalam upaya peningkatan produksi tanaman padi perlu dilakukan optimalisasi penggunaan lahan sawah yang belum dibudidayakan serta perlu adanya inovasi teknologi yang dapat meningkatkan produksi tanaman padi. Meningkatnya produksi jagung setiap tahunnya mengindikasikan bahwa pengembangan tanaman jagung sudah digemari oleh masyarakat dan adanya peluang pasar yang besar sehingga untuk selanjutnya perlu adanya upaya pengembangan komoditi ini untuk dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.

Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB dengan Migas, tanaman ubi kayu juga memberi kontribusi yang paling tinggi selama dua tahun terakhir, yaitu tahun 2010 dan tahun 2011 sebesar 17,15% dan 2011 sebesar 88,33%. untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.123** berikut ini,

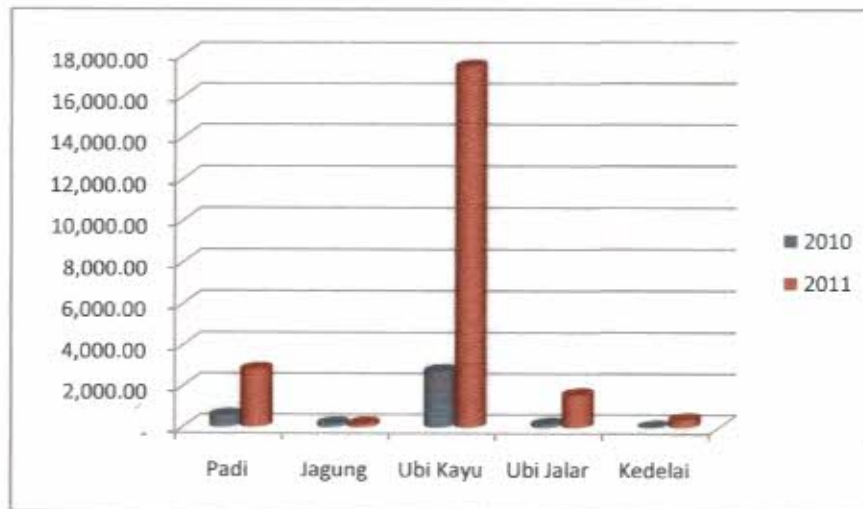
Tabel 2.123
Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011

No.	Sektor	PDRB Migas				PDRB Non Migas			
		2010		2011		2010		2011	
		Produksi	%	Produksi	%	Produksi	%	Produksi	%
1	Padi	573,75	15,66	2.822	12,59	573,75	15,66	2.822	12,59
2	Jagung	171	4,67	168	0,75	171	4,67	168	0,75
3	Ubi Kayu	2.750	75,08	17.453	77,84	2.750	75,08	17.453	77,84
4	Ubi Jalar	153	4,18	1.600	7,14	153	4,18	1.600	7,14
5	Kedelai	15	0,41	380,00	1,69	15	0,41	380,00	1,69
Jumlah		3.663	100,00	22.423	100,00	3.663	100,00	22.423	100,00
Kontribusi terhadap PDRB d		0,09	*****	0,54	*****	0,17	*****	0,97	*****

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian dan BPS Kota Lhokseumawe tahun 2012

Grafik di bawah menggambarkan bahwa kontribusi ubi kayu lebih dominan dari pada tanaman yang lainnya.

Gambar 2.7
Grafik Kontribusi Sub Sektor Pertanian dalam Kuintal Tahun 2010 - 2011



Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe Tahun 2012

2.3.2. 1.5. Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB

Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB dengan Migas pada tahun 2010 dan 2011 yang paling menonjol adalah kelapa sawit yaitu 59,24% dan 56,95%. Sedangkan kontribusi PDRB Non Migas tahun 2010 sebesar 59,24% dan 56,92% untuk tahun 2011. Untuk tanaman pinang kontribusinya terhadap PDRB dengan migas lebih tinggi kakao yaitu pada tahun 2010 sebesar 7,03% dan tahun 2011 sebesar 5,86%. Kontribusi lada terhadap PDRB nilainya sangat kecil, ini dikarenakan penduduk dari Kota Lhokseumawe tidak membudidayakan tanaman lada tersebut. untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.124** berikut ini,

Tabel 2.124
Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011

No.	Sektor	PDRB Migas				PDRB Non Migas			
		2010		2011		2010		2011	
		Produksi	%	Produksi	%	Produksi	%	Produksi	%
1	Kakao	59	5,00	59	4,80	59	5,00	59	4,80
2	Kapuk Randu	3	0,25	7	0,57	3	0,25	7	0,57
3	Karet	72	6,10	40	3,26	72	6,10	40	3,26
4	Kelapa	230	19	317	25,81	230	19	317	25,81
5	Kelapa Sawit	699	59,24	699	56,92	699	59,24	699	56,92

No.	Sektor	PDRB Migas				PDRB Non Migas			
		2010		2011		2010		2011	
		Produksi	%	Produksi	%	Produksi	%	Produksi	%
6	Kemiri	7	0,59	19	1,55	7	0,59	19	1,55
7	Kopi	9	0,76	6	0,49	9	0,76	6	0,49
8	Lada	3	0,25	3	0,24	3	0,25	3	0,24
9	Tebu	15	1,27	6	0,49	15	1,27	6	0,49
10	Pinang	83	7,03	72	5,86	83	7,03	72	5,86
Jumlah		1.180	100,00	1.228	100,00	1.180	100,00	1.228	100,00
Kontribusi terhadap PDRBdenMigas		0,029	#####	0,030	#####	0,054	#####	0,053	#####

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe Tahun 20122322161,5#####

2.3.2. 1.6. Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB

Kelompok petani yang memberikan kontribusi terbesar untuk PDRB dengan migas dan PDRB non migas pada tahun 2010 dan 2011 adalah Kecamatan Blang Mangat, yaitu sebesar 36,84%. Ini menunjukkan bahwa Kecamatan Blang Mangat di dominasi sektor pertanian. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.125** berikut ini,

Tabel 2.125
Kontribusi Kelompok Tani terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011

Sektor	PDRB Migas				PDRB Non Migas			
	2010		2011		2010		2011	
	Kel	%	Kel	%	Kel	%	Kel	%
Kecamatan Banda Sakti	6	6,32	6	6,32	6	6,32	6	6,32
Kecamatan Muara Satu	25	26,32	25	26,32	25	26,32	25	26,32
Kecamatan Muara Dua	29	30,53	29	30,53	29	30,53	29	30,53
Kecamatan Blang Mangat	35	36,84	35	36,84	35	36,84	35	36,84
	95	100,00	95	100,00	95	100,00	95	100,00
Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas	0,001	#####	0,002	#####	0,002	#####	0,004	#####

Sumber : BPS dan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe Tahun 2012

2.3.2. 1.7. Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB

Selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 perkembangan ternak mengalami kenaikan, sedangkan tahun 2011 perkembangan populasi ternak menurun menjadi 8.740 ekor. Persentase tertinggi populasi ternak dari tahun 2009 – 2011 terdapat pada populasi ayam buras sebesar 67,31%, sedangkan perkembangan populasi yang paling kecil adalah kerbau sebesar 0,06%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.126** berikut ini,

RF

Tabel 2.126
Perkembangan Populasi Ternak Menurut Jenis
Kota Lhokseumawe Tahun 2009 - 2011

No.	Jenis Ternak	Tahun			Persen Populasi
		2009	2010	2011	
1	Sapi	11.299	11.302	8.740	1,64
2	Kerbau	178	177	118	0,06
3	Kambing	16.770	18.424	18.461	1,70
4	Domba	2.157	2.536	2.364	0,32
5	Ayam Buras	652.017	717.218	665.693	67,31
6	Ayam Pedaging	146.530	225.053	256.158	19,13
7	Itik	61.980	68.178	72.931	9,39
Total		890.931	1.042.888	1.024.465	100

Sumber : DKPP dan BPS Kota Lhokseumawe tahun 2012

Ditinjau dari populasi ternak pada tahun 2010 ayam buras, ayam ras pedaging dan itik mendominasi jumlah populasi ternak sebesar 93,48%, sedangkan pada tahun 2011 kontribusinya menurun tidak signifikan yaitu 92,42%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.127** berikut ini,

Tabel 2.127
Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011

No.	Sektor	PDRB Migas				PDRB Non Migas			
		2010		2011		2010		2011	
		Ekor	%	Ekor	%	Ekor	%	Ekor	%
1	Sapi	11.302	1,05	8.740	0,81	11.302	1,05	8.740	0,81
2	Kerbau	177	0,02	118	0,01	177	0,02	118	0,01
3	Kambing	18.424	1,70	18.461	1,71	18.424	1,70	18.461	1,71
4	Domba	2.536	0,23	2.364	0,22	2.536	0,23	2.364	0,22
5	Ayam Kampung	717.218	66,35	665.693	61,72	717.218	66,35	665.693	61,72
6	Ayam Ras Pedaging	225.053	20,82	256.158	23,75	225.053	20,82	256.158	23,75
7	Ayam Ras Petelor	38.113	3,53	52.000	4,82	38.113	3,53	52.000	4,82
6	Itik	68.178	6,31	74.995	6,95	68.178	6,31	74.995	6,95
Jumlah		1.081.001	100,00	1.078.529	100,00	1.081.001	100,00	1.078.529	100,00
Kontribusi terhadap PDRB		26,65		26,02		49,04		46,45	

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian dan BPS Kota Lhokseumawe, 2012

2.3.2. 1.8. Produksi Daging per Tahun

Istilah daging dikenal 2 macam, yaitu: a. daging merah yang berasal dari sapi, kerbau, kambing, domba dan sebagainya; b. daging putih yang berasal dari ayam dan unggas yang lainnya. Nilai gizi daging

yang tersusun adalah air (65-75%), protein (15-20%), lemak (2-12%), mineral (1%) dan karbohidrat (<1%). Sedangkan vitamin yang terkandung dalam daging adalah a. larut dalam lemak (A,D,E dan K), b. Larut dalam air (B). Proporsi daging, lemak dan tulang mengalami perubahan sesuai pertumbuhan dan perkembangan tubuh.

Produksi daging untuk Kota Lhokseumawe pada tahun 2010 yang mendominasi adalah daging ayam ras pedaging yaitu sebanyak 251.250 kg. Produksi daging yang paling sedikit terdapat pada daging kerbau sebanyak 560 kg. Ini artinya bahwa konsumsi daging kerbau masyarakat Kota Lhokseumawe sangat sedikit sekali. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.128** berikut ini,

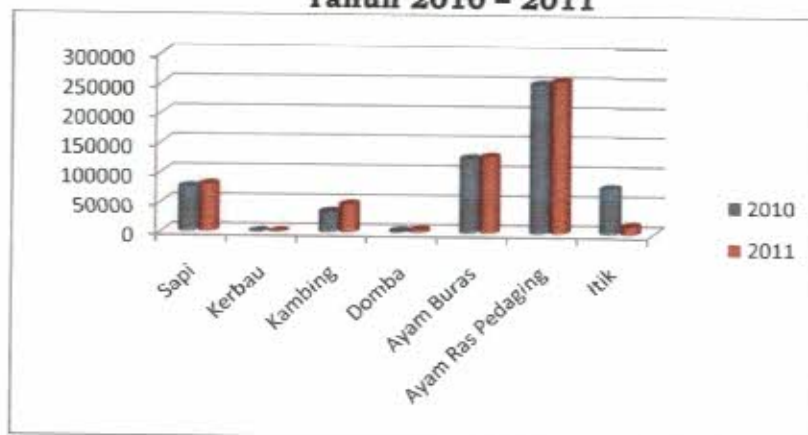
Tabel 2.128
Jumlah Produksi Daging Kota Lhokseumawe
Tahun 2010 - 2011

No.	Jenis Ternak	Tahun	
		2010	2011
1	Sapi	75.650	80.370
2	Kerbau	560	830
3	Kambing	34.860	47.892
4	Domba	2.800	4.730
5	Ayam Buras	125.869	128.625
6	Ayam Ras Pedaging	251.250	256.158
7	Itik	77.456	13.861
Total		568.445	532.466

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe 2012

Data tabel diatas dapat juga dilihat dari grafik jumlah produksi daging Kota Lhokseumawe yang ada di bawah ini:

Gambar 2.8
Grafik Jumlah Produksi Daging Kota Lhokseumawe
Tahun 2010 - 2011



Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe, 2012

2.3.2. 1.9. Produksi telur pertahun

Jumlah produksi telur per tahun Kota Lhokseumawe untuk tahun 2011 yang tertinggi adalah telur ayam buras/ kampung sebanyak 1.181.259 butir, kemudian dilanjutkan dengan produksi telur itik sebanyak 686.954 butir, sedangkan telur ayam ras petelur sebanyak 642.500 butir, untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.129** berikut ini,

Tabel 2.129
Produksi Telur Unggas
Kota Lhokseumawe Tahun 2010 -
2011

No	Jenis Ternak	Jumlah Telur (Butir)
		2011
1	Ayam Buras	1.181.259
2	Ayam Ras Petelur	642.500
3	Itik	686.954

Sumber : DKPP dan BPS Kota Lhokseumawe

2.3.2. 1.10. Populasi ternak pertahun

Perkembangan populasi ternak menurut jenisnya pada tahun 2011 yang memiliki persentase populasi tertinggi adalah ayam buras sebesar 67,31%, diikuti dengan ayam pedaging sebesar 19,13%. Sedangkan persentase populasi terkecil adalah kerbau sebesar 0,06%, hal ini dikarenakan konsumsi masyarakat Kota Lhokseumawe terhadap kerbau kurang diminati. untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.130** berikut ini,

Tabel 2.130
Perkembangan Populasi Ternak Menurut Jenis
Tahun 2009 - 2011

No.	Jenis Ternak	Tahun			Persen Populasi
		2009	2010	2011	
1	Sapi	11.299	11.302	8.740	1,64
2	Kerbau	178	177	118	0,06
3	Kambing	16.770	18.424	18.461	1,70
4	Domba	2.157	2.536	2.364	0,32
5	Ayam Buras	652.017	717.218	665.693	67,31
6	Ayam Pedaging	146.530	225.053	256.158	19,13
7	Itik	61.980	68.178	72.931	9,39
Total		890.931	1.042.888	1.024.465	100

Sumber : DKPP dan BPS Kota Lhokseumawe

RF

2.3.2.2. Pariwisata

2.3.2.2.1. Kunjungan wisata

Kunjungan wisata di Kota Lhokseumawe yang terdiri dari wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara pada tahun 2010 sebesar 49.620. Selanjutnya pada tahun 2011 jumlah kunjungan wisata menurun menjadi sebesar 14.431 dan pada tahun 2012 jumlah kunjungan wisata turun kembali menjadi 10.373. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.131** berikut ini,

Tabel 2.131
Jumlah Kunjungan Wisata
Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2012

No	Uraian	Tahun		
		2010	2011	2012
1	Wisatawan Domestik	48614	13835	10170
2	Wisatawan Mancanegara	1006	596	203
Total		49620	14431	10373

Sumber : Dinas Perhubungan, Budaya dan Pariwisata Tahun 2012 (diolah)

Kota Lhokseumawe memiliki beragam kebudayaan, baik budaya benda (*tangible*) maupun bukan benda (*intangible*). Namun, keberagaman budaya tersebut belum sepenuhnya diarahkan dalam pelaksanaan kunjungan wisata, terutama wisatawan lokal. Pada umumnya, mereka lebih banyak mengunjungi destinasi wisata alam, baik pada akhir pekan maupun saat liburan. Berikut ini adalah objek wisata Kota Lhokseumawe meliputi; 1. Objek wisata alam, 2. Objek Wisata budaya/ spiritual, dan 3. Objek wisata buatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.132** berikut ini,

Tabel 2.132
Objek Wisata Kota Lhokseumawe Tahun 2011

No	Uraian	Lokasi	Ket
1.	Wisata Alam a. Pantai Ujon Blang b. Pulau semadu c. Pantai pulo daruct	Kecamatan Banda Sakti Kecamatan Muara Satu Kecamatan Muara Dua	
2.	Wisata Budaya/Spiritual a. Benteng (kurok-kurok) tentara jepang b. Gua jepang cot panggoi c. Meriam belanja d. Tugu pahlawan TKR e. Tugu lokasi syahid Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng	Gp. Ujong Blang (Banda Sakti) Gp. Blang Panyang (Muara Satu) Gp. Kuta Blang (Banda Sakti) Gp. Peukan Cunda (Muara Dua) Gp. Buloh (Kec. Blang Mangat)	

No	Uraian	Lokasi	Ket
	f. Tiang gantungan Tgk. Chik Ditungong g. Mon tujuh h. Makam Tgk. Dilhokseumawe i. Makam Tgk. Chik Ditungong j. Makam prajurit Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng k. Makam mualim Taufik Shaleh l. Makam Putroe Neng m. Makam Tgk. Syiah Hudam n. Makam Tgk. Chik Dipaloh o. Makam Tgk. Jrad Meuindram p. Makam Tgk. Chik Buket Krueng q. Museum P. Ramli	Gp. Jawa Lama (Banda Sakti) Gp. Buket Rata (Blang Mangat) Gp. Banda Masen (Banda Sakti) Gp. Mon Geudong (Banda Sakti) Gp. Buloh (Blang Mangat) Gp. Blang Weu Panjo (Blang Mangat) Gp. Blang Pulo (Muara Satu) Gp. Blang Pulo (Muara Satu) Gp. Cot Trieng (Muara Satu) Gp. Cot Trieng (Muara Satu) Gp. Cot Trieng (Muara Satu) Gp. Paloh (Muara Dua)	
3.	Wisata Buatan a. Reservoir (Waduk) b. Taman Riyadah c. Taman Mangat Cerita	Gp. Pusong (Banda Sakti) Kecamatan Banda Sakti Kecamatan Blang Mangat	

Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2011

Jenis wisata seperti ini sering disebut wisata massal. Padahal tren wisata saat ini lebih mengutamakan wisata budaya terutama bagi wisatawan luar wilayah Kota Lhokseumawe. Pengembangan jenis wisata budaya akan lebih bermanfaat dan berdampak positif baik terhadap budaya maupun lingkungannya, karena pengunjung jenis wisata budaya adalah wisatawan minat khusus dan berlaku sepanjang tahun, sehingga tidak mengenal wisata musiman. Selain itu, wisata budaya lebih mengutamakan kualitas (*quality tourism*), sementara wisata massal hanya sebagai ajang *refreshing* keluarga.

2.3.2.2.2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah Kota Lhokseumawe secara terus-menerus berusaha mengaktifkan dan mendorong semua sektor agar masing-masing sektor dapat memberi masukan yang optimal. Salah satu sektor yang perlu didorong secara terus-menerus adalah sektor pariwisata.

Sektor pariwisata di Kota Lhokseumawe masih tergolong rendah dalam memberikan kontribusinya terhadap PDRB dengan migas di Kota Lhokseumawe yaitu sebesar 0,368 di tahun 2011 dan tanpa migas sebesar 0,657. Sebagaimana Prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe yang salah satunya ingin menjadikan Kota Lhokseumawe sebagai Kota

TP

Pariwisata maka perlu melakukan pengembangan pariwisata di Kota Lhokseumawe seperti pembangunan sarana dan pra sarana pariwisata serta menyelenggarakan program “sadar pariwisata” yaitu : aman, tertib, segar, indah, bersih dan memberi kenangan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mendukung faktor lain yang berhubungan dengan sektor industri pariwisata yaitu : investasi sektor pariwisata, jumlah wisatawan, dan lama tinggal wisatawan yang mampu memberi sumbangan untuk meningkatkan PDRB sektor pariwisata di Kota Lhokseumawe. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.133** berikut ini,

Tabel 2.133
Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2011

No	Uraian	Tahun			
		2008	2009	2010	2011
1	PDRB sektor pariwisata (hotel, restoran, jasa hiburan dan rekreasi)	13,751.67	14,237.89	14,672.55	15,266.04
2	Jumlah PDRB dengan Migas	4,641,409.60	4,336,407.78	4,056,822.27	4,145,150.31
	Jumlah PDRB tanpa Migas	1,969,930.02	2,081,436.51	2,204,999.82	2,322,161.45
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dengan Migas	0.296	0.328	0.362	0.368
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tanpa Migas	0.698	0.684	0.665	0.657

2.3.2.3. Kelautan dan Perikanan

2.3.2.3.1. Produksi perikanan

Produksi perikanan tangkap umumnya didominasi oleh kelompok ikan pelagis seperti, tuna, tongkol, kembung, cakalang, teri, selar dan tenggiri. Sedangkan produksi perikanan budidaya didominasi oleh kelompok bandeng, udang, kerapu dan mujair.

Jumlah pembudidaya perikanan terdiri dari tambak sebanyak 735 orang/ RTP, keramba sebanyak 81 orang/ RTP dan KJA sebanyak 105 orang/RTP. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.134** berikut ini,

Tabel 2.134
Jumlah Pembudidaya
Kota Lhokseumawe Tahun 2012

No.	Jenis Pembudidaya	Jumlah
1	Tambak	735 orang/RTP
2	Keramba	81 orang/RTP
3	Keramba Jaring Apung	105 orang/RTP

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Tahun 2012



Luas usaha budidaya perikanan Kota Lhokseumawe pada tahun 2009 seluas 1.026,20 ha, tahun 2012 menurun menjadi 9.474,65 ha. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.135** berikut ini,

Tabel 2.135
Luas Usaha Budidaya Perikanan
Kota Lhokseumawe Tahun 2009 - 2012

No	Klasifikasi	Luas Areal (Ha)			
		2009	2010	2011	2012
1	Budidaya tambak	1.025,43	1.025,43	1.025,43	9.396
2	Budidaya kolam	-	-	-	60,86
3	Budidaya sawah	-	-	-	-
4	Budidaya keramba	0,77	0,14	-	17,79
Total		1.026,20	1.025,57	1.025,43	9.474,65

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Tahun 2012

Jumlah armada penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan Kota Lhokseumawe adalah kapal motor ukuran 5 GT sebanyak 9 unit, 5-10 GT sebanyak 20 unit, 10-20 GT sebanyak 13 unit, 20-30 GT sebanyak 12 unit, 30-50 GT sebanyak 53 unit. Jumlah perahu tanpa motor sebanyak 39 unit yang terdiri dari jukung sebanyak 53 unit sedangkan perahu papan kecil sebanyak 36 unit.

Kota Lhokseumawe juga sudah mempunyai fasilitas prasarana perikanan seperti Pelabuhan Perikanan yang terletak di Pusong, TPI, Cold Strage, Pabrik Es dan Hatchery. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.136** berikut ini,

Tabel 2.136
Jumlah Prasarana Perikanan Kota
Lhokseumawe Tahun 2009-2011

No	Klasifikasi	Jumlah Fasilitas (Unit)	
		2009	2010
1	Pelabuhan Perikanan	1	1
2	TPI	2	2
3	Cold Strage	1	2
4	Pabrik Es	1	1
5	Hatchery	-	3

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian, 2012

Beberapa solusi yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan perikanan yaitu; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi dalam pengelolaan perikanan tangkap, membangun berbagai

fasilitas pembangunan pendukung termasuk merehabilitasi tambak-tambak rakyat, memperkuat SDM dan kelembagaan nelayan dan pembudidaya, membuka akses permodalan bagi nelayan/pembudidaya dengan lembaga keuangan baik bank maupun non bank, membangun balai benih dalam rangka penyediaan benih unggul dengan biaya murah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.137** berikut ini,

Tabel 2.137
Produksi Perikanan
Kota Lhokseumawe Tahun 2009 - 2011

No.	Jenis Ikan	Produksi (dalam ton)		
		2009	2010	2011
1	Mujair	523,2	359	129
2	Bandeng	987,5	2.142	1.244
3	Kerapu	79,8	457,2	137
4	Udang Windu	72,6	207,6	148
5	Udang Lainnya	89,0	453,4	46
Total		1.752,10	3.619	1.704

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe

2.3.2.3.2. Konsumsi ikan

Ikan sangat layak dikonsumsi karena mempunyai kandungan gizi yang memadai, khususnya kandungan protein, DHA, dan kalsium, vitamin A, dan zat besi. Kadar protein ikan segar atau olahan cukup tinggi, seperti cakalang 24,2 persen, tuna 23,7 persen, bandeng 21,7 persen, ikan mas 16 persen, pindang 27 persen, ikan asap 30 persen, ikan asin 42-50 persen, dan udang segar 21 persen. Meskipun ikan asin lebih murah, namun ikan asin mempunyai kandungan protein yang paling tinggi di antara beberapa jenis ikan lainnya. Kandungan lemak ikan rendah, umumnya di bawah 5 persen, dan ini masih lebih rendah dibandingkan kadar lemak daging ayam yang mencapai 25 persen.

Komponen gizi yang paling bagus dari ikan dan diduga berperan dalam meningkatkan kecerdasan adalah Docosa-hexaenoic-acid (DHA), yang merupakan asam lemak tak jenuh ganda berupa rantai panjang Omega-3. DHA banyak ditemukan di dalam ikan salmon, tuna, makarel menjadikan ikan sebagai bagian ketahanan pangan yang baik, secara kualitas gizi individual maupun secara agregat di tingkat nasional, perlu modernisasi sektor perikanan yang memungkinkan pengemasan dan pengalengan berbagai produk ikan dan juga rantai distribusi yang

menghubungkan daerah produksi ikan dengan daerah pengonsumsi ikan. Dengan adanya suplai yang memadai, pasar dapat menyerapnya menjadi berbagai makanan olahan yang dekat dengan selera pasar, seperti bakso ikan, sosis ikan. Konsumsi ikan masyarakat Kota Lhokseumawe per hari/ KK/hari sebanyak 1 Kg.

2.3.2.3.3. Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB

Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB Kota Lhokseumawe dengan migas mengalami penurunan sedangkan tanpa migas mengalami kenaikan, walaupun kontribusi sub sektor perikanan kecil terhadap PDRB tetapi terus meningkat. Untuk itu perlu dibutuhkan suatu upaya dalam meningkatkan peran yang lebih besar terhadap perekonomian Kota Lhokseumawe. Secara geografis wilayah Kota Lhokseumawe yang merupakan wilayah yang di kelilingi oleh pantai sangat berpotensi untuk pengembangan perekonomian perikanan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.138** berikut ini,

Tabel 2.138
Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011

No.	Sektor	PDRB Migas				PDRB Non Migas			
		2010		2011		2010		2011	
		Produksi	%	Produksi	%	Produksi	%	Produksi	%
1	Mujair	359	9,92	129	7,57	59	5,55	59	5,26
2	Bandeng	2.142	59,18	1.244	73,00	3	0,28	7	0,62
3	Kerapu	457,2	12,63	137	8,04	72	6,77	40	3,57
4	Udang Windu	207,6	5,74	148	8,69	230	21,64	317	28,25
5	Udang Lainnya	453,4	12,53	46	2,70	699	65,76	699	62,30
Jumlah		3.619	100,00	1.704	100,00	1.063	100,00	1.122	100,00
Kontribusi terhadap PDRB denigas			0,089	#####	0,041	#####	0,048		0,048

Sumber : DKPP dan BPS Kota Lhokseumawe

#####

2.3.2.3.4. Cakupan bina kelompok nelayan

Cakupan bina kelompok nelayan Kota Lhokseumawe pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 sebanyak 25 kelompok, sedangkan pada tahun 2011 cakupan bina kelompok nelayan adalah sebanyak 30 kelompok. Ini menunjukkan adanya peningkatan cakupan bina kelompok nelayan Kota Lhokseumawe. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.139** berikut ini,

14

Tabel 2.139
Cakupan Bina Kelompok Nelayan
Tahun 2009 -2011

No.	Tahun	Cakupan Bina Kelompok Nelayan
1	2009	25
2	2010	25
3	2011	30

Sumber : DKPP Kota Lhokseumawe

2.3.2.4. Perdagangan

2.3.2.4.1. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

Sektor perdagangan terdiri dari perdagangan, hotel dan restoran memberi kontribusi terhadap PDRB dengan migas pada tahun 2010 sebesar 28,62% sedangkan pada tahun 2011 memberi kontribusi sebesar 29,84%. Sektor perdagangan memberikan kontribusi yang paling tinggi yaitu sebesar 98,95% untuk PDRB dengan migas tahun 2009 dan 98,97% untuk tahun 2011. Kontribusi yang paling kecil terdapat pada sektor hotel yaitu 0,37% tahun 2010 dan 0,38% untuk tahun 2011. Sektor restoran hanya memberi kontribusi sebesar 0,68% tahun 2010 dan 0,67% untuk tahun 2011. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.140** berikut ini,

Tabel 2.140
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011

Sektor	PDRB Migas				PDRB Non Migas			
	2010		2011		2010		2011	
	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%
Perdagangan, Hotel dan Restoran								
Perdagangan	1.148.867	98,95	1.224.269	98,97	1.148.867	98,95	1.224.269	98,97
Hotel	4.283	0,37	4.440	0,36	4.283	0,37	4.440	0,36
Restoran	7.918	0,68	8.272	0,67	7.918	0,68	8.272	0,67
	1.161.067	100,00	1.236.981	100,00	1.161.067	100,00	1.236.981	100,00
Kontribusi terhadap PDRB s		28,62	#####	29,84		52,67	#####	53,27

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe Tahun 2012

19

2.3.2.5. Industri

2.3.2.5.1. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

Kontribusi kegiatan usaha di sektor industri dalam pembentukan *Product Domestic Regional Bruto (PDRB)* daerah Kota Lhokseumawe tanpa migas dinilai masih rendah yaitu sebesar 3,66%. Ini berbeda dengan memasukkan migas dalam sektor pengolahan industri yang memberikan kontribusi sebesar 43,98%, dengan memasukkan migas hampir setengahnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Lhokseumawe didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan migas setelah sektor perdagangan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.141** berikut ini,

Tabel 2.141
Kontribusi Sektor Industri
Kota Lhokseumawe Tahun 2010 - 2011

Sektor	PDRB Migas				PDRB Non Migas			
	2010		2011		2010		2011	
	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%
Industri Pengolahan	1.851.822,45	100,00	1.822.988,86	100,00	81.351,24	100,00	84.910,88	100,00
	1.851.822,45	100,00	1.822.988,86	100,00	81.351,24	100,00	84.910,88	100,00
Kontribusi PDRBgas terhadap		45,65	4.145.150,31	43,98		3,69	#####	3,66

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe Tahun 2012

2.3.2.5.2. Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri

Industri rumah tangga di Kota Lhokseumawe memiliki kontribusi yang rendah terhadap pembentukan PDRB sektor industri terutama tanpa migas. Indikasi ini disebabkan karena masih banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh industri rumah tangga di Kota Lhokseumawe. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.142** berikut ini,

129

Tabel 2.142
Kontribusi Sektor Industri Rumah Tangga terhadap PDRB Sektor
Industri Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011

Sektor	PDRB Migas				PDRB Non Migas			
	2010		2011		2010		2011	
	Rumah Tangga	%	Rumah Tangga	%	Rumah Tangga	%	Rumah Tangga	%
Rumah Tangga Industri	1.851.822,45	100,00	1.822.988,86	100,00	81.351,24	100,00	84.910,88	100,00
	1.851.822,45	100,00	1.822.988,86	100,00	81.351,24	100,00	84.910,88	100,00
Kontribusi terhadap PDRB Migas		95,79	4.145.150,31	95,55		4,39	4.145.150,31	4,66

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe Tahun 2012

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

2.4.1.1.1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pangan dan non pangan per kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga pangan dan non pangan per kapita dihitung berdasarkan pengeluaran untuk makanan dalam rumah tangga selama sebulan tanpa memperhatikan jenis kelamin dan usia. Berdasarkan data dari Index Pembangunan Manusia Kota Lhokseumawe, pengeluaran per kapita masyarakat di Kota Lhokseumawe sebesar Rp. 587.710 di tahun 2010, ini menunjukkan masyarakat di Kota Lhokseumawe mempunyai keterbatasan penghasilan sehingga pengeluaran masyarakatnya lebih cenderung untuk mengkonsumsi pangan daripada non pangan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.143** berikut ini,

Tabel 2.143
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Lhokseumawe
Tahun 2009 - 2010

No	Tahun	Rata-rata Pengeluaran Makanan Sebulan (Rp)	Rata-rata Pengeluaran bukan Makanan Sebulan (Rp)	Pengeluaran per kapita (Rp)	Persentase Rata-rata Pengeluaran Makanan Sebulan	Persentase Rata-rata Pengeluaran bukan Makanan Sebulan
1	2009	317.009	257.928	574.937	55,14	44,86
2	2010	319.287	268.423	587.710	54,33	45,67

Sumber : Buku Indeks Pembangunan Manusia Kota Lhokseumawe, Tahun 2010

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Lhokseumawe salah satunya dapat menggunakan indikator pendapatan per kapita. Indikator ini didapat dari besaran nilai PDRB per kapita. Pendapatan per kapita merupakan nilai perkiraan pendapat per jumlah penduduk selama satu tahun. Perkembangan pendapatan per kapita Kota Lhokseumawe Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2007-2010 dengan atau tanpa migas. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.144** berikut ini,

Tabel 2.144
Pendapatan Per Kapita Kota Lhokseumawe
Tahun 2007 - 2010

Tahun	ADHB		ADHK 2000	
	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
2007	59.482.850,43	20.128.118,92	30.485.464,07	11.470.415,75
2008	62.281.175,84	24.370.659,77	28.174.858,22	11.957.043,19
2009	61.303.014,79	27.798.726,29	25.799.053,18	12.382.035,84
2010	62.109.299,97	31.978.315,17	23.697.901,82	12.878.843,73

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe Tahun 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat pertumbuhan per kapita secara riil akibat peningkatan output, dengan memperhatikan perkembangan pendapatan per kapita atas dasar harga konstan. Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2000, pendapatan per kapita penduduk Kota Lhokseumawe selama kurun waktu 2007 sampai 2010 tanpa migas meningkat 12,28%. Tahun 2007 pendapatan per kapita tersebut sebesar Rp. 11.470.415,75 dan meningkat menjadi 12.878.843,73 pada tahun 2010, secara rata-rata hanya mengalami peningkatan 3,07% per tahun. Pengaruh sektor migas terhadap pendapatan penduduk cukup besar. Kendati demikian pengaruh sektor pendapatan ini memberikan dampak penurunan terhadap pendapatan per kapita penduduk karena produktivitas ataupun *output* dari sektor ini mengalami penurunan setiap tahunnya.

Pendapatan per kapita penduduk Kota Lhokseumawe Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2010 tanpa sektor migas adalah sebesar Rp. 31.978.315,17. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 58,87% dari tahun 2007. Dengan demikian nilai pertumbuhan pendapatan per tahunnya adalah sebesar 14,72%.

RF

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastuktur

2.4.2.1. Perhubungan

2.4.2.1.1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan Kota Lhokseumawe pada tahun 2010 yaitu sebesar 0,77 persen sedangkan pada tahun 2011 yaitu sebesar 0,85 persen, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.145** berikut ini,

Tabel 2.145
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
Kota Lhokseumawe Tahun 2012

No	Uraian	Tahun	
		2010	2011
1	Panjang Jalan	265,16	282,16
2	Jumlah Kendaraan	34174	33188
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan		0,77	0,85

Sumber : Lhokseumawe dalam Angka Tahun 2012 (diolah)

2.4.2.2. Penataan Ruang

2.4.2.2.1. Ketaatan terhadap RTRW

Ketaatan masyarakat terhadap RTRW Kota Lhokseumawe belum dapat digambarkan dengan jelas, mengingat RTRW Kota Lhokseumawe belum di Qanunkan dan masih dalam tahap pembahasan sepihak dengan DPRK Lhokseumawe, dengan harapan RTRW Kota Lhokseumawe bisa di Qanunkan di tahun 2012 ini sehingga ketaatan terhadap RTRW baru dapat digambarkan pada tahun 2013.

2.4.2.2.2. Luas wilayah produktif

Kawasan produktif adalah kawasan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi untuk dibudidayakan atas dasar kondisi potensi sumber daya alam, manusia dan buatan. Termasuk dalam kawasan produktif ini di wilayah Kota Lhokseumawe adalah kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, industri, pertanian, perikanan, pariwisata, Ruang Terbuka Non Hijau dan peruntukkan sektor informal. Kota Lhokseumawe di tahun 2010 memiliki luas kawasan produktif sebesar 63,56% dari seluruh total kawasan. Kawasan untuk kegiatan sektor informal diarahkan pada penataan kawasan yang sebelumnya telah ada dan pengembangan lokasi lainnya. Penataan dilakukan para pedagang pada umumnya menggunakan sebagian badan jalan untuk berjualan pada malam hari. Selain itu untuk rencana pengembangan dilakukan dengan

TP

pemusatan kegiatan sektor informal ini pada lokasi tertentu. Luasan kawasan untuk kegiatan sektor informal ini tidak dapat ditentukan seluruhnya dikarenakan pada sebagian kawasan ini berada pada peruntukan kawasan lainnya. Kawasan peruntukan sektor informal di Kota Lhokseumawe adalah:

1. Sekitar Jalan Merdeka dekat KP3, Kecamatan Banda Sakti;
2. Lapangan KP3, Kecamatan Banda Sakti;
3. Sekitar Jalan Samudera Baru, Kecamatan Banda Sakti;
4. Sekitar Stadion Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti.

Rencana pemanfaatan kawasan peruntukan kegiatan sektor informal ini adalah:

- a. penyediaan ruang khusus bagi pedagang sektor informal yang memenuhi kriteria ketertiban, keamanan, dan kenyamanan baik bagi pedagang, maupun pengunjung;
- b. penataan Jalan Merdeka dalam pengaturan sirkulasi pergerakan kendaraan dan kebersihan lingkungan;
- c. pengaturan waktu operasional pedagang kaki lima dengan model *time sharing*;
- d. penyediaan tempat atau kios yang dirancang khusus agar memenuhi kriteria ketertiban, keamanan, dan kenyamanan baik bagi pedagang, maupun pengunjung;
- e. penyediaan kawasan ini disinerjiskan dengan pengembangan kegiatan pariwisata;
- f. mengintegrasikan pedagang sektor informal dengan rencana pengembangan perdagangan dan jasa formal;
- g. mewajibkan kepada pengelola pusat perbelanjaan skala besar yang luas lantai bangunannya lebih besar dari lima ribu meter persegi (tidak termasuk parkir) untuk menyediakan sepuluh persen dari luas lantai bangunan untuk kegiatan usaha skala kecil dan informal;
- h. memberikan insentif kepada kegiatan perdagangan dan jasa yang dikelola swasta yang menyediakan ruang untuk usaha kecil atau informal.

2.4.2.2.3. Luas wilayah industri

Kawasan industri menengah diarahkan untuk pengembangan industri pengolahan. Sektor pendukung industri pengolahan adalah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain-lain. Pengembangan sektor

rf

industri menengah diharapkan dapat melengkap sektor industri untuk menggerakkan perekonomian Kota Lhokseumawe. Kawasan industri menengah ini terdiri dari kawasan industri di Jeulikat, Kecamatan Blang Mangat dan kawasan industri di Blang Naleung Mameh, Batuphat Barat, Batuphat Timur. Luas kawasan industri ini adalah seluas 187,53 Ha. Atau seluas 5,25 % dari luas wilayah Kota Lhokseumawe.

Kawasan industri kecil letaknya menyisip pada kawasan lainnya. Kegiatan industri yang cukup berkembang adalah kegiatan pembuatan border khas Aceh dan pembuatan tikar. Industri bordir industri khas Aceh terletak di Batuphat, Kecamatan Muara Satu dan di Blang Cut, Kecamatan Blang Mangat. Sedangkan industri tikar yang terletak di Jambo Masjid, Kecamatan Blang Mangat.

2.4.2.2.4. Luas wilayah banjir

Kota Lhokseumawe sebagian wilayahnya merupakan kawasan banjir, reservoir yang digunakan sebagai pengendali banjir. Luas wilayah banjir di Kota Lhokseumawe tahun 2010 sebesar 2,62% dari seluruh wilayah kawasan banjir. Kawasan banjir ini tersebar di daerah Teumpok Tengoh, Kuta Blang, Lancang Garam, Gampong Kota Lhokseumawe, Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti dan Jeulikat, Seuneubok, Mane Kareung di Kecamatan Blang Mangat. Luas total adalah 74,23 Ha. Sungai yang didelineasikan adalah Krueng Cunda. Sungai ini yang memisahkan Kecamatan Banda Sakti dan Kecamatan Muara Dua. Luas sungai ini adalah 80,43 Ha.

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang garis sungai yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan kelestarian fungsi ekologis sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai diperlukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat merusak kualitas air pantai dan kondisi fisik sungai. Pemanfaatan pada kawasan sempadan sungai ini dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi ekologis sungai.

2.4.2.3. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

2.4.2.3.1. Jenis dan jumlah bank dan cabang

Berdasarkan data mengenai jenis dan jumlah bank baik pusat maupun kantor cabang yang dimiliki oleh bank pada tahun 2010 dan

15

2011 menurut Lhokseumawe Dalam Angka dapat dilihat adanya penambahan Bank pada tahun 2011 sebanyak 5 Bank dibandingkan dengan tahun 2010. Bank yang dimaksud adalah Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Bank Mega Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Pundi Indonesia, dan Bank Muamalat. Sedangkan untuk kantor bank cabang terdapat penambahan di tahun 2011, yaitu pada Bank Rakyat Indonesia menjadi 8 cabang, Bank Mandiri menjadi 5 cabang, Bank Pembangunan Aceh menjadi 2 cabang. Namun tidak semua Bank memiliki penambahan cabang, ada juga beberapa Bank yang jumlah kantor cabangnya tetap bahkan ada yang menurun seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang memiliki satu kantor cabang pada tahun 2011. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis dan jumlah Bank maupun Kantor Cabang dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.146** berikut ini,

Tabel 2.146
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang
Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011

No	Bank	2010		2011	
		Pusat	Caban g	Pusat	Caban g
1	Bank Rakyat Indonesia (BRI)	1	5	1	8
2	Bank Mandiri	1	3	1	5
3	Bank Negara Indonesia	1	1	1	1
4	Bank Pembangunan Aceh	1	1	1	2
5	Bank Pembangunan Daerah Syariah Aceh	1	-	1	-
6	Bank Central Asia	1	-	1	-
7	Bank Danamon Indonesia	1	1	1	1
8	Bank CIMB Niaga Syariah	1	-	1	-
9	Bank Panin	1	-	1	-
10	Bank Tabungan Negara	1	-	1	-
11	Bank Perkreditan Rakyat	1	-	1	-
12	Bank Perkreditan Rakyat syariah	1	2	1	1
13	Bank Tabungan Pensiunan Nasional	-	-	1	1
14	Bank Mega Syariah	-	-	1	-
15	Bank Syariah Mandiri	-	-	1	-
16	Bank Pundi Indonesia	-	-	1	-
17	Bank Muamalat	-	-	1	-
Total		12	13	17	19

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2012

2.4.2.3.2. Jenis, kelas, dan jumlah restoran

Dari tabel dapat kita ketahui bahwa di Kota Lhokseumawe didominasi oleh restoran dengan usaha restoran golongan rendah. Sedangkan pada usaha rumah makan didominasi oleh jumlah usaha

rumah makan kelas B. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.147** berikut ini,

Tabel 2.147
Jenis, kelas dan Jumlah Restoran
Kota Lhokseumawe 2012

No	Uraian	Tahun (n-5)		Tahun (n-1)	
		Jlh. Usaha	Jlh. Kursi	Jlh. Usaha	Jlh. Kursi
1	Usaha restoran golongan tinggi	2	50	0	0
2	Usaha restoran golongan menengah	3	84	0	0
3	Usaha restoran golongan rendah	4	112	4	112
4	Usaha rumah makan kelas A	0	0	0	0
5	Usaha rumah makan kelas B	12	64	10	320
6	Usaha rumah makan kelas C	5	140	5	140
7	Usaha rumah makan kelas D	4	96	4	96
8	Usaha rumah makan kelas	21	300	19	556
9	Jenis Usaha restoran	9	246	4	112
Total		60	1092	46	1336

Sumber : KP2T Lhokseumawe 2012

2.4.2.3.3. Jenis, kelas, dan jumlah Penginapan/ Hotel

Kota Lhokseumawe memiliki beberapa hotel demi untuk memberikan kenyamanan bagi mereka yang datang dan menginap di Kota Lhokseumawe, baik yang bersifat wisata maupun keperluan dinas. Oleh karena itu saat ini Kota Lhokseumawe ingin mengembangkan bidang perhotelan karena Kota Lhokseumawe untuk beberapa tahun kedepan akan menjadikan sektor pariwisata sebagai penambahan pendapatan Kota Lhokseumawe. Kota Lhokseumawe berdasarkan data telah memiliki hotel bintang 1 (satu) sampai bintang 3 (tiga) sehingga dapat menampung pendatang yang ingin mengunjungi Kota Lhokseumawe. Jumlah dan kapasitas perhotelan yang terdapat di Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.148** berikut ini,

Tabel 2.148
Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel
Kota Lhokseumawe Tahun 2012

No	Jenis Penginapan/Hotel	Tahun (n-5)			Tahun (n-1)		
		Jlh. Hotel	Jlh. Kamar	Jlh. Tpt. Tidur	Jlh. Hotel	Jlh. Kamar	Jlh. Tpt. Tidur
1	Hotel Bintang 5						
2	Hotel Bintang 4						
3	Hotel Bintang 3	1	60	116	1	60	116
4	Hotel Bintang 2	0	0	0	0	0	0
5	Hotel Bintang 1	2	68	126	1	34	58
6	Hotel non bintang (melati dan lainnya)	16	288	496	7	126	207
Total Penginapan/Hotel		18	356	622	8	160	265

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka 2012

2.4.2.4. Lingkungan Hidup

2.4.2.4.1. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

Penggunaan air bersih bagi Rumah Tangga di Kota Lhokseumawe ternyata belum sepenuhnya terwujud. Hal ini dapat disebabkan masih adanya masyarakat Kota Lhokseumawe yang belum peduli terhadap penggunaan dan manfaat air bersih sehingga persentase penggunaan air bersih belum mencapai 100 persen. Namun menurut data dapat disimpulkan bahwa telah lebih dari setengah bahkan hampir mendekati 100 persen Rumah Tangga yang telah menggunakan air bersih. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yang meliputi data pada tahun 2009 dan 2010. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.149** berikut ini,

Tabel 2.149
Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih
Kota Lhokseumawe Tahun 2009-2010

No	Uraian	Tahun	
		2009	2010
1	Rumah Tangga menggunakan air bersih	5.934	6.042
2	Jumlah Rumah Tangga	6.749	6.892
Persentase RT yang menggunakan air bersih		87,92	87,67

Sumber : PDAM Tirta Mon Pase Tahun 2010

2.4.2.5. Komunikasi dan Informatika

2.4.2.5.1. Rasio ketersediaan daya listrik

Daya listrik merupakan suatu hal yang sangat sakral bagi kehidupan yang serba modern dan penuh dengan teknologi seperti sekarang ini. Kota Lhokseumawe juga tidak luput dari ketergantungan terhadap listrik sehingga hal tersebut diperjelas pada tabel dibawah ini. Rasio ketersediaan listrik adalah perbandingan daya listrik terpasang terhadap jumlah kebutuhan. Data dibawah ini menggambarkan rasio ketersediaan listrik terhitung tahun 2010 sebesar 65,06%, yang merupakan hasil perbandingan antara daya listrik yang terpasang sebesar 35,85 dan jumlah kebutuhan listrik sebesar 55,1. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.150** berikut ini,

19

Tabel 2.150
Rasio Ketersediaan Listrik Kota Lhokseumawe

No	Uraian	2010
1	Daya Listrik terpasang	35,85
2	Jumlah Kebutuhan Listrik	55,1
Rasio ketersediaan daya listrik		65,06

Sumber : Kantor PLN Cabang Kota Lhokseumawe tahun 2011

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

2.4.3.1.1. Angka kriminalitas

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lhokseumawe pada tahun 2009 dilaporkan sebanyak 557 kasus kriminalitas dan pada Tahun 2010 meningkat menjadi 606 kasus, pada umumnya tindak kejahatan tertinggi pada kasus penganiayaan, pencurian dan curanmore. Pada kasus penganiayaan pada tahun 2009 sebanyak 112 kasus dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 154 kasus, pada kasus pencurian pada tahun 2009 sebanyak 103 dan pada tahun 2010 sebanyak 104 kasus serta curanmor pada tahun 2009 sebanyak 86 kasus namun pada tahun 2010 turun menjadi 45 kasus. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.151** berikut ini,

Tabel 2.151
Jumlah Kriminalitas
Di Kota Lhokseumawe Tahun 2007 - 2011

No	Kasus	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Pencurian	47	66	103	104	136
2	Penganiayaan	56	69	112	154	154
3	Curanmor	47	57	86	45	157
4	KUKI	0	0	28	33	42
5	Pembunuhan	1	0	3	1	0
6	Penggelapan	17	30	38	62	57
7	Pemerasan	2	0	1	14	13
8	Pemeriksaan	0	0	0	5	5
9	Narkoba	5	28	46	4	88
10	Pengrusakan	9	11	10	13	10
11	Penipuan	72	124	53	78	134
12	Perzinaan	0	0	0	0	0
13	Perjudian	0	1	1	11	6
14	Lain-lain	46	117	73	81	88
Jumlah Total		297	543	554	605	890

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka 2012

2.4.3.1.2. Jumlah demo

Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa

19

biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah aksi demonstrasi yang terjadi di Kota Lhokseumawe selama lima tahun terakhir dengan harapan di tahun-tahun selanjutnya dapat berkurang ataupun diminimalisir. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.152** berikut ini,

Tabel 2.152
Jumlah Demonstrasi
Kota Lhokseumawe Tahun 2007-2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Bidang Politik	-	-	-	8	7
2	Bidang Ekonomi	-	3	6	11	11
3	Bidang Sosial budaya	-	-	3	8	4
4	Kasus Pemogokan Kerja	-	-	-	-	-
5	Jumlah unjuk rasa	-	3	9	27	22

Sumber : Polres Kota Lhokseumawe Tahun 2012

2.4.3.1.3.Lama proses perijinan

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi. Iklim usaha akan menjadi kondusif bila didukung oleh pelayanan perizinan yang baik yang dapat dilihat dari kecepatan dalam memberikan pelayanan masalah perizinan. Untuk Kota Lhokseumawe, aktivitas lamanya proses perijinan dapat dilihat pada **Tabel 2.153** berikut ini,

Tabel 2.153
Lama Proses Perijinan di Kota Lhokseumawe
Kota Lhokseumawe

No	Uraian	Lama mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya resmi (rata-rata maks Rph)
1	SIUP	3 (maks)	PT = 6 KOP. = 9 CV = 5 PO = 4	Kecil 50,000 Menengah 100,000 Besar 250,000
2	TDP	3 (maks)	PT = 5 KOP = 4 PO/CV = 3 Cabang = 3	PT 500,000 KOP. 100,000 CV 250,000 PO 100,000 lain-lain 250,000
3	IUI	5 (maks)	6	250,000
4	TDI	5 (maks)	6	100,000
5	IMB	14 (maks)	10	KLLB x KJLB x KGB x Rp. 500,000
6	HO	3-10 (maks)	14 (maks)	Ret. = LRTU x Tarif x IL/IG

Sumber : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Lhokseumawe tahun 2012

14

2.4.3.1.4. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui Perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan. Kota Lhokseumawe sendiri hanya memiliki Perda terkait dengan perizinan sedangkan untuk Perda yang lain sampai saat ini belum terwujudkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Data dibawah ini menunjukkan jumlah Perda terkait perizinan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.154** berikut ini,

Tabel 2.154
Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha
Kota Lhokseumawe

Uraian	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Jlh. Perda terkait perizinan	8	5	0	0	1	2
Jlh. Perda terkait lalu lintas barang dan jasa	-	-	-	-	-	-
Jlh. Perda terkait Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-

Sumber : KP2TSP Kota Lhokseumawe Tahun 2012

2.4.3.1.5. Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi pedesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di sekitarnya. Pembangunan desa dan pembangunan sektor yang lain di setiap pedesaan akan mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan itu pembangunan desa diarahkan untuk mengembangkan sumber daya manusianya yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia, dengan meningkatkan kualitas hidup, kemampuan, keterampilan dan prakarsanya, dalam memanfaatkan berbagai potensi desa maupun peluang yang ada untuk berkembang.

Berdasarkan kriteria status, Desa/ Kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni Desa Swadaya (tradisional); Desa Swakarya

14

(transisional); dan Desa Swasembada (berkembang). Pengertian masing-masing klasifikasi desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Desa Terbelakang atau Desa Swadaya

Desa terbelakang adalah desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Biasanya desa terbelakang berada di wilayah yang terpencil jauh dari kota, taraf berkehidupan miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasarana penunjang yang mencukupi;

2. Desa Sedang Berkembang atau Desa Swakarsa

Desa sedang berkembang adalah desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Desa swakarsa belum banyak memiliki sarana dan prasarana desa yang biasanya terletak di daerah peralihan desa terpencil dan kota. Masyarakat pedesaan swakarsa masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong;

3. Desa Maju atau Desa Swasembada

Desa maju adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat *memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik* desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju.

Dalam upaya peningkatan daya saing daerah salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah melalui peningkatan dan percepatan pertumbuhan status desa menjadi desa swasembada. Indikator peningkatan daya saing terkait pertumbuhan desa swasembada dapat dilihat dari persentase Desa/ Kelurahan berstatus swasembada terhadap total Desa/ Kelurahan.

Persentase Desa/ Kelurahan berstatus swasembada terhadap total Desa/ Kelurahan adalah proporsi jumlah Desa/ Kelurahan

29

berswasembada terhadap jumlah Desa/ Kelurahan, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini yang menunjukkan data mengenai desa di Kota Lhokseumawe sejak 6 (enam) tahn terakhir. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.155** berikut ini,

Tabel 2.155
Jumlah Desa Swasembada
Di Kota Lhokseumawe

No	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah Desa/Kelurahan Swadaya	13	11	9	9	18	18
2	Jumlah Desa/Kelurahan Swakarya	42	33	35	35	32	32
3	Jumlah Desa/Kelurahan Swasembada	2	2	2	2	2	2
4	Jumlah Desa/Kelurahan (1)+(2)+(3)	85	63	63	63	69	69
5	Persentase Desa berstatus swasemda dibagi jumlah desa/kelurahan (3)/(4)	0.024	0.032	0.032	0.032	0.029	0.029
		235.29	317.46	317.46	317.46	289.86	289.86

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Lhokseumawe Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah desa swasembada yang ada di Kota Lhokseumawe dari tahun 2006 sampai tahun 2011 tidak terjadi perubahan. Pada Tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 angka persentase berada pada angka 317,46. Sedangkan pada tahun 2010 dan 2011 angka persentase menjadi 289,86 yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah desa karena terjadi pemekaran beberapa desa di dalam wilayah Kota Lhokseumawe.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1. Ketenagakerjaan

2.4.4.1.1. Rasio lulusan S1/ S2/ S3

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di Kota Lhokseumawe sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk Kota Lhokseumawe maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada Kota Lhokseumawe dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3 sebagaimana yang tercantum pada tabel dibawah ini. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.156** berikut ini,

18

Tabel 2.156
Rasio Lulusan S1/S2/S3
Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011

No	Uraian	Tahun	
		2010	2011
1	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	589	552
2	Jumlah Penduduk	171.163	175.082
3	Rasio Kelulusan S1/S2/S3	34,412	31,528

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2010

2.4.4.1.2. Rasio ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif.

Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong daerah yang maju atau daerah yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64

tahun, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.157** berikut ini,

Tabel 2.157
Rasio Ketergantungan
Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011

No	Uraian	Tahun	
		2010	2011
1	Penudukk Usia <15 tahun	54.952	56.210
2	Penduduk Usis >64 Tahun	4.469	4.570
3	Penduduk usia 15-64	111.742	114.302
Rasio Ketergantungan		53,177	53,175

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2010-2011

2.4.5. Telaahan Dokumen Draf RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2011-2031

2.4.5.1. Telaahan Struktur Ruang Kota Lhokseumawe

Draf Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe Tahun 2011-2031 yang disusun untuk kurun waktu 20 tahun mendatang, pengembangan ruang Kota Lhokseumawe mengacu pada hierarki fungsional sesuai dengan RTRWN dan selaras dengan RTRW Provinsi antara lain: Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sehingga dalam penataan ruang Kota Lhokseumawe tidak terlepas dari penataan ruang di wilayah sekitarnya, yaitu :

- a. Dalam Konteks Nasioanal Kota Lhokseumawe adalah Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang membutuhkan keterkaitan aksesibilitas antar wilayah secara optimal.
- b. Fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional dituntut adanya keterkaitan Kota Lhoksuemawe dengan kota-kota hinterland disekitarnya yang berhimpitan untuk membagi beban dan fungsi-fungsi kegiatan perkotaan secara hirarkis dan terintegrasi.

Tujuan utama penataan struktur tata ruang Kota Lhokseumawe adalah penguatan fungsi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Lhokseumawe dan sekitarnya sebagai salah satu pusat pengembangan kawasan pesisir timur provinsi Aceh dengan peningkatan sektor perdagangan, jasa, industri dan pariwisata melalui pembangunan yang berkelanjutan.

RF

Struktur ruang di Kota Lhokseumawe terbentuk oleh sistem pusat-pusat pelayanan yang saling terintegrasi. Sistem pusat pusat pelayanan ini dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana wilayah dan terhubung oleh sistem jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi antar pusat-pusat pelayanan. Dengan demikian sistem pusat pusat pelayanan yang ditetapkan di Kota Lhokseumawe, yakni:

1. **Pusat Kegiatan Nasional** dengan pusatnya di Kota Lhokseumawe dan sekitarnya.
2. **Pusat Pelayanan Kota** dengan pusatnya di Keude Cunda. Merupakan pusat Kecamatan Muara Dua;
3. **Sub Pusat Pelayanan Kota** dengan pusatnya di Lhoksemawe (sekitar Jalan Sukaramai dan Jalan Perdagangan), Kandang, Batuphat Timur, Keude Peunteuet. Merupakan pusat-pusat dari tiap kecamatan;
4. **Pusat Lingkungan** dengan pusatnya di Lhokseumawe Selatan, Lhokseumawe Utara, Kandang, Cunda, Paloh Timur, Paloh Barat, Meuraksa, Peunteuet, Mangat Makmu. Merupakan pusat-pusat dari tiap mukim;

Tabel 2.158
Pusat-pusat Pelayanan Kegiatan di Kota Lhokseumawe

No	Fungsi Pelayanan	Pusat Kegiatan	Keterangan
1	Pusat Kegiatan Nasional	Kota Lhokseumawe dan sekitarnya	Kota Lhokseumawe dan sekitarnya (wilayah Kab. Aceh Utara, yaitu Kecamatan Dewantara dan Muara Batu)
2	Pusat Pelayanan Kota	Keude Cunda	Kecamatan Muara Dua
3	Sub Pusat Pelayanan Kota	Lhoksemawe	Pusat Kecamatan Banda Sakti
		Kandang	Pusat Kecamatan Muara Dua
		Batuphat Timur	Pusat Kecamatan Muara Satu
		Keude Peunteuet	Pusat Kecamatan Blang Mangat
4	Pusat Lingkungan	Lhokseumawe Selatan	Pusat Mukim Lhokseumawe Selatan
		Lhokseumawe Utara	Pusat Mukim Lhokseumawe Utara
		Kandang	Pusat Mukim Kandang
		Cunda	Pusat Mukim Cunda
		Paloh Timur	Pusat Mukim Paloh Timur
		Paloh Barat	Pusat Mukim Paloh Barat
		Meuraksa	Pusat Mukim Meuraksa
		Peunteuet	Pusat Mukim Peunteuet
		Mangat Makmu	Pusat Mukim Mangat Makmu

Sumber : Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2011-2031

Untuk lebih jelasnya telaahan struktur ruang Kota Lhokseumawe Tahun 2011-2031 dapat dilihat pada **Tabel 2.159** berikut ini, RP

Tabel 2.159
Tabel Hasil Telaahan Struktur Ruang
Kota Lhokseumawe

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima tahun ke-I	Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	Rencana Pusat Permukiman						
1.1	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Meningkatkan & melengkapi prasarana dan sarana PKN	Kota Lhokseumawe dan sekitarnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2	Pusat Pelayanan Kota (PPK)	• Penyusunan Rencana Tapal Batas Kecamatan	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3	Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)	• Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang • Penyusunan Rencana Tapal Batas Mukim & Gampong	Kec. Banda Sakti, Muara Satu, Muara Dua, Blang Mangat		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4	Pusat Lingkungan (PL)	• Penyusunan Rencana Tata Bangunan & Lingkungan serta • Penyusunan Rencana Revitalisasi Kawasan	Mukim dan Gampong tiap Kecamatan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
II.	Rencana Jaringan Transportasi						
II.1	Sistem Jaringan Transportasi Darat						
A.	Jaringan Jalan						
1.	Jaringan Jalan Arteri	• Peningkatan dan Pemeliharaan Ruas Jalan Banda Aceh - Medan	Kec. Muara Satu, Muara Dua, Blang Mangat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Ruas Jalan Pelabuhan Umum di Kec. Muara Satu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Peningkatan dan Pemeliharaan Ruas Jalan Bebas Hambatan	Kec. Blang Mangat		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Jaringan Jalan Kolektor 1	• Peningkatan dan Pemeliharaan Ruas Jalan Elak	Kec. Muara Satu, Muara Dua, Blang Mangat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		• Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Kolektor 1	1. Ruas Jalan Batas Jln Elak - Jln Ateri (via Ujong Pasu)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			2. Ruas Jalan Los Kala - Simpang Kandang & Jembatan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Jaringan Jalan Kolektor 2	• Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kolektor 2	1. Ruas Jalan Merdeka Barat (menghubungkan Ruas Jalan Medan-Banda Aceh ke Ruas Jalan Los Kala - Simpang Kandang)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			2. Ruas Jalan Merdeka Timur (menghubungkan Ruas Jalan Medan-Banda Aceh ke Ruas Jalan Los Kala - Simpang Kandang)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			3. Ruas Jalan Pase (menghubungkan Ruas Jalan Cut Mutia ke Ruas Jalan Merdeka Timur)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima tahun ke-I	Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			4. Ruas Jalan Stadion (menghubungkan Ruas Jalan Pase ke Ruas Jalan Merdeka Timur)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			5. Ruas Jalan Tgk. Chik Di Puloh (menghubungkan Ruas Jalan Medan-Banda Aceh ke Ruas Jalan Ujong Pacu- Elak)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			6. Ruas Jalan Paya Billi (menghubungkan Ruas Jalan Medan-Banda Aceh ke Ruas Jalan Ujong Pacu- Elak)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			7. Ruas Jalan Buloh Blang Ara (menghubungkan Ruas Jalan Medan-Banda Aceh ke Batas Kota)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			8. Ruas Jalan Kandang (menghubungkan Ruas Jalan Medan-Banda Aceh ke Batas Kota)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			9. Ruas Jalan AURI (menghubungkan Ruas Jalan Medan-Banda Aceh ke Ruas Jalan Linc Pipa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			10. Ruas Jalan Alue Raya (menghubungkan Ruas Jalan Medan-Banda Aceh ke Ruas Jalan Linc Pipa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			11. Ruas Jalan Keude Peunteuet (menghubungkan Ruas Jalan Medan-Banda Aceh ke Batas Kota)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Jaringan Jalan Lokal	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Lokal 1 	Ruas jalan yang menghubungkan antar Gampong	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Lokal 2 	Ruas jalan yang menghubungkan antar dan dalam Gampong	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.	Prasarana Lalu Lintas						
1.	Terminal	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Terminal Tipe A 	Alue Lim, Kec. Blang Mangat	<input type="checkbox"/>			
		<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Terminal Tipe C 	Kec. Muara Satu, Kec. Blang Mangat		<input type="checkbox"/>		
		<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Terminal Barang 	Kandang, Kec. Muara Dua	<input type="checkbox"/>			
		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Terminal Tipe B 	Mon Geudong, Kec. Banda Saikti			<input type="checkbox"/>	
II.2	Sistem Jaringan Transportasi Laut	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Terminal Khusus Arun 	Blang Lancang, Kec. Muara Satu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

RF

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima tahun ke-I	Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		• Pengembangan PPI Pusong	Pusong, Kec. Banda Sakti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
II.3	Sistem Jaringan Kereta Api	• Revitalisasi Rel Kereta Api	Kec. Muara Satu, Blang Mangat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		• Pembangunan Rel Kereta Api	Kec. Muara Satu, Muara Dua, Blang Mangat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		• Pembangunan Stasiun Kereta Api	Paya Peunteut (Kec. Muara Dua), Blang Panyang (Kec. Muara Satu) dan Ahe Awe (Kec. Blang Mangat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
II.4	Perencanaan Sistem Transportasi	• Perencanaan Tataran Transportasi Lokal	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>			
III.	Rencana Jaringan Energi						
III.1	Sistem Jaringan Minyak & Gas	• Pengembangan Jaringan Transmisi dan Distribusi Pipa Minyak & Gas Arun-Medan	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
III.2	Sistem Jaringan Listrik	• Pembangunan Jaringan SUTT 275 KV	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		• Pengembangan Jaringan Listrik 150 KV	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		• Peningkatan Jaringan Listrik ke RT	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IV.	Rencana Jaringan Telekomunikasi						
		• Peningkatan Jaringan Kabel	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		• Peningkatan Jaringan Nirkabel	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V.	Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air						
V.1	Sistem Jaringan Air Baku	• Pembangunan WTP	Kab. Aceh Utara, Kab. Bireuen dan Kota Lhokseumawe		<input type="checkbox"/>		
		• Pembangunan Saluran Distribusi	Kab. Aceh Utara, Kab. Bireuen dan Kota Lhokseumawe		<input type="checkbox"/>		
V.2	Sistem Jaringan Pengendali Banjir	• Peningkatan Prasarana Waduk (reservoir)	Kec. Banda Sakti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		• Pembangunan Tanggul	1. Kreung Cunda Kec. Banda Sakti, 2. Kreung Alur Raya, Kec. Blang Mangat 3. Kreung Buloh, Kec. Muara Satu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		• Normalisasi Sungai	1. Kreung Cunda Kec. Banda Sakti, 2. Kreung Alur Raya, Kec. Blang Mangat 3. Kreung Buloh, Kec. Muara Satu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V.3	Pengembangan Fungsi Danau	• Normalisasi Danau	Jeulikat, Kec. Blang Mangat Seuneubok, Kec. Muara Satu Mane Kareung, Kec. Muara Dua		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V.4	Sistem Jaringan Irigasi	• Pengembangan Prasarana Irigasi	Kec. Blang Mangat, Kec. Muara Satu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		• Pengawasan Prasarana Irigasi	Kec. Blang Mangat, Kec. Muara Satu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		• Pemeliharaan Prasarana Irigasi	Kec. Blang Mangat, Kec.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima tahun ke-I	Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Muara Satu				
VI.	Pengembangan Infrastruktur Kota						
VI.1	Sistem Penyediaan Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Kelembagaan Pengelola 	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>			
		<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan Sistem Air Bersih 	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>			
		<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan IPAB 	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<ul style="list-style-type: none"> Perluasan Pelayanan Air Bersih Perpipaan 	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<ul style="list-style-type: none"> Penambahan SR 	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VI.2	Sistem Pengolahan Limbah	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan IPLT 	Alue Lim, Kec. Blang Mangat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan IPLT 	Alue Lim, Kec. Blang Mangat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VI.3	Sistem Pengelolaan Sampah	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Kelembagaan Pengelola 	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>			
		<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah 		<input type="checkbox"/>			
		<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Prasarana & Sarana 		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan TPA Regional 	Alue Lim, Kec. Blang Mangat				
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan TPS Sampah 	Tiap Kecamatan				
		<ul style="list-style-type: none"> - Alat Angkut 	Kota Lhokseumawe				
		<ul style="list-style-type: none"> - Bak Sampah 	Kota Lhokseumawe				
VI.4	Sistem Drainase	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan Sistem Drainase 	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>			
		<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Salura Drainase 	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<ul style="list-style-type: none"> - Saluran Primer 					
		<ul style="list-style-type: none"> - Saluran Sekunder 					
		<ul style="list-style-type: none"> - Saluran Sekunder 					
		<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi Saluran Drainase 	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<ul style="list-style-type: none"> - Saluran Sekunder 					
		<ul style="list-style-type: none"> - Saluran Sekunder 					
		<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan Salura Drainase 	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<ul style="list-style-type: none"> - Saluran Primer 					
		<ul style="list-style-type: none"> - Saluran Sekunder 					
		<ul style="list-style-type: none"> - Saluran Sekunder 					
VI.4	Prasarana dan Sarana Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan 	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>			
		<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan 	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan 	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VI.5	Jalur Evakuasi Bencana	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Kelembagaan 	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>			
		<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Prasarana & Sarana Jalur Evakuasi 	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Kebencanaalamatan 	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sumber : Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2011-2031

2.4.5.2. Telaahan Terhadap Pola Ruang Kota Lhokseumawe

Rencana Pola Ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah seperti pada **Tabel 2.160** berikut ini,

Tabel 2.160
Hasil Telaahan Pola Ruang
Kota Lhokseumawe

No	Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				lima tahun ke-I	lima tahun ke-II	lima tahun ke-III	lima tahun ke-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. Rencana Kawasan Lindung							
I.1	Kawasan Perlindungan Setempat						
A.	Sempadan Pantai	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan Sempadan Pantai • Penanaman Vegetasi Pantai • Pemeliharaan Vegetasi Pantai 	Sepanjang Pantai Meuraksa Sepanjang Pantai Meuraksa	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
B.	Sempadan Sungai	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan Sempadan Sungai • Penanaman dan Pemeliharaan Vegetasi 	Kreung Cunda, Kec. Banda Sakti Kreung Alur Raya, Kec. Blang Mangat Kreung Buloh, Kec. Muara Satu Kreung Cunda, Kec. Banda Sakti Kreung Alur Raya, Kec. Blang Mangat Kreung Buloh, Kec. Muara Satu	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
C.	Kawasan Sekitar Danau/Waduk	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan Kawasan Sekitar Danau/Waduk 	Sepanjang danau/waduk di Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
I.2	Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Ruang Terbuka Hijau • Penataan Jalur Hijau Jalan - Penataan Taman Kota - Penataan Jalur Hijau Jalan - Penataan Sempadan Rel Kereta Api - Penataan Jalur jaringan listrik tegangan tinggi • Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau 	Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe Kec. Muara Satu, Muara Dua, Blang Mangat Kec. Muara Satu, Muara Dua, Blang Mangat Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
II. Rencana Kawasan Budidaya Yang Memiliki Nilai Strategis							
II.1	Kawasan Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Prasarana dan Sarana • Pengembangan Perumahan PNS • Penataan Kawasan Perumahan Nelayan 	Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe Pusong, Kec. Banda Sakti & Meuraksa, Kec. Blang Mangat	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
II.2	Kawasan Perdagangan dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan Kaw. Perdagangan dan Jasa - Penataan Kaw. CBD - Penataan Kaw. Pasar Tradisional • Pengembangan Kaw. Perdagangan dan Jasa 	Cunda, Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe 1. Koridor Jalan Elak 2. Koridor Jalan Banda Aceh Medan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
II.3	Kawasan Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Kawasan 	Mon Geudong, Kec. Banda Sakti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

19

No	Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				lima tahun ke-I	lima tahun ke-II	lima tahun ke-III	lima tahun ke-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Perkantoran					
		• Rehabilitasi Bangunan Perkantoran	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
II.4	Kawasan Industri	• Perencanaan Pengembangan Industri	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>			
		• Pengembangan Prasarana dan Sarana Kawasan Industri	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		• Pengembangan Kegiatan Industri Kecil	Batuphat, Kecamatan Muara Satu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Blang Cut, Kecamatan Hlang Mangat				
II.5	Kawasan Pariwisata	• Perencanaan Induk Pariwisata	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>			
		• Pengembangan Objek Wisata Alam		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			1. Pantai Ujong Blang, Kec. Banda Sakti				
			2. Pulau Semadu, Kec. Muara Satu				
			3. Pantai Pulo Daruet, Kec. Muara Dua				
			4. Kawasan KP3, Kec. Banda Sakti				
			5. Kawasan Krueng Cunda Kec. Banda Sakti & Muara Dua				
			6. Danau di Jculikat, Kec. Blang Mangat				
			7. Danau di Seuneubok, Kec. Blang Mangat				
			8. Danau di Mane Kareung, Kec. Muara Dua				
		• Pengembangan Objek Wisata Budaya	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		• Pengembangan Objek Wisata Buatan	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		• Peningkatan Prasarana & Sarana Objek	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
II.6	Ruang Terbuka Non Hijau	• Perencanaan Ruang Terbuka Non Hijau	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>			
		• Pengembangan Prasarana dan Sarana	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
II.7	Ruang Evakuasi Bencana	• Perencanaan Ruang Evakuasi Bencana	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>			
		• Pengembangan Prasarana dan Sarana	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
II.8	Kawasan Sektor Informal	• Perencanaan Ruang Sektor Informal	1. Sekitar Jalan Merdeka dekat KP3, Kec. Banda Sakti	<input type="checkbox"/>			
			2. Lapangan KP3, Kec. Banda Sakti				
			3. Sekitar Jalan Samudera Baru, Kec. Banda Sakti;				
			4. Sekitar Stadion Mon Geudong, Kec. Banda Sakti;				
		• Penyediaan Ruang Sektor Informal	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
II.9	Kawasan Pertanian	• Peningkatan Produktivitas Lahan Pertanian	Atur Lim, Kec. Blang Mangat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

No	Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				lima tahun ke-I	lima tahun ke-II	lima tahun ke-III	lima tahun ke-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
II.10	Kawasan Perikanan	• Pengembangan Kegiatan Peternakan	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		• Pengembangan Budi Daya Perikanan	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		• Pengembangan PPI Pusong	Pusong, Kec. Banda Sakti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		• Peningkatan Prasarana dan Sarana TPI	Blang Naleung Mameh, Kec. Muara Satu		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			Los Kala, Kec. Banda Sakti				
			Meuraksa, Kec. Blang Mangat				
II.11	Kawasan Strategis Kota						
A.	Kawasan Perdagangan Cunda	• Penyusunan Rencana Kaw.CBD Cunda	Cunda, Kec. Muara Dua	<input type="checkbox"/>			
		• Pengembangan Prasarana dan Sarana	Cunda, Kec. Muara Dua	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B.	Kawasan Industri Menengah	• Penyusunan Masterplan Kawasan Industri Menengah	Jeulikat, Kec. Blang Mangat & Blang Naleung Mameh, Kec. Muara Satu	<input type="checkbox"/>			
		• Pengembangan Prasarana dan Sarana	Jeulikat, Kec. Blang Mangat & Blang Naleung Mameh, Kec. Muara Satu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C.	Kawasan PPI Pusong	• Pengembangan Prasarana dan Sarana	Pusong, Kec. Banda Sakti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D.	Kawasan Wisata Pantai	• Penyusunan Rencana Kawasan Pariwisata	1. Kawasan Wisata Pulau Semadu	<input type="checkbox"/>			
			2. Kawasan Wisata Ujong Blang				
			3. Kawasan Wisata KP3				
		• Pengembangan Prasarana dan Sarana	1. Kawasan Wisata Pulau Semadu		<input type="checkbox"/>		
			2. Kawasan Wisata Ujong Blang				
			3. Kawasan Wisata KP3				
E.	Kawasan Wisata Kreung Cunda	• Penyusunan Masterplan Kawasan Wisata	Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua	<input type="checkbox"/>			
		• Pengembangan Prasarana dan Sarana	Kec. Banda Sakti, Kec. Muara Dua	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
F.	Kawasan Perkantoran Banda Sakti	• Penataan Kawasan Perkantoran	Mon Geudong, Kec. Banda Sakti	<input type="checkbox"/>			
		• Pembebasan Lahan	Mon Geudong, Kec. Banda Sakti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
G.	Kawasan Koridor Jalan Elak	• Penataan Kawasan	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>			
		• Pengembangan Prasarana dan Sarana	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H.	Kawasan Permukiman Baru	• Penataan Kawasan	Blang Crum, Kec. Muara Dua	<input type="checkbox"/>			
		• Pengembangan Prasarana dan Sarana	Blang Crum, Kec. Muara Dua	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I.	Kawasan Rawan Abrasi Pantai Kota	• Penataan Kawasan Rawan Abrasi Pantai Kota	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>			
		• Pembangunan Infrastruktur Pantai	Kota Lhokseumawe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J.	Kawasan Waduk (Reservoir)	• Penataan Kawasan Waduk (Reservoir)	Mon Geudong, Kec. Banda Sakti,	<input type="checkbox"/>			
		• Pembangunan Infrastruktur Pengaman Waduk	Mon Geudong, Kec. Banda Sakti,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Sumber : Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2011-2031

14

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBK

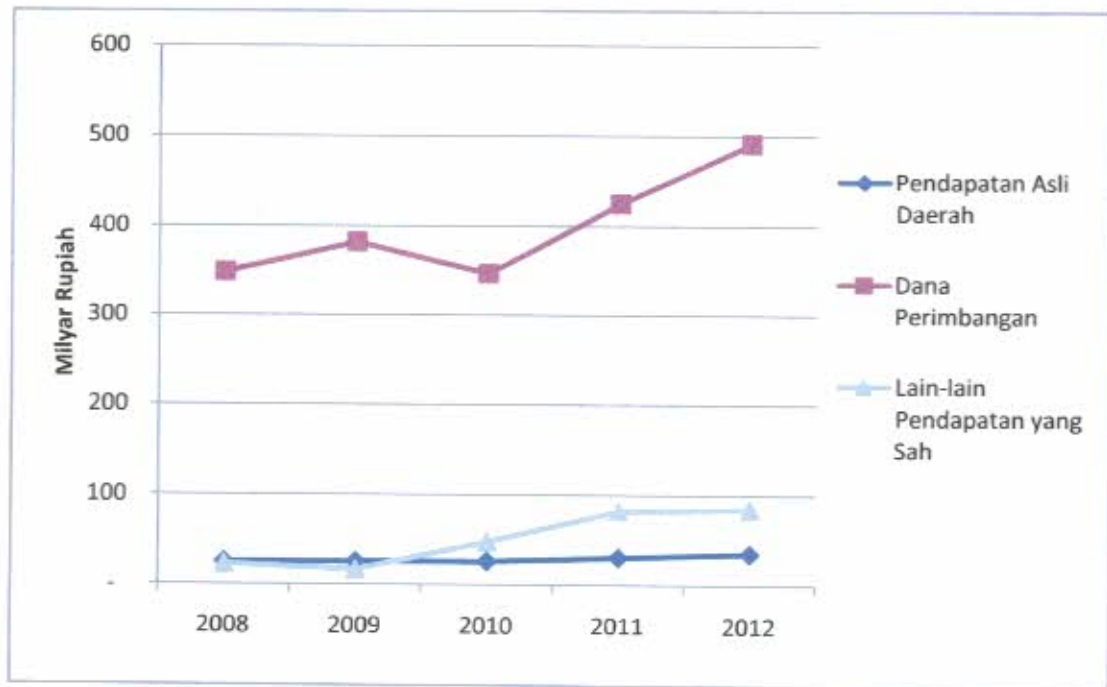
3.1.1.1 Sumber Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam perencanaan APBK terdapat target pendapatan daerah yang merupakan capaian yang harus diperoleh, sedangkan pada akhir tahun anggaran, diketahui realisasi penerimaan atas pendapatan daerah. Berdasarkan data realisasi tahun 2011, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe dalam realisasinya hanya menyumbangkan sebesar 5,51% dari total realisasi pendapatan daerah. Sementara porsi terbesar berasal dari Dana Perimbangan sebesar 82,11% dari total pendapatan daerah, sedangkan sisanya merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 12,38%.

Proporsi Dana Perimbangan cenderung mengalami menurun dari tahun 2008-2011. Pada tahun 2008, proporsi Dana Perimbangan mencapai 89,08% dan pada tahun 2011 turun menjadi 82,11%. Penurunan proporsi dana perimbangan ini belum menunjukkan kemandirian daerah. Penurunan proporsi dana perimbangan yang relatif besar tidak diikuti peningkatan proporsi PAD yang sebanding. Selama tahun 2008-2011, pergeseran proporsi PAD hanya berkisar 0,19%. Proporsi PAD pada tahun 2008 adalah sebesar 5,32% dan pada tahun 2011 menjadi 5,51%. Pergeseran proporsi pendapatan yang signifikan bersumber dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pada tahun 2008, proporsinya hanya sebesar 5,61% dan pada tahun 2011 mencapai 12,38%. Pergeseran yang besar ini disebabkan karena adanya peningkatan Lain-lain Pendapatan terkait dengan dana transfer daerah untuk tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan untuk guru PNSD.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir realisasi Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama tahun 2008-2012, rata-rata pertumbuhannya mencapai 9,97% per tahun. Pertumbuhan yang tertinggi adalah Lain-lain Pendapatan yang Sah, yang rata-rata pertumbuhannya mencapai 51,69%

per tahun. Tingginya pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan pendapatan dari pos Lain-lain Pendapatan dan Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Sementara itu, pertumbuhan PAD dan Dana Perimbangan masing-masing sebesar -0,63% per tahun dan 9,31% per tahun.



Gambar 3.1. Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2012

Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2012

Uraian	2008		2009		2010		2011		2012 *)		Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Realisasi (Rp)	Proporsi (%)	Realisasi (Rp)	Proporsi (%)	Realisasi (Rp)	Proporsi (%)	Realisasi (Rp)	Proporsi (%)	Realisasi (Rp)	Proporsi (%)	
	PENDAPATAN	387,358,498,427	100.00	386,173,304,983	100.00	411,680,580,530	100.00	520,817,290,063	100.00	557,715,016,429	
Pendapatan Asli Daerah	20,598,965,381	5.32	21,580,801,975	5.59	19,414,993,503	4.72	28,690,316,648	5.51	26,936,634,819	4.83	(0.63)
Pajak Daerah	13,167,626,226	3.40	12,882,152,930	3.34	9,763,844,152	2.37	17,119,382,845	3.29	14,462,262,495	2.59	8.36
Retribusi Daerah	2,178,729,500	0.56	2,132,928,292	0.55	2,519,325,900	0.61	2,717,821,650	0.52	5,770,756,006	1.03	34.06
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	373,496,344	0.10	1,782,104,408	0.46	2,187,559,393	0.53	1,612,239,136	0.31	1,501,355,278	0.27	91.68
Zakat, Infaq dan Shadaqah	-	-	-	-	-	-	3,794,267,588	0.73	1,241,590,278	0.22	(16.82)
Lain-lain PAD yang sah	4,879,113,311	1.26	4,783,616,345	1.24	4,944,264,058	1.20	3,446,605,429	0.66	3,960,670,762	0.71	(3.49)
Dana Perimbangan	345,046,417,664	89.08	350,114,528,634	90.66	343,842,845,121	83.52	427,637,314,038	82.11	484,057,334,942	86.79	9.31
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	80,527,990,664	20.79	67,293,342,634	17.43	55,881,979,121	13.57	57,727,331,461	11.08	63,968,820,116	11.47	(4.82)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	-	11,612,402,737	2.23	-	-	(25.00)
Dana Alokasi Umum	233,315,427,000	60.23	248,522,186,000	64.36	268,733,766,000	65.28	336,692,779,840	64.65	394,073,844,827	70.66	14.25
Dana Alokasi Khusus	31,203,000,000	8.06	34,299,000,000	8.88	19,227,100,000	4.67	21,604,800,000	4.15	26,014,670,000	4.66	(0.31)
Lain-lain Pendapatan yang Sah	21,713,115,382	5.61	14,477,974,374	3.75	48,422,741,906	11.76	64,489,659,377	12.38	46,721,046,667	8.38	51.69
Hibah	2,048,690,800	0.53	-	-	701,429,375	0.17	979,730,625	0.19	380,308,867	0.07	(30.38)
Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)	10,726,524,582	2.77	8,995,249,374	2.33	14,490,987,065	3.52	9,916,716,331	1.90	12,956,916,650	2.32	11.01
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus ***)	8,937,900,000	2.31	-	-	-	-	-	-	8,533,427,000	1.53	(25.00)
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-	-	-	-	8,055,325,466	1.96	11,384,457,680	2.19	5,023,583,245	0.90	(3.64)
Lain-lain Pendapatan	-	-	5,482,725,000	1.42	25,175,000,000	6.12	42,208,754,741	8.10	19,826,810,905	3.56	93.45

Sumber : DPKAD Kota Lhokseumawe, *) Realisasi Proyeksi

14

3.1.1.2 Pendapatan Daerah

3.1.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 22 ayat (1), ada 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (iv) Lain-lain PAD yang sah.

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah di Kota Lhokseumawe cenderung mengalami peningkatan, namun tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat, khususnya terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) masih besar. Jika dilihat dari tingkat pertumbuhan PAD dari tahun 2008 hingga 2012 maka angka pertumbuhannya selalu positif. Artinya dari sisi daya tumbuh sudah besar, hanya kontribusinya ke Pendapatan Daerah masih relatif kecil. Penerimaan dari Pajak Daerah bertumbuh rata-rata sebesar 2,68% pertahun dan Retribusi Daerah bertumbuh rata-rata 47,48% pertahun sedangkan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2012 masing-masing sebesar 2,68% dan 0,72% sebagaimana terlihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Kontribusi masing-masing Pos Pendapatan dalam Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	PENDAPATAN	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	6.41	6.05	6.20	5.68	5.74
1.1.1.	Pajak Daerah	3.75	3.31	3.38	3.04	2.68
1.1.2.	Retribusi Daerah	0.56	0.59	0.90	0.77	1.20
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	0.57	0.60	0.60	0.47	0.42
1.1.4.	Zakat, Infaq dan Shadaqah	-	-	-	0.56	0.64
1.1.5.	Lain-lain PAD yang sah	1.53	1.55	1.32	0.83	0.81
1.2.	Dana Perimbangan	87.84	90.01	82.38	79.01	80.40
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	21.11	23.35	13.80	10.79	11.63